

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI

Februari
2017



**Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Bali**



KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

PROVINSI BALI

FEBRUARI 2017

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan

Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Email :

t_setiadi@bi.go.id

umran_u@bi.go.id

putriana_n@bi.go.id

rai_gdw@bi.go.id

dea_wr@bi.go.id

nm_wiwiaks@bi.go.id

trio_pa@bi.go.id



Februari 2017

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL PROVINSI BALI



Februari
2017

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Bali

 **BANK INDONESIA**
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Bali



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali Februari 2017. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional.

Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada *stakeholders*.

Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, *stakeholders* dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ide-ide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam KEKR masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut.

Akhir kata, kami berharap semoga KEKR ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 22 Februari 2017

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

TTD

Causa Iman Karana
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	14
Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali	18
Bab I Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	23
1.1. KONDISI UMUM	25
1.2. SISI PERMINTAAN	25
1.2.1. Konsumsi	26
1.2.2. Investasi	29
1.2.3. Neraca Perdagangan	31
1.3. SISI PENAWARAN	36
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38
1.3.2. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	40
1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi	41
1.3.4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42
1.3.5. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	43
1.3.6. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	44
Bab II Keuangan Pemerintah	51
2.1. GAMBARAN UMUM	53
2.2. REALISASI APBD PROVINSI BALI TAHUN 2016	55
2.2.1. Pagu Pendapatan Tahun 2016	56
2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Tahun 2016	59
2.3. REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI TAHUN 2016	61
2.3.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016	61
2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016	64
2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI TAHUN 2016	66
2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali Tahun 2016	66
Bab III Perkembangan Inflasi Daerah	69
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	71
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	72
3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	72

3.2.2. Inflasi Menurut Kota	77
3.3. DISAGREGASI INFLASI	79
a) <i>Volatile Food</i>	80
b) <i>Administered Prices</i>	80
c) <i>Core Inflation</i>	81
3.4. INFLASI PERDESAAN	82
Bab IV Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	91
4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA	93
4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI	101
4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN)	105
4.4. AKSES KEUANGAN	107
Bab V Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	113
5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	115
Bab VI Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	121
6.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN	123
6.2. KESEJAHTERAAN	124
Bab VII Prospek Perekonomian Daerah	127
7.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL	129
7.2. INFLASI BALI TAHUN 2017	132
7.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI	132
Daftar Singkatan	134

Daftar Grafik

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Triwulanan	25
Grafik 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali	25
Grafik 1. 3 Indeks Keyakinan Konsumen	27
Grafik 1. 4 Indeks Tendensi Konsumen	27
Grafik 1. 5 Pendaftaran Kendaraan	27
Grafik 1. 6 Pertumbuhan Pendaftaran Mobil dan Sepeda Motor	27
Grafik 1. 7 Kredit Kepemilikan Rumah	28
Grafik 1. 8 Konsumsi Listrik RT	28
Grafik 1. 9 Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali	29
Grafik 1. 10 <i>Likert</i> Investasi	30
Grafik 1. 11 Penjualan Semen Provinsi Bali	30
Grafik 1. 12 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali	32
Grafik 1. 13 Volume Ekspor Luar Negeri Bali	32
Grafik 1. 14 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw IV 2016	33
Grafik 1. 15 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama	33
Grafik 1. 16 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan	33
Grafik 1. 17 Pertumbuhan Nilai Ekspor berdasarkan Negara Tujuan	33
Grafik 1. 18 Tingkat Penghunian Kamar	34
Grafik 1. 19 <i>Average Room Rate</i> Bali	34
Grafik 1. 20 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan	34
Grafik 1. 21 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali	35
Grafik 1. 22 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali	35
Grafik 1. 23 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC	35
Grafik 1. 24 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC	35
Grafik 1. 25 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan IV 2016	37
Grafik 1. 26 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan IV 2016	37
Grafik 1. 27 Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha	38
Grafik 1. 28 Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (SBT)	38
Grafik 1. 29 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan	38
Grafik 1. 30 Kedatangan Penumpang Pesawat Bandar Udara Ngurah Rai	39
Grafik 1. 31 Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-Rata Lama Menginap	39
Grafik 1. 32 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara	39
Grafik 1. 33 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali	39
Grafik 1. 34 Arus Penumpang Laut Provinsi Bali	40
Grafik 1. 35 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai	41
Grafik 1. 36 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali	41

Grafik 1. 37 Kegiatan Usaha Sektor Bangunan	41
Grafik 1. 38 Perkembangan Produksi Perikanan	42
Grafik 1. 39 Perkembangan Produksi Bawang Merah 2016	42
Grafik 1. 40 Perkembangan Produksi Padi di Bali	42
Grafik 1. 41 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pertanian	43
Grafik 1. 42 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)	43
Grafik 1. 43 Kredit Kategori Industri	43
Grafik 1. 44 Perkembangan Total Penjualan	44
Grafik 1. 45 Perkembangan Total Penjualan Kelompok Komoditas	44
Grafik 1. 46 Perkembangan Volume Impor Barang Modal	45
Grafik 2. 1 Pangsa Realisasi Anggaran Komponen Pendapatan Daerah	57
Grafik 2. 2 Struktur Realisasi PAD	58
Grafik 2. 3 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2015	66
Grafik 2. 4 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2016	67
Grafik 3. 1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)	71
Grafik 3. 2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)	71
Grafik 3. 3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali	72
Grafik 3. 4 nflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali	73
Grafik 3. 5 Perkembangan Harga Cabai Merah (Rp/kg) di Provinsi Bali	73
Grafik 3. 6 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali	74
Grafik 3. 7 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali	74
Grafik 3. 8 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	74
Grafik 3. 9 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	74
Grafik 3. 10 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali	75
Grafik 3. 11 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali	75
Grafik 3. 12 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali	75
Grafik 3. 13 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali	76
Grafik 3. 14 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali	76
Grafik 3. 15 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali	76
Grafik 3. 16 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali	76
Grafik 3. 17 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali	77
Grafik 3. 18 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	77
Grafik 3. 19 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja	77
Grafik 3. 20 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)	80
Grafik 3. 21 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm)	80
Grafik 3. 22 Interaksi Permintaan dan Penawaran	82
Grafik 3. 23 Ekspektasi Konsumen	82
Grafik 3. 24 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)	82
Grafik 3. 25 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)	82

Grafik 4. 1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali	93
Grafik 4. 2 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini	93
Grafik 4. 3 Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Mendatang	94
Grafik 4. 4 Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi	94
Grafik 4. 5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali	94
Grafik 4. 6 Komposisi DPK Bali	95
Grafik 4. 7 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Bali	96
Grafik 4. 8 Komposisi DPK Perseorangan di Bali	96
Grafik 4. 9 Pertumbuhan DPK Perseorangan Bali Tiap Jenis Penempatan	96
Grafik 4. 10 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan	97
Grafik 4. 11 Komposisi Kredit Konsumsi dan Komposisi Kredit	97
Grafik 4. 12 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Bali	98
Grafik 4. 13 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali	98
Grafik 4. 14 Komposisi Ekspor Bali Triwulan IV 2016	101
Grafik 4. 15 Kondisi Kegiatan Usaha di Bali	102
Grafik 4. 16 Kinerja Korporasi di Bali Berdasarkan <i>Liaison</i> Triwulan IV 2016	102
Grafik 4. 17 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali	103
Grafik 4. 18 Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Berdasarkan Sektoral	103
Grafik 4. 19 Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi	105
Grafik 4. 20 Pertumbuhan Kredit Korporasi	105
Grafik 4. 21 NPL Kredit Korporasi	105
Grafik 4. 22 Pertumbuhan Kredit UMKM	108
Grafik 4. 23 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit	108
Grafik 4. 24 Pangsa Nominal Kredit UMKM	108
Grafik 4. 25 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten	108
Grafik 4. 26 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja	109
Grafik 4. 27 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja	109
Grafik 5. 1 Perkembangan Kliring	115
Grafik 5. 2 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong	115
Grafik 5. 3 Perkembangan Uang Kartal di Bali	116
Grafik 5. 4 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling	116
Grafik 5. 5 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali	117
Grafik 5. 6 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali	117
Grafik 5. 7 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali	117
Grafik 5. 8 Perkembangan Transaksi Penyelenggara KUPVA BB yang Berlokasi di Hotel	118
Grafik 6. 1 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran	123
Grafik 6. 2 Perkembangan Indikator Survei Konsumen	124
Grafik 6. 3 Indikator Ekspektasi Survei Konsumen	124
Grafik 6. 4 Perkembangan Nilai Tukar Petani	125

Grafik 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulanan	129
Grafik 7. 2 Ekspektasi Penghasilan	129
Grafik 7. 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahunan	131
Grafik 7. 4 Proyeksi Inflasi Bali	132

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (% , yoy)	26
Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (% , yoy)	36
Tabel 2. 1 Pagu Belanja Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	53
Tabel 2. 2 Pagu Pendapatan Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	53
Tabel 2. 3 Realisasi Belanja Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	54
Tabel 2. 4 Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	54
Tabel 2. 5 Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Pagu di Bali 2015-2016	55
Tabel 2. 6 Pagu & Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	55
Tabel 2. 7 Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	56
Tabel 2. 8 Pagu dan Realisasi APBD P Provinsi Bali 2015-2016	59
Tabel 2. 9 Pagu APBD P Untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali 2015-2016	62
Tabel 2. 10 Realisasi Nominal Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2015-2016	62
Tabel 2. 11 Persentase Realisasi Pendapatan Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Terhadap Pagu APBD P (2015-2016)	63
Tabel 2. 12 Pagu Belanja APBD P 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2015-2016	64
Tabel 2. 13 Realisasi Belanja APBD P untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode 2015-2016	65
Tabel 2. 14 Realisasi Persentase Belanja Terhadap Pagu APBD P untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode 2015-2016	65
Tabel 2. 15 Pagu dan Realisasi APBN P Provinsi Bali Tahun 2015-2016	66
Tabel 3. 1 Produksi Cabai Rawit Merah Tahun 2016 di Provinsi Bali	73
Tabel 3. 2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran	77
Tabel 3. 3 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil dan Frekuensi Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2016	78
Tabel 3. 4 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran	78
Tabel 3. 5 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil dan Frekuensi Inflasi di Kota Singaraja Tahun 2016	79
Tabel 4. 1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan	94
Tabel 4. 2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan	95
Tabel 4. 3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan	95
Tabel 4. 4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali	97
Tabel 4. 5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan IV 2016	98
Tabel 4. 6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali	99
Tabel 4. 7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali	100
Tabel 4. 8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan IV 2016	100
Tabel 4. 9 NPL Kredit Multiguna	100
Tabel 4. 10 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang	104
Tabel 4. 11 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali	106

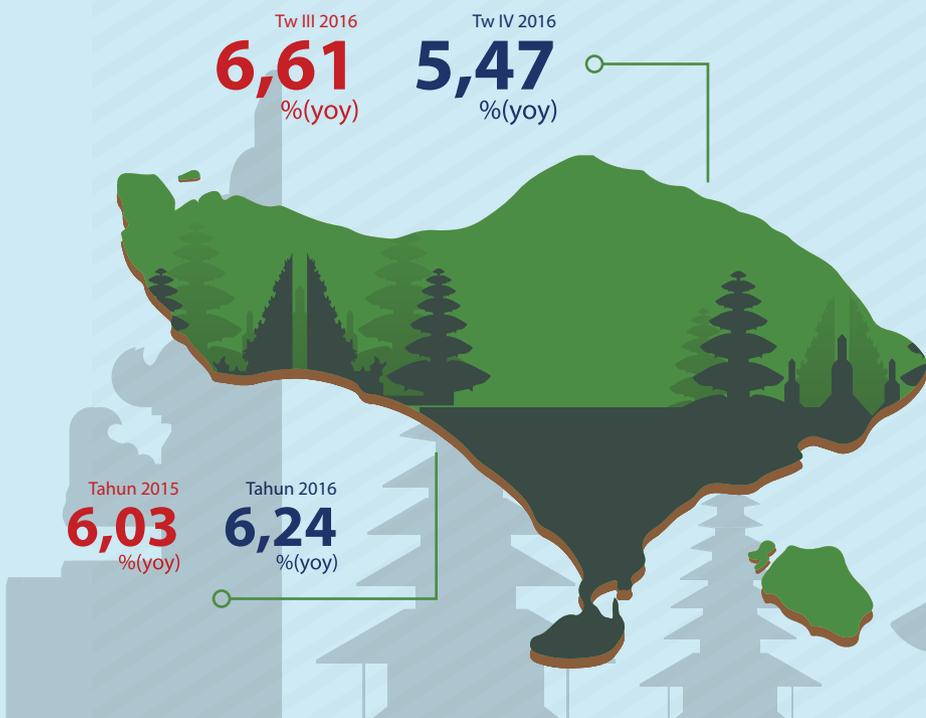
Tabel 4. 12 Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum di Bali	106
Tabel 4. 13 Perkembangan Indikator BPR di Bali	107
Tabel 5. 1 Perkembangan Perputaran Kliring	115
Tabel 5. 2 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali	116
Tabel 6. 1 Perkembangan Kemiskinan Bali	124
Tabel 6. 2 Perkembangan Nilai Tukar Petani	126
Tabel 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali	131

Daftar Boks

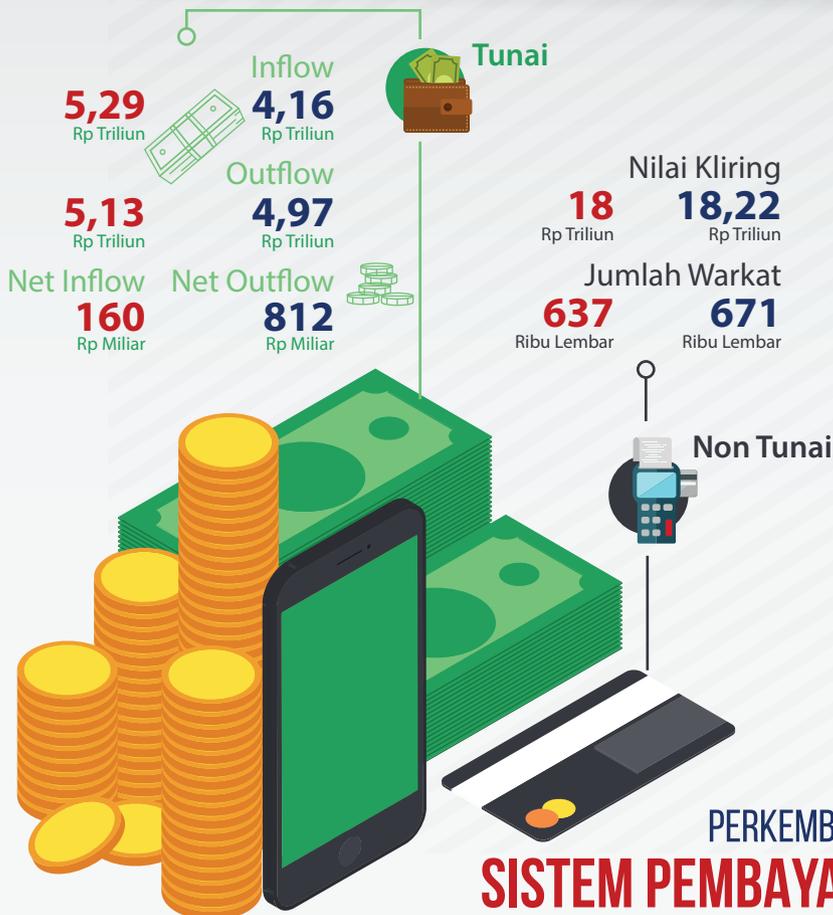
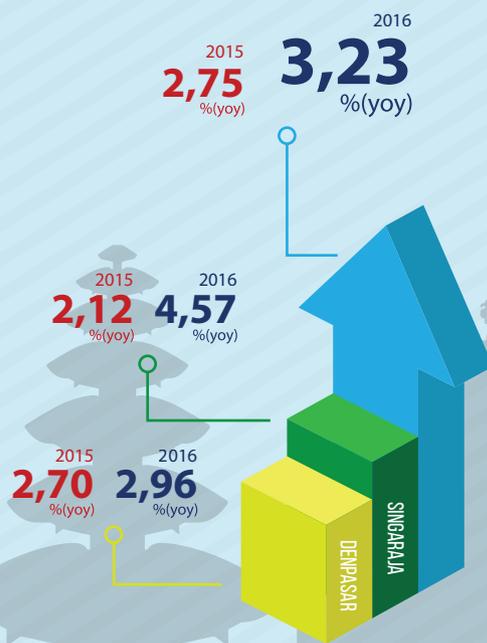
BOKS A SURVEI HARGA PROPERTI TRIWULAN IV-2016: HARGA RUMAH DI PASAR PRIMER MENUNJUKKAN PENINGKATAN, NAMUN HARGA RUMAH DI PASAR SEKUNDER MENUNJUKKAN PENURUNAN	46
BOKS B <i>GROWTH DIAGNOSTIC</i> PROVINSI BALI	84
BOKS C MEMBANGUN OPTIMISME PEREKONOMIAN BALI	110

INFOGRAFIS PEREKONOMIAN PROVINSI BALI

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN



PERKEMBANGAN INFLASI



KEUANGAN PEMERINTAH

Pendapatan



PER

TAHUN 2016 DAN PROSPEK TAHUN 2017

Tw III 2016 8,94 %(yoy)	Tw IV 2016 5,60 %(yoy)	Tw III 2016 11,57 %(yoy)	Tw IV 2016 7,78 %(yoy)	Tw III 2016 16,06 %(yoy)	Tw IV 2016 13,41 %(yoy)
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------



KREDIT KORPORASI



KREDIT RUMAH TANGGA



KREDIT UMKM



STABILITAS KEUANGAN DAERAH

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN



1,89%
Agustus 2016

1,99%
Agustus 2015

Pengangguran Terbuka

Kemiskinan
4,15%
September 2016

5,25%
September 2015

Angkatan Kerja



Juta Orang
2,32%
Agustus 2015

Juta Orang
2,46%
Agustus 2016

Belanja

APBN	91,38%	90,25%
APBD Prov.	89,90%	93,20%
APBD Kab/Kota	89,85%	89,74%

Inflasi Prov. Bali

Tw I 2017
4,35 ± 1
%(yoy)

Tahun 2017
4 ± 1
%(yoy)

Tw II 2017
5,21 ± 1
%(yoy)

Tw I 2017
5,84 - 6,24
%(yoy)

Tw II 2017
6,05 - 6,45
%(yoy)

Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2017
6,20 - 6,6
%(yoy)

PERINTAH

PROSPEK PEREKONOMIAN

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi Bali tumbuh melambat pada triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2016, ekonomi Bali tumbuh 5,47% (yoy), lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,61% (yoy), dengan output riil mencapai Rp 35,29 triliun. Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan IV 2016 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,94% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan tersebut disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Sementara, dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan IV 2016 disebabkan oleh perlambatan kinerja beberapa lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi.

Perekonomian Bali triwulan IV 2016 tumbuh melambat menjadi sebesar 5,47% (yoy)

Meskipun demikian, secara keseluruhan tahun 2016 kinerja perekonomian Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Bali mengalami peningkatan dari sebesar 6,03% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 6,24% (yoy) pada tahun 2016. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,02% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan didorong oleh peningkatan kinerja ekspor luar negeri dan PMTB. Sementara dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha utama Provinsi Bali, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan dan minum.

Perekonomian Bali tahun 2016 tumbuh meningkat menjadi sebesar 6,24% (yoy)

Perkembangan berbagai indikator dan hasil *liaison* mengindikasikan potensi peningkatan perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2017. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,84% - 6,24% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan kinerja perekonomian bersumber dari perbaikan kinerja konsumsi baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah serta perbaikan kinerja ekspor. Peningkatan tersebut seiring dengan berlangsungnya hari raya Imlek dan Nyepi pada triwulan berjalan. Memasuki triwulan I 2017, sebagian besar lapangan usaha menunjukkan peningkatan, berdasar hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha. Lapangan usaha tersebut antara lain angkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa.

Perekonomian Bali triwulan I 2017 diperkirakan mengalami peningkatan pada kisaran 5,84% - 6,24% (yoy)

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah di tahun 2016 tumbuh sebesar 6,95% (yoy) atau meningkat dari Rp 27,65 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp 29,57 triliun di 2016. Secara nominal, porsi terbesar realisasi belanja dikontribusikan oleh APBD tingkat Kab/Kota, kemudian belanja APBN dan APBD Provinsi. Realisasi belanja APBD Kab/Kota di tahun 2016 tercatat sebesar Rp 16,19 triliun atau sebesar 54,75% dari total realisasi belanja Pemerintah di Provinsi Bali, meningkat sebesar

Persentase realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Bali pada tahun 2016 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015.

14,94% (yoy) dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, realisasi belanja APBN di Provinsi Bali di sepanjang tahun 2016 mencapai Rp 7,96 triliun atau sebesar 26,91% dari total realisasi belanja pemerintah di Provinsi Bali. Komponen belanja ini mengalami penurunan sebesar 7,06% (yoy) dibandingkan 2015. Sedangkan realisasi belanja APBD Provinsi Bali di tahun 2016, tercatat sebesar Rp 5,42 triliun atau sebesar 18,33% dari total realisasi belanja pemerintah, meningkat 8,44% (yoy) dibandingkan tahun 2015. Sejalan dengan penurunan kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah di tahun 2016, yang kontraksi sebesar 4,47% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,56% (yoy), persentase realisasi belanja pemerintah terhadap pagu anggaran di tahun 2016 juga menunjukkan penurunan dibandingkan 2015. Persentase realisasi anggaran belanja pemerintah di tahun 2016 tercatat sebesar 89,74%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 89,85%.

Inflasi Bali pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (3,18%) dan lebih tinggi dari inflasi nasional 3,02% (yoy).

Inflasi Bali pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (3,18%) dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional di periode yang sama sebesar 3,02% (yoy). Meskipun demikian, angka tersebut masih dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia. Inflasi Bali triwulan IV 2016 juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 2,75% (yoy). Tekanan inflasi tertinggi dialami kota Singaraja dengan laju inflasi sebesar 4,57% (yoy). Sedangkan kota Denpasar mengalami inflasi yang lebih landai sebesar 2,94% (yoy). Secara garis besar, peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2016 terutama didorong oleh kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu, inflasi kelompok inti menunjukkan pergerakan pada level moderat. Meski tercatat meningkat, pencapaian inflasi Bali pada Tahun 2016 masih lebih rendah dari rata-rata tahunan selama 3 tahun terakhir dan berada dalam kisaran sasaran inflasi berdasarkan PMK No.93/PMK.011/2014 sebesar 4%±1%. Terjaganya inflasi di Provinsi Bali didukung oleh semakin solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun demikian, untuk tahun 2017, TPID perlu memperhatikan beberapa potensi risiko seiring penyesuaian harga pada kelompok *administered prices* dan peningkatan harga komoditas cabai rawit merah. Pada Januari 2017, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 1,46% (mtm) atau sebesar 4,13% (yoy). Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional yang sebesar 0,97% (mtm) atau 3,49% (yoy). Sementara itu, di triwulan laporan, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan dari 105,15 di triwulan IV 2015 menjadi 106,98 pada triwulan IV 2016. Kondisi tersebut mencerminkan kesejahteraan petani yang sedikit mengalami peningkatan, dengan kondisi inflasi perdesaan yang relatif rendah.

Pada triwulan IV 2016, kinerja konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan turut menjadi faktor penyebab perlambatan perekonomian Provinsi Bali. Dengan pangsa yang sedikit meningkat (naik dari 47,5% menjadi 47,7%), konsumsi rumah

tangga tercatat mengalami perlambatan dari sebesar 6,11% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 4,70%(yoy) di triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut, seiring dengan tendensi kenaikan harga didorong oleh faktor musiman dan penyesuaian tarif listrik pada bulan Oktober 2016 pada ke-12 golongan tarif, sehingga membatasi kemampuan belanja masyarakat. Sementara perkembangan kredit di sektor korporasi di Bali pada triwulan IV 2016 mencapai Rp28,1 triliun, tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,94% (yoy), terutama disebabkan oleh kontraksi modal kerja. Di sisi lain, perkembangan kredit investasi korporasi mengalami peningkatan pertumbuhan dari sebesar 8,46% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 9,54% (yoy) di triwulan laporan. Selanjutnya, perkembangan kredit UMKM perlambatan tercermin dari laju pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan IV yang sebesar 12,36% (yoy) dari 12,91% (yoy) pada triwulan III 2016

Aktivitas transaksi sistem pembayaran tunai Provinsi Bali pada triwulan IV 2016 berada pada posisi *net outflow* sesuai dengan pola musimannya. Sejalan dengan kondisi tersebut, transaksi pembayaran nontunai (dengan mekanisme kliring) tercatat mengalami perlambatan baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Perlambatan tersebut seiring dengan perlambatan kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2016.

Perkembangan transaksi jual – beli valas di Provinsi Bali cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data transaksi Penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali, total transaksi jual – beli valas tahun 2016 mencapai Rp 31,08 triliun, meningkat 5,78% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2016, total pembelian dan penjualan valas masing-masing sebesar Rp 15,42 triliun dan Rp 15,66 triliun.

Secara umum perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Agustus 2016 menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Agustus 2016 tercatat sebesar 2.463.039 orang atau meningkat 3,4% dibandingkan Februari 2016 dan meningkat sebesar 3,8% (yoy) dibandingkan bulan Agustus 2015. TPAK di Agustus 2016 tercatat sebesar 77,24%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode Februari 2016 (75,28%) dan Agustus 2015 (75,51%). Peningkatan angkatan kerja dan TPAK pada Agustus 2016, juga diiringi oleh peningkatan kesempatan bekerja. Meskipun kondisi tenaga kerja di bulan Agustus 2016 menunjukkan perbaikan, namun perkembangan ketenagakerjaan di triwulan IV 2016 menunjukkan tendensi penurunan. Kondisi ini tercermin, dari hasil SKDU untuk penggunaan tenaga kerja di triwulan IV 2016 tercatat sebesar -17,02%, semakin menurun dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar -0,33%. Sejalan dengan hasil SKDU, SK di triwulan IV 2016 juga menunjukkan tendensi penurunan terkait dengan kondisi ketenagakerjaan. Hal ini tercermin dari tingkat kepercayaan konsumen pada indikator

Konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dari sebesar 6,11% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 4,70% (yoy) di triwulan laporan. Sementara itu kredit korporasi tumbuh melambat sebesar 5,61% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 8,94% (yoy).

Sistem pembayaran nontunai tercatat mengalami net outflow pada triwulan IV 2016.

Perkembangan transaksi jual-beli valas di Provinsi Bali mengalami peningkatan pada tahun 2016.

Jumlah angkatan kerja Bali di Agustus 2016, tercatat sebesar 2.463.039 atau meningkat 3,4% dibandingkan Februari 2016 dan meningkat sebesar 3,8% (yoy) dibandingkan bulan Agustus 2015

ketersediaan lapangan pekerjaan, dengan nilai indeks rata-rata pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 92,5, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 99,33.

Jumlah penduduk miskin di Bali, tercatat sebesar 174,94 ribu orang atau 4,15% pada September 2016, menurun dibandingkan Maret 2016 yang tercatat sebesar 178,18 ribu orang atau 4,25%.

Jumlah penduduk miskin¹ di Wilayah Bali menurun pada September 2016 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di periode Maret 2016, maupun pada periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 174,94 ribu orang atau 4,15% dari jumlah penduduk Bali di September 2016. Sementara itu, pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 178,18 ribu orang atau 4,25% dari jumlah penduduk Bali di periode tersebut. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah penduduk miskin turun cukup besar yaitu sebesar 218,79 ribu orang atau sekitar 5,25% dari jumlah penduduk Bali di September 2015. Menurunnya jumlah penduduk miskin, didorong oleh penurunan penduduk miskin pada wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin pada wilayah perkotaan pada September 2016 tercatat sebesar 93,74 ribu orang, menurun dari Maret 2016 yang tercatat sebesar 96,98 ribu orang. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali di triwulan IV 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan III 2016. Peningkatan NTP menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan daya beli petani khususnya di daerah pedesaan.

Perekonomian Bali triwulan II 2017 diperkirakan tumbuh kisaran 6,25%-6,65% (yoy)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan II 2017 diperkirakan mengalami peningkatan yaitu tumbuh pada kisaran 6,25%-6,65% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan terutama didorong oleh sebagian besar komponen terutama konsumsi, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh perbaikan kinerja sebagian besar lapangan usaha utama antara lain lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Dengan perkembangan terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan prakiraan perekonomian Bali tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 6,20%-6,60% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan didorong oleh hampir semua komponen.

Perekonomian Bali tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,2%-6,6% (yoy)

Inflasi Bali triwulan II 2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,21%±1% (yoy), sehingga inflasi Bali tahun 2017 diperkirakan akan berada dalam kisaran 4%±1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Bali tahun 2016 yang sebesar 3,23% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, tendensi peningkatan inflasi pada tahun 2017 terutama bersumber dari *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu tekanan kelompok *core inflation* relatif stabil.

Inflasi Bali 2017 diperkirakan berada dalam kisaran 4%±1% (yoy).

¹ Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk

Tabel Indikator

PDRB DAN INFLASI

Indikator	2015				2015	2016				2016
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
EKONOMI MAKRO REGIONAL										
Produk Domestik Regional Bruto (%)	5.94	5.86	6.21	6.10	6.03	6.38	6.54	6.61	5.47	6.24
Berdasarkan Kategori :										
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.73	8.6	6.9	6.34	7.13	4.68	2.15	3.30	2.99	3.26
- Pertambangan dan Penggalian	8.58	(2.5)	(0.6)	1.48	1.59	10.58	15.68	9.90	(1.63)	8.31
- Industri Pengolahan	0.93	1.1	0.8	5.12	1.99	9.64	6.82	6.14	3.05	6.34
- Pengadaan Listrik, Gas	2.67	3.6	6.1	7.59	5.01	7.62	8.07	6.98	6.43	7.26
- Pengadaan Air	7.92	6.8	9.1	7.86	7.94	8.57	6.49	5.22	6.31	6.61
- Konstruksi	4.02	3.8	5.1	5.15	4.54	6.89	8.18	10.22	5.55	7.72
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.42	6.2	5.7	5.19	6.11	6.15	6.78	7.48	6.31	6.69
- Transportasi dan Pergudangan	9.79	9.0	10.8	10.12	9.94	8.23	8.91	8.06	9.15	8.59
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.49	4.0	10.4	5.78	6.66	8.45	7.67	7.05	9.08	8.06
- Informasi dan Komunikasi	5.86	4.9	4.9	5.09	5.20	5.79	5.53	4.52	2.77	4.63
- Jasa Keuangan	5.23	6.9	7.2	8.54	6.99	10.14	6.39	6.27	4.87	6.85
- Real Estate	7.28	7.9	9.4	8.31	8.27	5.48	15.19	2.32	0.05	5.44
- Jasa Perusahaan	8.75	8.8	8.2	9.91	8.94	9.50	9.37	8.72	8.15	8.91
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.06	7.9	9.8	9.26	8.76	9.96	9.50	8.57	8.06	9.00
- Jasa Pendidikan	8.96	7.4	7.6	8.01	7.99	7.70	8.34	9.09	8.92	8.52
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.73	8.6	6.9	6.34	7.13	4.68	2.15	3.30	2.99	3.26
- Jasa lainnya	8.58	(2.5)	(0.6)	1.48	1.59	10.58	15.68	9.90	(1.63)	8.31
Berdasarkan Pengeluaran :										
- 1. Pengeluaran Konsumsi	7.58	8.49	4.46	0.19	4.99	5.63	6.43	6.51	7.10	6.44
- 1a. Konsumsi Rumah Tangga	7.88	8.22	6.11	4.70	6.69	6.03	7.11	6.80	6.89	6.71
- 1b. Konsumsi LNPRT	6.72	12.17	11.76	4.07	8.58	4.12	4.02	4.21	4.33	4.17
- 1c. Konsumsi Pemerintah	4.91	9.49	(4.46)	(18.27)	(4.47)	2.13	3.19	5.21	8.54	5.15
- 2. Investasi	9.66	9.51	9.14	7.22	8.86	7.18	8.67	9.43	10.15	8.88
- 2a. PMTB	9.52	9.49	9.00	7.21	8.78	7.17	8.67	9.43	10.17	8.89
- 2b. Perubahan Inventori	45.99	16.15	44.21	10.03	27.45	10.07	9.01	8.78	7.12	8.71
- 3. Neraca Perdagangan Bersih	(18.14)	(56.05)	23.92	(1,241.19)	5.18	3.75	(56.87)	(19.29)	(49.99)	(20.21)
- 3a. Ekspor Luar Negeri	13.16	12.75	16.39	16.78	14.80	13.20	14.96	16.03	16.57	15.25
- 3b. Impor Luar Negeri	23.02	12.82	21.57	31.82	22.49	25.01	27.67	31.20	31.33	28.95
- 3c. Net Ekspor Antardaerah	20.86	22.16	13.93	2.10	13.94	11.32	15.28	16.77	18.01	15.54
Ekspor										
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	137.56	122.35	107.74	128.2	495.8	121.6 ₁	128.39	106.53	125.96	482.49
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	27.80	29.05	25.81	93.17	175.8	87.68	30.00	21.23	25.95	164.87
Impor										
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	32.1	30.7	21.6	25.5	109.73	46.1	25.3	22.54	39.16	133.4
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	30.87	2.00	3.10	7.99	43.97	17.94	1.65	1.70	2.16	23.44
Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)										
	6.42	6.97	6.56	2.75	2.75	3.59	2.96	3.18	3.23	3.23

KREDIT RUMAH TANGGA (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

Miliar Rp

INDIKATOR	2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
DANA												
Total	45,396	46,308	48,278	49,859	48,684	49,544	50,655	52,619	49,957	51,841	51,975	53,982
Giro	3,153	3,169	3,373	3,363	2,977	3,145	3,177	3,314	3,047	3,077	3,077	3,037
Tabungan	27,550	27,506	28,778	29,404	28,416	28,377	29,358	30,741	29,305	30,922	31,065	32,747
Deposito	14,692	15,633	16,127	17,093	17,291	18,022	18,119	18,564	17,604	17,842	17,832	18,197

Miliar Rp

INDIKATOR	2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit RT. Total	22,147	22,852	23,820	24,772	25,292	25,974	26,820	27,479	27,871	28,441	28,969	29,619
KPR	10,694	11,263	11,380	11,743	11,875	12,012	12,227	12,435	12,448	12,408	11,739	11,699
RT. KPR sd 21	3,115	3,235	3,253	3,259	3,200	3,180	3,174	3,127	3,088	3,007	2,621	2,443
RT. KPR sd 70	3,274	3,423	3,513	3,598	3,636	3,711	3,799	3,946	3,992	3,963	3,794	3,898
RT. KPR 70+	3,652	3,856	3,980	4,216	4,372	4,428	4,570	4,665	4,669	4,717	4,574	4,628
RT. KPA sd 21	55	51	49	48	48	46	43	44	48	44	41	39
RT. KPA sd 70	133	130	123	124	121	117	114	119	119	117	108	107
RT. KPA 70+	86	92	72	69	67	71	66	62	54	51	48	46
RT. Ruko	378	476	389	428	432	459	461	473	478	510	552	540
KKB	1,870	2,013	2,139	2,259	2,376	2,451	2,556	2,289	2,266	2,253	2,299	2,270
RT. KKB Roda 4	1,682	1,799	1,916	2,040	2,158	2,236	2,354	2,096	2,084	2,080	2,114	2,107
RT. KKB Roda 2	102	118	127	140	136	138	135	112	105	120	114	102
RT. KKB Roda 6	40	47	52	46	52	51	44	56	52	27	46	37
RT. KKB Lainnya	46	49	44	33	31	26	23	24	25	25	25	24
RT. Multiguna	7,404	7,745	8,281	8,923	9,187	9,599	10,020	10,624	10,991	11,495	12,373	12,866
NPL (Gross %)	0.53	0.52	0.55	0.63	0.63	0.70	0.74	0.76	1.09	1.13	1.18	1.03

KREDIT KORPORASI (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

Miliar Rp

INDIKATOR	2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit Korporasi	18,645	20,354	21,706	23,766	24,075	24,841	25,745	26,638	27,463	27,525	28,047	28,132
Modal Kerja	7,379	8,563	9,208	10,006	9,968	10,140	10,422	10,583	11,087	11,575	11,435	10,546
Investasi	11,193	11,703	12,412	13,665	14,020	14,607	15,241	15,975	16,289	15,867	16,529	17,498
NPL (Gross,%)	2.46	2.24	2.47	2.55	1.64	3.37	3.46	3.97	4.85	5.29	5.85	4.93

PERBANKAN – BANK UMUM (LOKASI BANK)

Indikator	2014				2015				2016				
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
PERBANKAN													
Total Asset (Rp Triliun)	75.05	79.50	83.83	85.78	85.39	88.52	92.28	92.84	91.46	94.37	98.10	100.31	
DPK (Rp Triliun)	63.90	66.50	70.54	70.51	72.01	73.58	76.54	75.5	75.56	77.61	79.39	79.53	
- Giro (Rp Triliun)	12.23	13.83	14.11	11.96	12.86	13.70	15.00	13.06	13.89	13.99	14.92	13.13	
- Tabungan (Rp Triliun)	31.17	30.96	32.90	33.90	32.46	32.35	34.09	35.8	33.85	35.56	36.3	38.29	
- Deposito (Rp Triliun)	20.49	21.71	23.53	24.72	26.69	27.51	27.44	26.54	27.81	28.04	28.16	28.07	
Kredit (Rp Triliun) - lokasi bank	50.33	52.83	55.09	57.20	57.96	59.77	60.97	62.8	63.07	65.50	67.03	68.91	
- Modal Kerja	19.99	21.29	22.26	22.75	22.94	23.76	24.01	24.50	24.41	25.85	26.28	28.61	
- Investasi	11.35	11.90	12.55	13.40	13.62	13.87	14.14	14.58	14.44	15.04	15.53	16.18	
- Konsumsi	18.99	19.64	20.28	21.05	21.40	22.13	22.81	23.76	24.21	24.70	25.21	25.87	
Loan to Deposit Ratio (%)	78.77	79.44	78.10	81.14	80.49	81.24	79.66	83.24	83.47	84.53	84.44	86.66	
NPL gross (%)	0.70	1.66	0.95	0.91	1.34	1.91	1.89	2.06	2.38	2.35	2.67	2.09	

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA - BANK UMUM

Miliar Rp

Kabupaten /Kota	Indikator	2014				2015				2016			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Jembrana	Kredit	1,316	1,393	1,447	1,523	1,568	1,663	1,729	1,843	1,904	2,042	2,093	2,176
	DPK	882	967	1,045	1,043	1,073	1,058	1,118	1,187	1,173	1,191	1,256	1,199
Tabanan	Kredit	2,621	2,746	2,815	2,876	2,938	3,028	3,118	3,267	3,456	3,633	3,713	3,807
	DPK	1,801	1,870	1,906	1,869	1,992	2,008	2,146	2,123	2,215	2,224	2,294	2,243
Badung	Kredit	4,713	4,908	5,109	6,868	7,160	7,363	7,530	7,780	7,681	8,041	8,442	8,758
	DPK	7,826	8,286	8,509	11,307	11,724	11,831	12,610	12,059	12,103	12,728	13,220	13,095
Gianyar	Kredit	2,219	2,370	2,472	2,580	2,634	2,754	2,861	2,998	3,147	3,339	3,436	3,513
	DPK	2,217	2,225	2,391	2,336	2,402	2,487	2,723	2,639	2,678	2,772	2,971	2,786
Klungkung	Kredit	1,113	1,159	1,214	1,258	1,280	1,317	1,367	1,397	1,446	1,520	1,568	1,588
	DPK	843	935	975	959	1,037	1,098	1,159	1,076	1,113	1,220	1,232	1,116
Bangli	Kredit	1,106	1,164	1,201	1,237	1,290	1,346	1,393	1,443	1,488	1,551	1,574	1,613
	DPK	699	742	837	829	827	853	915	867	859	926	1,024	854
Karangasem	Kredit	1,639	1,746	1,843	1,903	1,990	2,101	2,206	2,310	2,430	2,575	2,678	2,745
	DPK	1,208	1,303	1,458	1,467	1,498	1,486	1,569	1,560	1,657	1,664	1,651	1,604
Buleleng	Kredit	3,058	3,281	3,385	3,467	3,544	3,752	3,934	4,110	4,241	4,593	4,792	4,958
	DPK	2,824	2,908	3,098	3,036	3,037	3,039	3,266	3,384	3,423	3,647	3,541	3,488
Denpasar	Kredit	32,542	34,058	35,602	35,497	35,563	36,452	36,833	37,707	37,281	38,309	38,743	39,730
	DPK	45,596	47,263	50,318	47,664	48,425	49,721	51,039	50,611	50,346	51,412	52,206	53,141

KREDIT UMKM (LOKASI BANK)

Miliar Rp

Kredit UMKM	2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit UMKM	20,210	21,611	22,224	22,951	23,879	24,826	25,307	25,991	25,710	26,796	28,397	29,478
<i>g Kredit UMKM (%.yoy)</i>	<i>25.41</i>	<i>21.53</i>	<i>18.99</i>	<i>16.27</i>	<i>18.15</i>	<i>14.88</i>	<i>13.87</i>	<i>13.25</i>	<i>12.91</i>	<i>11.53</i>	<i>14.31</i>	<i>16.16</i>
Mikro	3,033	3,348	3,363	3,458	3,588	3,731	3,911	4,320	4,428	5,008	5,338	5,528
Kecil	7,430	7,744	8,177	8,593	8,787	9,251	9,514	9,800	9,670	10,088	10,817	11,554
Menengah	9,748	10,519	10,684	10,900	11,504	11,845	11,882	11,871	11,612	11,699	12,243	12,396
NPL (%)	0.82	1.15	1.14	0.81	1.17	1.16	1.27	1.29	1.49	1.80	1.84	1.86

SISTEM PEMBAYARAN

Indikator	2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
SISTEM PEMBAYARAN												
Transaksi Tunai												
<i>Inflow</i> (Rp Triliun)	3.33	2.60	3.26	2.39	4.08	2.81	3.66	2.50	5.07	3.39	5.28	4.15
<i>Outflow</i> (Rp Triliun)	2.38	2.66	4.42	3.63	2.08	3.46	4.89	4.01	2.93	5.10	5.12	4.9
Kliring :												
Nom. Kliring (Rp triliun)	12.85	12.83	13.75	14.50	13.54	10.09	14.00	18.37	19.86	21.42	18.00	18.22
Vol. Kliring (ribu lembar)	543	540	553	574	551	408	562	614	633	678	637	671
Nom. Tolakan Cek/BG Kosong (Rp miliar)	321	314	522	640	356	354	343	1.323	430	422	268	269
Vol Tolakan Cek/BG Kosong (ribu lembar)	8.06	9.09	8.56	7.60	8.05	7.95	8.4	7.8	8.3	7.9	7.3	7.4

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB I

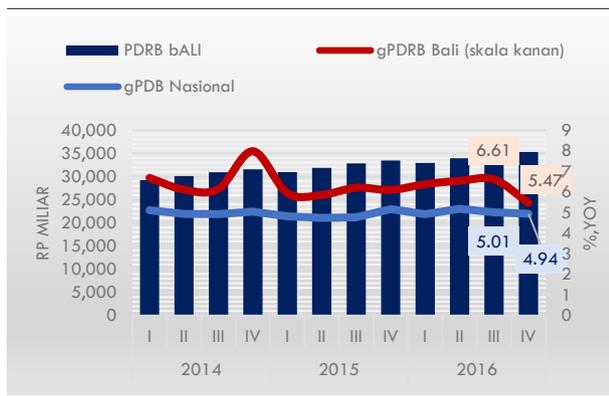
Foto oleh: Umran Usman

Bali Pulina

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH



1.1. KONDISI UMUM



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Triwulanan

Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan IV 2016 mengalami perlambatan pertumbuhan dari sebesar 6,61% (yoy) pada triwulan III menjadi sebesar 5,47% (yoy) pada triwulan IV 2016 dengan output riil mencapai Rp 35,29 triliun. Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan IV 2016 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,94% (yoy).

Dari sisi permintaan, perlambatan tersebut disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi pemerintah, konsumsi LNPRT, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Sementara, dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan perekonomian Bali pada triwulan IV 2016 disebabkan oleh perlambatan kinerja beberapa lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi.

Meskipun demikian, secara keseluruhan tahun 2016 kinerja perekonomian Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Bali mengalami peningkatan dari sebesar 6,03% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 6,24% (yoy) pada tahun 2016. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,02% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali

pertumbuhan didorong oleh peningkatan kinerja ekspor luar negeri dan PMTB. Sementara dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha utama Provinsi Bali, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi makan dan minum.

1.2. SISI PERMINTAAN

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2016 dari sisi permintaan disebabkan oleh perlambatan kinerja konsumsi dan investasi, serta peningkatan impor luar negeri Bali. Perlambatan konsumsi terjadi di semua komponen terutama disebabkan oleh pemotongan anggaran APBN dan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Provinsi Bali dan tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem dan Kota Denpasar. Pemotongan anggaran dan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut juga berdampak pada perlambatan kinerja investasi seiring dengan tertahannya pembangunan sejumlah program dikarenakan keterbatasan anggaran. Dari sisi konsumsi rumah tangga, perlambatan disebabkan oleh tendensi kenaikan harga antara lain kenaikan tariff listrik untuk 12 golongan pada Oktober 2016 sehingga membatasi kemampuan belanja masyarakat.

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (% , yoy)

Komponen	2015				2015	2016				2016
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi	7.81	6.44	6.13	8.56	7.24	7.58	8.49	4.46	0.19	4.99
Kons.RT	8.42	7.33	6.60	7.55	7.46	7.88	8.22	6.11	4.70	6.69
Kons.LNPRT	(1.90)	(1.31)	1.30	14.80	3.17	6.72	12.17	11.76	4.07	8.58
Kons. Pemerintah	4.43	2.86	4.42	12.20	6.56	4.91	9.49	(4.46)	(18.27)	(4.47)
Investasi	5.32	4.91	4.17	5.62	5.00	9.66	9.51	9.14	7.22	8.86
PMTB	7.43	7.61	6.09	5.76	6.69	9.52	9.49	9.00	7.21	8.78
Perubahan Inv	(83.08)	(85.16)	(80.77)	(17.02)	(77.76)	45.99	16.15	44.21	10.03	27.45
Ekspor LN	12.97	17.54	(3.58)	0.50	6.02	13.16	12.75	16.39	16.78	14.80
Impor LN	(19.84)	13.26	(14.29)	(15.94)	(10.89)	23.02	12.82	21.57	31.82	22.49
Net Ekspor antar daerah	42.82	20.95	(3.81)	11.40	14.06	20.86	22.16	13.93	2.10	13.94
PDRB	5.94	5.86	6.21	6.10	6.03	6.38	6.54	6.61	5.47	6.24

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Perkembangan berbagai indikator dan hasil *liaison* mengindikasikan potensi peningkatan perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2017. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,84% - 6,24% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan kinerja perekonomian bersumber dari perbaikan kinerja konsumsi baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah serta perbaikan kinerja ekspor. Peningkatan tersebut seiring dengan berlangsungnya hari raya Imlek dan Nyepi pada triwulan berjalan.

1.2.1. Konsumsi

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dengan *share* sebesar 47,67%, mengalami perlambatan pertumbuhan dari 6,11% (yoy) dari triwulan III 2016 menjadi sebesar 4,70% (yoy) pada triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut disebabkan oleh hampir semua subkomponen konsumsi, antara lain konsumsi makanan, konsumsi pakaian dan alas kaki, konsumsi pendidikan dan kesehatan, dan konsumsi transportasi. Perlambatan tersebut disebabkan oleh relatif berkurangnya

frekuensi hari raya keagamaan pada triwulan IV 2016 setelah pada triwulan sebelumnya hari raya Idul Fitri; Galungan; Kuningan; dan Idul Adha; adanya pencairan gaji ke 13 dan 14 PNS; serta penyesuaian tarif listrik untuk ke-12 golongan tarif, sehingga membatasi kemampuan belanja masyarakat. Meskipun demikian, berlangsungnya hari raya Natal dan Tahun Baru pada triwulan IV 2016 menahan perlambatan konsumsi rumah tangga lebih dalam yang terlihat dari kinerja konsumsi restoran dan hotel yang mengalami perbaikan pada triwulan IV 2016. Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2016, kinerja konsumsi rumah tangga turut mengalami perlambatan seiring dengan gejolak inflasi 2016 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Tingginya inflasi terutama didorong oleh peningkatan inflasi kelompok *volatile food*, mengingat pengeluaran bahan makanan masyarakat Provinsi Bali mencapai 42,38%² dari total pengeluaran.

Perlambatan konsumsi rumah tangga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yaitu Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menunjukkan penurunan rata-rata indeks dari sebesar 100,06 pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 98,03 pada triwulan

² Berdasarkan hasil SUSENAS Maret 2016, BPS

IV 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut, rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) turut menunjukkan penurunan dari sebesar 93,89 pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 89,61 pada triwulan IV 2016. Perlambatan juga terkonfirmasi dari Indeks Tendensi Konsumen BPS yang mengalami perlambatan dari sebesar 109,98 pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 100,57 pada triwulan IV 2016.



Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.3 Indeks Keyakinan Konsumen



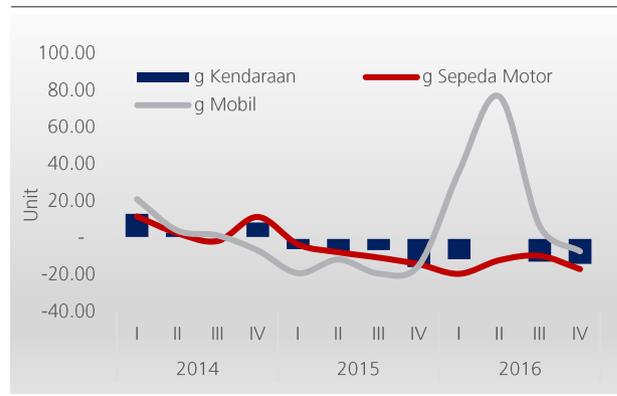
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Grafik 1.4 Indeks Tendensi Konsumen



Sumber : DISPENDA Prov. Bali

Grafik 1.5 Pendaftaran Kendaraan



Sumber : DISPENDA Prov. Bali

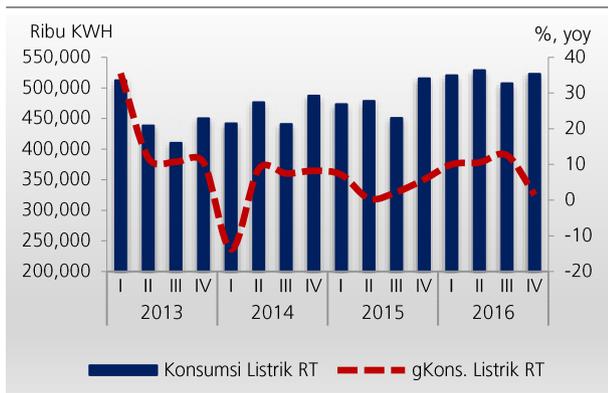
Grafik 1.6 Pertumbuhan Pendaftaran Mobil dan Sepeda Motor

Perlambatan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2016 juga terkonfirmasi dari semakin dalamnya kontraksi pertumbuhan pendaftaran kendaraan baru dari sebesar -12,38% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -14,11% (yoy) pada triwulan IV 2016. Kondisi tersebut terlihat dari pendaftaran kendaraan baru yang mengalami penurunan dari sebesar 54 ribu unit pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 48 ribu unit pada triwulan IV 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan penjualan kendaraan mobil dari sebesar 6,40% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -7,28% (yoy) pada triwulan IV 2016 serta kontraksi pertumbuhan kendaraan roda dua (motor) yang semakin dalam sebesar -16,94% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga juga terlihat dari kontraksi pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang semakin dalam. Pertumbuhan KPR triwulan IV 2016 tercatat terkontraksi sebesar -5,87% (yoy), lebih dalam dari triwulan III 2016 yang tercatat sebesar -4,00% (yoy). Kontraksi tersebut sejalan dengan perlambatan variabel pendapatan rumah tangga yang terdapat pada indeks tendensi konsumen dari sebesar 115,04 pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 103,46 pada triwulan IV 2016 sehingga masyarakat cenderung menahan keputusan untuk membeli rumah. Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga juga terlihat dari perlambatan pertumbuhan konsumsi listrik dari sebesar 12,55% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 1,45% (yoy).



Grafik 1.7 Kredit Kepemilikan Rumah



Sumber : PLN distribusi Bali

Grafik 1.8 Konsumsi Listrik RT

Perkembangan terakhir kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2017 menunjukkan tendensi peningkatan seiring dengan adanya hari raya Imlek dan Nyepi yang mendorong peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga. Selain itu, prakiraan peningkatan juga didorong oleh kenaikan UMP Provinsi Bali di tahun 2017 dan penurunan Tarif Tenaga Listrik untuk 12 Golongan Non Subsidi dengan rata-rata penurunan sebesar Rp 6/kW mulai Januari 2017. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan nilai rata-rata indeks keyakinan konsumen dari sebesar 98,03 di triwulan IV 2016 menjadi sebesar 106,8 pada Januari 2017. Peningkatan konsumsi rumah tangga juga terkonfirmasi dari Indeks ekspektasi konsumen yang juga menunjukkan peningkatan pada periode Januari 2017 menjadi sebesar 112,5, lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pada periode triwulan IV 2016 yang

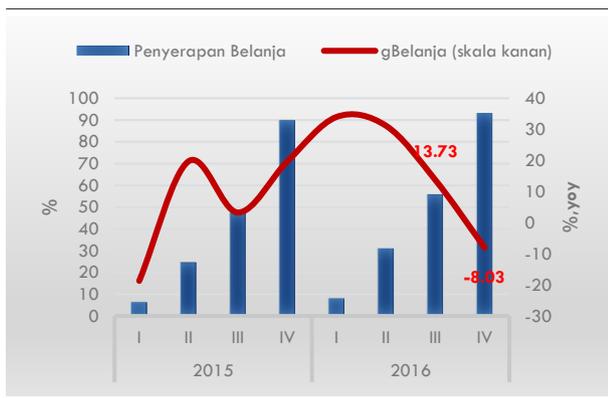
sebesar 106,44. Perkiraan peningkatan tersebut juga terkonfirmasi dari perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) BPS Provinsi Bali yang memprakirakan ITK periode triwulan I 2017 akan mencapai 110,19 dengan didorong oleh peningkatan indeks prediksi pendapatan sebesar 107,9. Peningkatan tersebut juga terjadi seiring dengan peningkatan optimisme konsumen seiring dengan penurunan suku bunga kredit konsumsi dan implementasi ketentuan relaksasi LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR). Perkiraan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2017 tersebut juga terkonfirmasi dari hasil survei dan *liaison* yang menunjukkan peningkatan *likert scale* penjualan domestik dari 2,3 pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 2,33 pada triwulan I 2017.

Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi pemerintah turut mengalami perlambatan pada triwulan IV 2016. Konsumsi LNPRT mengalami perlambatan dari sebesar 11,76% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 4,07% (yoy) pada triwulan IV 2016 seiring dengan relatif minimnya kegiatan organisasi masyarakat pada triwulan IV 2016. Sementara itu, secara keseluruhan tahun konsumsi LNPRT mencatat peningkatan pertumbuhan dari sebesar 3,17% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 8,58% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan adanya musyawarah salah satu partai politik di Bali pada pertengahan tahun yang mendorong kinerja konsumsi LNPRT.

Sementara itu, konsumsi Pemerintah yang memiliki pangsa sebesar 10,37% kembali tercatat sebagai satu-satunya komponen yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang semakin dalam dari sebesar -4,46% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -18,27% (yoy) pada triwulan IV 2016. Perlambatan ini sebagai dampak pemotongan APBN 2016 sebesar Rp 133,8 triliun, sehingga berdampak pada pengurangan

belanja Kementerian dan Lembaga yang berada wilayah Provinsi Bali serta Dana Transfer Daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) periode September – Desember 2016 untuk APBD Provinsi Bali dan tiga Kabupaten/ Kota yaitu Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Karangasem yang totalnya mencapai Rp 387,7 miliar. Pemotongan serta penundaan pencairan tersebut berdampak signifikan kepada perekonomian mengingat peran pemerintah sebagai stimulus perekonomian. Perlambatan tersebut terlihat dari kontraksi pertumbuhan belanja APBD Provinsi Bali dari sebesar 13,73% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -8,03% (yoy) pada triwulan IV 2016. Kondisi tersebut juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan konsumsi Pemerintah keseluruhan tahun yang mengalami kontraksi dari sebesar 6,56% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar -4,47% (yoy) pada tahun 2016.



Grafik 1.9 Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali

Perkembangan kinerja konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2017 diperkirakan masih mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan IV 2016. Perkiraan tersebut seiring dengan rencana pencairan DAU untuk Provinsi dan 3 Kabupaten/ Kota di Bali secara penuh sebesar Rp 387,73 miliar di Januari 2017, berpotensi mendorong akselerasi konsumsi pemerintah (fiskal). Selain itu, perkiraan peningkatan juga didorong oleh Upaya Pemerintah

Provinsi Bali akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi berbagai objek pajak baru di sepanjang 2017, seperti pengenaan retribusi untuk penggunaan lahan pemasangan *billboard* reklame serta komitmen Pemerintah Pusat untuk pelelangan proyek lebih awal. Meskipun demikian, komponen konsumsi pemerintah triwulan berjalan masih menghadapi risiko perlambatan disebabkan sebagai dampak pelaksanaan reorganisasi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota) sebagai implementasi undang-undang otonomi daerah No. 23 tahun 2014, sehingga berpotensi menyebabkan mundurnya proses pelelangan dan pengadaan barang yang biasanya kontrak telah dilakukan pada bulan Maret serta tertundanya pembayaran gaji PNS bulan Januari 2017. Disamping itu, berkurangnya pagu anggaran belanja modal tahun 2017, khususnya untuk belanja infrastruktur turut menjadi faktor penahan peningkatan kinerja konsumsi Pemerintah. Penurunan pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali cukup signifikan, yaitu dari Rp 692,06 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 229,7 miliar pada tahun 2017.

1.2.2. Investasi

Kinerja investasi (PMTB) Provinsi Bali triwulan IV 2016 mencatat pertumbuhan sebesar 7,21% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan III 2016 yang sebesar 9,00% (yoy). Perlambatan yang terjadi bersumber dari perlambatan pertumbuhan PMTB bangunan dan non bangunan. PMTB bangunan mengalami perlambatan dari sebesar 7,15% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 5,19% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara PMTB non bangunan mengalami perlambatan dari sebesar 12,29% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 10,81% (yoy) pada triwulan IV 2016. Perlambatan investasi tersebut terkonfirmasi dari *likert* investasi (hasil survei dan *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali) yang mengalami penurunan dari sebesar 1,06 poin pada

triwulan III 2016 menjadi 0,58 poin di triwulan IV 2016. Berdasarkan hasil survei dan *liaison*, perlambatan tersebut juga disebabkan telah selesainya pelaksanaan investasi pada periode sebelumnya dan persediaan saat ini dirasa masih mencukupi. Meskipun demikian, perkembangan kinerja investasi di tahun 2016 menunjukkan peningkatan dari sebesar 6,69% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 8,78% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan optimisme perekonomian ke depan di tahun 2016 didukung dengan penurunan *BI 7 days Reverse Repo Rate* menjadi 4,75% serta relaksasi ketentuan LTV yang diikuti oleh tren penurunan suku bunga perbankan.

Berdasarkan subkomponennya, perlambatan PMTB pada triwulan IV 2016 disebabkan oleh perlambatan di semua sub komponen. PMTB bangunan mengalami perlambatan dari sebesar 7,15% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 5,19% (yoy) pada triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut terlihat dari kontraksi penjualan semen yang semakin dalam dari sebesar -3,73% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -18,76% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara itu, perkembangan investasi bangunan Pemerintah turut mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan realisasi belanja modal APBD Provinsi Bali pada triwulan IV 2016 yang berkontraksi sebesar -3,01% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2015 yang tercatat sebesar 5,33% (yoy). Perlambatan tersebut seiring dengan pemotongan APBN dan penundaan pencairan DAU.

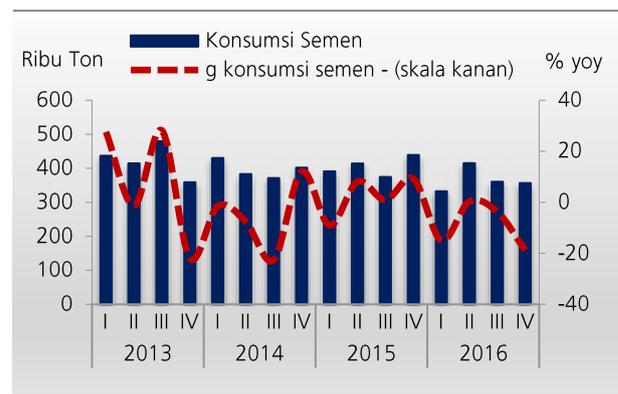
Sejalan dengan perkembangan PMTB bangunan, PMTB non bangunan turut mengalami perlambatan. PMTB non bangunan mengalami perlambatan dari sebesar 12,29% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 10,81% (yoy) pada triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut terlihat dari masih terkontraksinya pertumbuhan volume impor pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar -12,1% (yoy).

Selain itu, berdasarkan hasil survei dan *liaison* masih tercukupinya persediaan membuat masih belum adanya tambahan investasi non bangunan oleh pelaku usaha.



Sumber : Survei dan Liaison Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.10 Likert Investasi



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.11 Penjualan Semen Provinsi Bali

Sementara itu, perkembangan investasi pada triwulan I 2017 diperkirakan mengalami perlambatan seiring dengan pola musimannya yang memasuki periode pembuatan kontrak di awal tahun. Selain itu, pembaharuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berpotensi menunda tahapan pengadaan barang dan proyek infrastruktur sehingga berpotensi pada tertundanya pencairan anggaran termasuk untuk belanja modal. Anggaran pembangunan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun

2016 yaitu dari sebesar Rp 692 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 229 miliar di tahun 2017 yang disebabkan oleh keterbatasan fiskal turut menjadi faktor penahan kinerja komponen investasi pada triwulan I 2017. Dari sisi investasi swasta, perkiraan perlambatan disebabkan oleh masih terdapatnya risiko ketidakpastian, seiring dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden US serta referendum Itali sehingga berdampak pada perilaku wait and see investor.

1.2.3. Neraca Perdagangan

Perkembangan neraca perdagangan Provinsi Bali triwulan IV 2016, mencatat sedikit perlambatan kinerja yang tergambar dari nilai surplus yang mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp 3,7 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan surplus triwulan III 2016 (Rp 4,7 triliun). Penurunan nilai surplus tersebut didorong oleh peningkatan defisit neraca perdagangan antar daerah dari sebesar Rp 11,1 triliun pada triwulan III 2016 menjadi sebesar Rp 12,2 triliun pada triwulan IV 2016. Sementara itu, pada periode yang sama, neraca perdagangan luar negeri mencatatkan peningkatan surplus dari Rp 15,8 triliun di triwulan III 2016 menjadi sebesar Rp 15,9 triliun pada triwulan III 2016.

Secara keseluruhan tahun 2016, neraca perdagangan Provinsi Bali mencatat peningkatan pertumbuhan dari sebesar -5,34% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 5,18% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan surplus dari sebesar Rp 15,2 triliun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 17,08 triliun. Selain itu, perkembangan tersebut sejalan dengan peningkatan surplus neraca perdagangan luar negeri dari sebesar Rp 50,02 triliun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 60,59 triliun pada tahun 2016. Di lain sisi, neraca perdagangan antar daerah mencatatkan posisi defisit sebesar Rp 43,5 triliun.

Net Ekspor antar Daerah

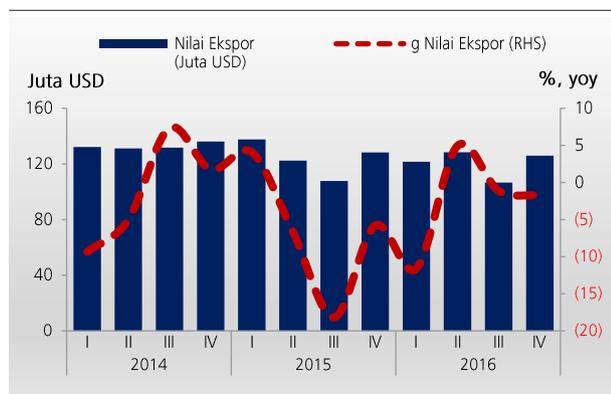
Komponen *Net Ekspor Antar Daerah* menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,1% (yoy) pada triwulan IV 2016, tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 13,93% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan oleh masih terkontraksinya pertumbuhan Ekspor dan Impor antar daerah yang tercatat sebesar -10,25% (yoy) dan -5,45% (yoy) pada triwulan IV 2016. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan menjelang akhir tahun serta ketersediaan pasokan pangan di Provinsi Bali yang terbatas. Untuk keseluruhan tahun 2016, neraca perdagangan antar daerah Provinsi Bali mencatatkan peningkatan defisit sebesar Rp 43,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 34,7 triliun seiring dengan peningkatan kebutuhan komoditas sebagai dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun.

Ekspor Luar Negeri

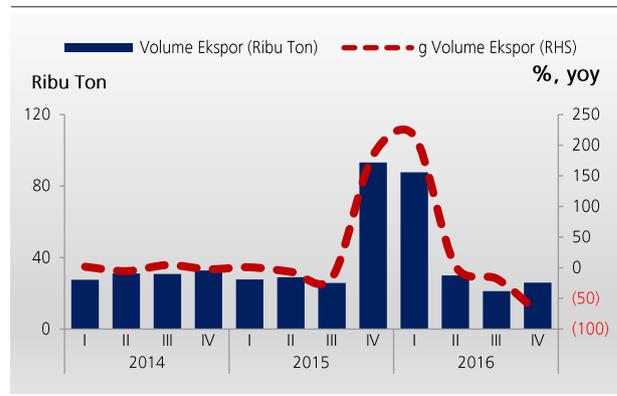
Pada triwulan IV 2016, perkembangan kinerja ekspor luar negeri (barang dan jasa) Provinsi Bali mencatat peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 16,78% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan III 2016 yang sebesar 16,39%(yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja ekspor barang yang tercatat mengalami peningkatan dari sebesar -1,31% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 7,15% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara untuk keseluruhan tahun, kinerja ekspor barang luar negeri mencatatkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 6,02% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 14,80% (yoy) pada tahun 2016. Dari sisi ekspor barang, peningkatan tersebut seiring dengan upaya pelaku ekspor untuk melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta perbaikan permintaan dari *buyer* yang sebelumnya sempat mengalami penurunan. Dari sisi ekspor jasa, peningkatan kinerja ekspor jasa di tahun 2016 seiring dengan peningkatan kunjungan wisman di tahun

2016 didukung dengan perbaikan kondisi ekonomi negara asal wisman, dan tidak adanya bencana alam seperti yang terjadi di tahun 2015.

Ekspor barang Provinsi Bali selama triwulan IV 2016 menunjukkan peningkatan baik secara nilai maupun secara volume. Volume ekspor barang Bali triwulan IV 2016 tercatat sebesar 25,95 ribu ton, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 21,23 ribu ton. Sejalan dengan itu, nilai ekspor barang Provinsi Bali mencapai US\$ 125,96 juta pada triwulan IV 2016, lebih tinggi dari triwulan III 2016 (US\$ 106,53 juta). Peningkatan tersebut sejalan dengan pola musimannya yang mengalami peningkatan di akhir tahun khususnya untuk ekspor produk olahan kayu dan pakaian jadi. Selain itu, pemberlakuan lisensi *Forest Law Enforcement, Governance, and Trade* atau *FLEGT License* pada 15 November 2016 sebagai bentuk kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa sehingga produk kayu dan turunannya asal Indonesia yang masuk ke Uni Eropa akan mendapat perlakuan *green lane* atau tidak perlu lagi melalui proses uji tuntas (*due-diligence*), berpotensi mendorong peningkatan kinerja ekspor olahan kayu.

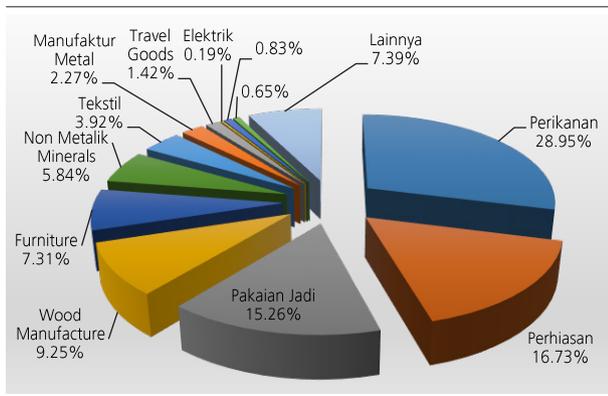


Grafik 1.12 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali

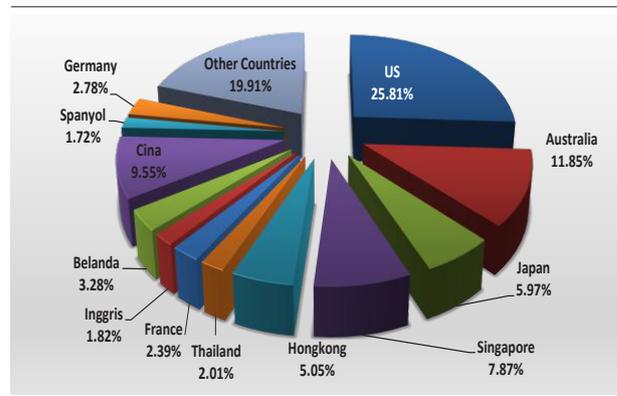


Grafik 1.13 Volume Ekspor Luar Negeri Bali

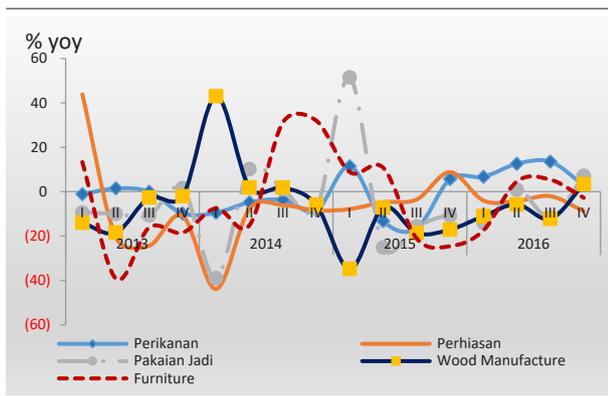
Peningkatan kinerja ekspor barang Provinsi Bali didorong oleh peningkatan beberapa kinerja komoditas ekspor utama Provinsi Bali antara lain pakaian jadi dan produk olahan kayu. Komoditas ekspor pakaian jadi yang memiliki *share* sebesar 15,26% mengalami peningkatan pertumbuhan dari -11,78% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 7,08% (yoy) pada triwulan IV 2016. Komoditas produk olahan kayu yang memiliki *share* sebesar 9,25% mengalami peningkatan dari sebesar -12,28% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 3,36% (yoy) pada triwulan IV 2016. Peningkatan kedua komoditas tersebut seiring dengan pola musiman peningkatan permintaan komoditas tersebut di akhir tahun. Sementara itu, komoditas ekspor utama Provinsi Bali lainnya, yaitu perikanan (28,95%), perhiasan (16,73%), dan *furniture* (7,31%), mengalami perlambatan di triwulan IV 2016. Komoditas perikanan mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan produksi salah satunya disebabkan oleh adanya penghentian operasi 401 kapal milik anggota *Asosiasi Tuna Longline Indonesia* (ATLI).



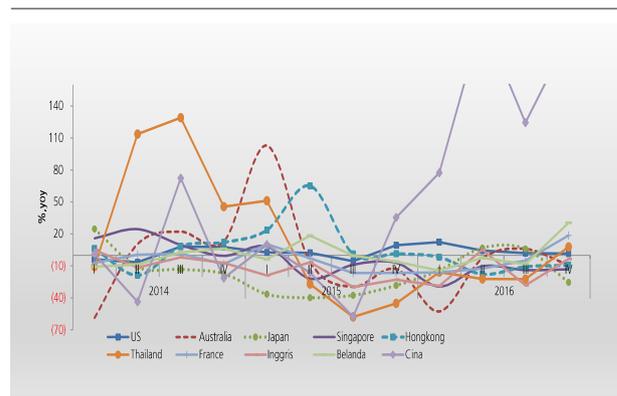
Grafik 1.14 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw IV 2016



Grafik 1. 16 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan



Grafik 1. 15 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

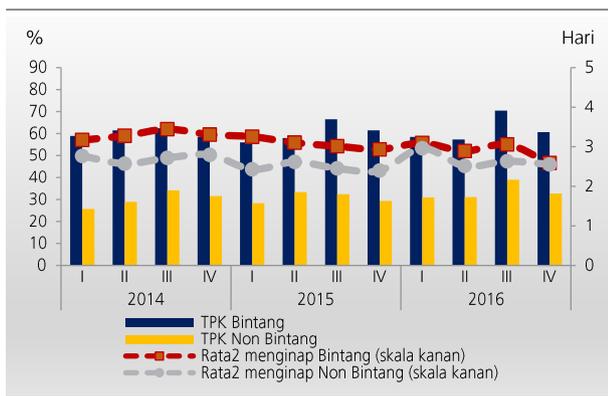


Grafik 1. 17 Pertumbuhan Nilai Ekspor berdasarkan Negara Tujuan

Berdasarkan negara tujuannya, negara tujuan ekspor Provinsi Bali masih didominasi oleh Amerika Serikat, Australia, Singapura, Jepang, dan Hongkong, dengan *share* masing-masing sebesar 25,81%, 11,85%, 7,87%, 5,97%, dan 5,05%. Meskipun kinerja ekspor ke Amerika Serikat, Australia dan Jepang mengalami perlambatan pada triwulan IV 2016, secara umum ekspor ke negara lainnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut seiring dengan upaya diversifikasi pasar ekspor oleh pelaku usaha. Sebagaimana terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekspor barang Bali ke Thailand, Prancis, Belanda, dan Cina. Sementara kinerja ekspor barang ke Singapura, Hongkong, Inggris mengalami peningkatan.

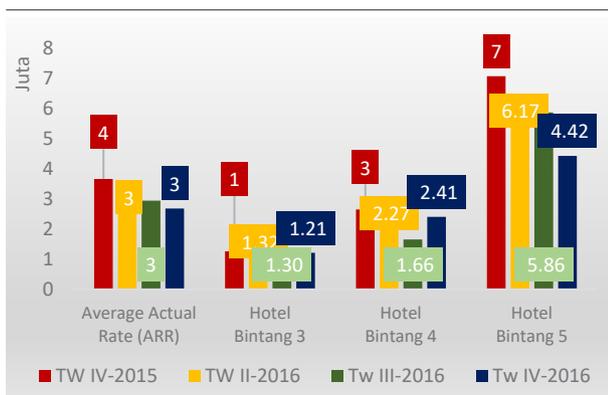
Di sisi lain, kinerja ekspor jasa luar negeri mencatat perlambatan pada triwulan IV 2016. Ekspor jasa luar negeri mencatat angka pertumbuhan sebesar 17,94% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 18,23% (yoy). Berlangsungnya hari raya natal dan tahun baru 2017 belum mampu mencatat pertumbuhan triwulan IV 2016 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang bersamaan dengan *peak season* pariwisata yaitu libur musim panas Eropa dan musim dingin Australia serta hari raya Idul Fitri. Perlambatan tersebut terlihat dari penurunan TPK hotel bintang dan non bintang. TPK bintang mengalami penurunan dari sebesar 70,43% pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 60,66% pada triwulan IV 2016. Sementara hotel non bintang mengalami penurunan dari sebesar 39,02% pada triwulan III 2016 menjadi

sebesar 32,71% pada triwulan IV 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut, rata-rata lama tinggal turut mengalami penurunan. Rata-rata lama tinggal hotel bintang mengalami penurunan dari sebesar 3,06 hari pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 2,59 hari pada triwulan IV 2016. Kondisi tersebut juga seiring dengan pertumbuhan kunjungan wisman yang cenderung stabil dari sebesar 27,22% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 27,42% (yoy) pada triwulan IV 2016. Hasil survei Perolehan data Properti Komersial Bank Indonesia turut menunjukkan hal serupa seiring dengan penurunan permintaan kamar, pelaku usaha pariwisata dalam hal ini hotel secara umum melakukan penurunan *average room rate* untuk dapat menarik kunjungan wisatawan.



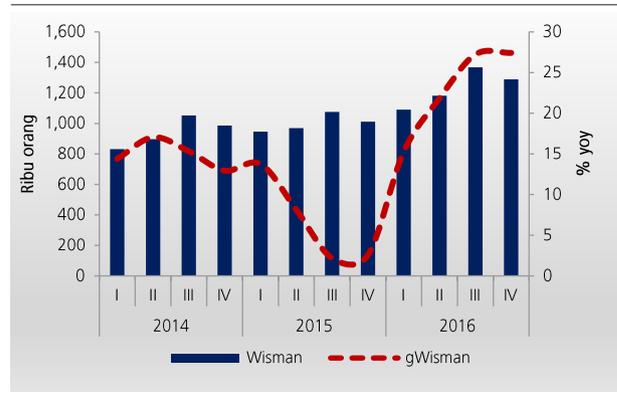
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Grafik 1.18 Tingkat Penghunian Kamar



Sumber: Survei PPKom Bank Indonesia

Grafik 1.19 Average Room Rate Bali



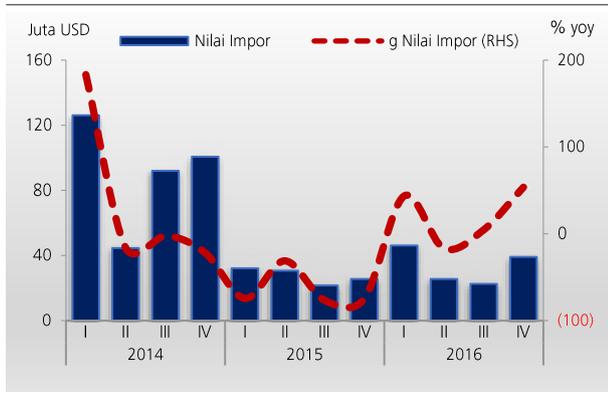
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.20 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

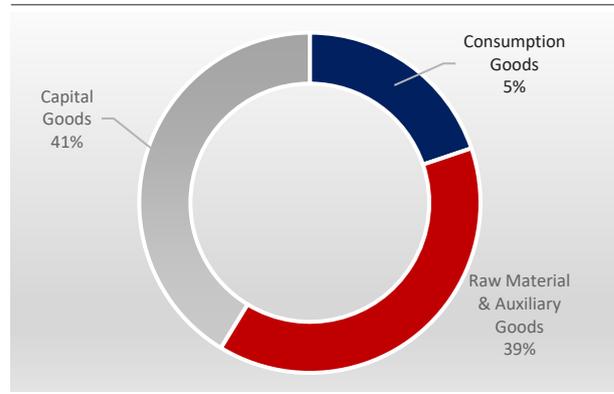
Impor Luar Negeri

Perkembangan kinerja impor luar negeri pada triwulan IV 2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar 31,82% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan III 2016 yang sebesar 21,57% (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan impor barang dan impor jasa. Impor barang mengalami peningkatan dari kontraksi sebesar -10,39% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 22,36%(yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara impor jasa mengalami peningkatan dari sebesar 27,48% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 33,60% (yoy) pada triwulan IV 2016. Secara keseluruhan tahun 2016 impor luar negeri mengalami peningkatan dari sebesar -10,89% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 22,49% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan terutama sejalan dengan peningkatan impor kapal untuk wisata dalam mendukung perkembangan pariwisata di Bali.

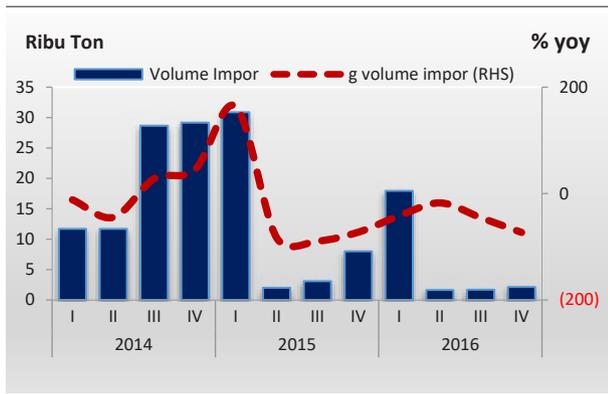
Peningkatan impor pada triwulan IV 2016 tersebut terkonfirmasi dari pertumbuhan nilai impor barang Provinsi Bali yang mengalami peningkatan dari sebesar 4,56% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 53,63%(yoy) pada triwulan IV 2016. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan pembelian mesin dan kapal yang siap jual sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Meskipun demikian, pertumbuhan volume impor masih mengalami kontraksi pertumbuhan yang



Grafik 1. 21 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali



Grafik 1. 23 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC



Grafik 1. 22 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali



Grafik 1. 24 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC

tercatat sebesar -73,04% (yoy) pada triwulan IV 2016, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi periode triwulan III 2016 yang tercatat sebesar -45,29%(yoy).

Peningkatan pertumbuhan nilai impor terjadi pada *capital goods* dan *consumption goods*. *Capital goods* yang memiliki *share* terbesar sebesar 41% mencatat pertumbuhan tertinggi 281,34% (yoy) pada triwulan IV 2016, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2016 yang berkontraksi sebesar 15,46% (yoy). Peningkatan tersebut seiring dengan adanya pembelian kapal untuk industri pariwisata. Sejalan dengan kondisi tersebut, *consumption goods* yang memiliki *share* sebesar 5% dari total impor menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 4,92% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 10,98% (yoy) pada triwulan IV 2016. Di sisi lain, pertumbuhan impor *raw material* yang memiliki *share* sebesar 39% mengalami perlambatan seiring

dengan perlambatan kinerja industri pengolahan di triwulan IV 2016.

Kinerja impor jasa Provinsi Bali turut menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari sebesar 27,48% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 33,60% (yoy) pada triwulan IV 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan penambahan tenaga kerja asing pasca implementasi MEA di akhir 2016. Peningkatan terutama terjadi pada tenaga pariwisata untuk perhotelan terutama hotel dengan jaringan internasional antara lain untuk tenaga *chef*, serta *top level manager*.

Kinerja ekspor triwulan I 2017 diperkirakan mengalami perlambatan seiring dengan pola musimannya yang cenderung melambat di awal tahun. Selain itu, produksi komoditas perikanan yang merupakan komoditas ekspor utama Provinsi Bali

mengalami hambatan di awal tahun seiring dengan gelombang tinggi yang menghambat aktivitas melaut. Meskipun demikian, adanya hari raya imlek di triwulan I 2017 diharapkan dapat mendorong kinerja ekspor jasa Provinsi Bali di triwulan I 2017. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja impor diperkirakan mengalami perlambatan seiring dengan pola musiman yang mengalami perlambatan di awal tahun. Kondisi tersebut juga seiring dengan masih tertahannya investasi di awal tahun yang merupakan periode pembuatan kontrak.

1.3. SISI PENAWARAN

Darisisipenawaran,perlambatankinerjaperekonomian Provinsi Bali pada triwulan IV 2016 disebabkan oleh perlambatan di hampir semua lapangan usaha utama Provinsi Bali. Perlambatan antara lain terjadi di lapangan usaha pertanian, konstruksi, transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, *real estate*, admistrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Perlambatan seiring dengan berakhirnya periode *peak season* pariwisata pada triwulan III 2016 serta melemahnya kinerja konsumsi

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (% , yoy)*

Komponen	2015				2015	2016				2016
	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.59	4.4	1.5	2.45	2.72	2.03	0.34	6.23	3.78	3.10
Pertambangan dan Penggalian	(4.19)	(6.5)	(9.8)	(6.57)	(6.83)	5.01	6.31	5.71	0.35	4.28
Industri Pengolahan	6.73	8.6	6.9	6.34	7.13	4.68	2.15	3.30	2.99	3.26
Pengadaan Listrik, Gas	8.58	(2.5)	(0.6)	1.48	1.59	10.58	15.68	9.90	(1.63)	8.31
Pengadaan Air	0.93	1.1	0.8	5.12	1.99	9.64	6.82	6.14	3.05	6.34
Konstruksi	2.67	3.6	6.1	7.59	5.01	7.62	8.07	6.98	6.43	7.26
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.92	6.8	9.1	7.86	7.94	8.57	6.49	5.22	6.31	6.61
Transportasi dan Pergudangan	4.02	3.8	5.1	5.15	4.54	6.89	8.18	10.22	5.55	7.72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.42	6.2	5.7	5.19	6.11	6.15	6.78	7.48	6.31	6.69
Informasi dan Komunikasi	9.79	9.0	10.8	10.12	9.94	8.23	8.91	8.06	9.15	8.59
Jasa Keuangan	6.49	4.0	10.4	5.78	6.66	8.45	7.67	7.05	9.08	8.06
Real Estate	5.86	4.9	4.9	5.09	5.20	5.79	5.53	4.52	2.77	4.63
Jasa Perusahaan	5.23	6.9	7.2	8.54	6.99	10.14	6.39	6.27	4.87	6.85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.28	7.9	9.4	8.31	8.27	5.48	15.19	2.32	0.05	5.44
Jasa Pendidikan	8.75	8.8	8.2	9.91	8.94	9.50	9.37	8.72	8.15	8.91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.06	7.9	9.8	9.26	8.76	9.96	9.50	8.57	8.06	9.00
Jasa lainnya	8.96	7.4	7.6	8.01	7.99	7.70	8.34	9.09	8.92	8.52
PDRB	5.94	5.86	6.21	6.10	6.03	6.38	6.54	6.61	5.47	6.24

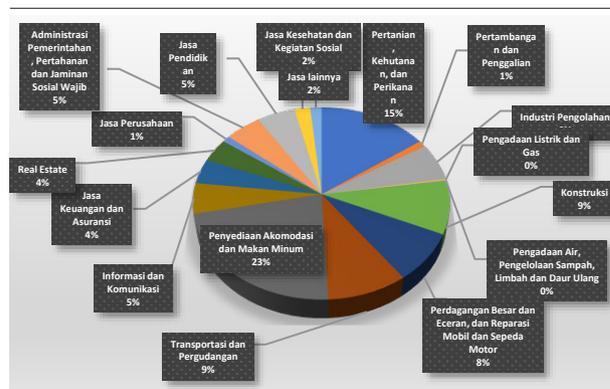
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
* Tahun Dasar 2010

rumah tangga dan pemerintah yang berdampak pada perlambatan di sebagian besar lapangan usaha utama Provinsi Bali. Peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut, peningkatan kinerja lapangan usaha informasi dan komunikasi juga belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali keseluruhan pada triwulan IV 2016.

Sementara itu, peningkatan perekonomian Bali keseluruhan tahun 2016 didorong oleh peningkatan sebagian besar lapangan usaha utama Provinsi Bali. Lapangan usaha tersebut antara lain pertanian, konstruksi, transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa keuangan, jasa kesehatan, tambang, listrik dan gas, dan air. Peningkatan kinerja industri pariwisata mendominasi peningkatan kinerja perekonomian tahun 2016 seiring dengan peningkatan kunjungan wisman yang mendorong kinerja lapangan usaha terkait. Selain itu, seiring dengan upaya peningkatan produktivitas lapangan usaha pertanian seperti intensifikasi serta peningkatan produksi perikanan pasca pelarangan penggunaan alat penangkap ikan tertentu yang mendorong peningkatan ketersediaan ikan berkontribusi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2016.

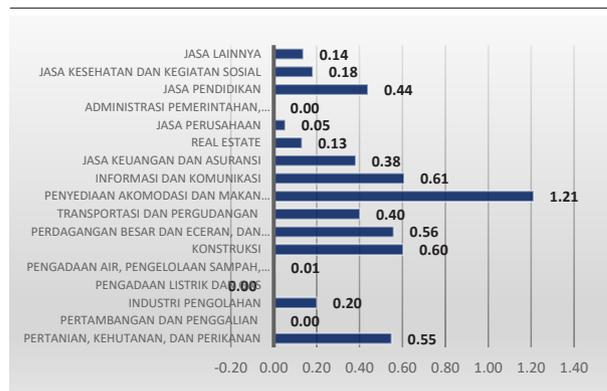
Struktur perekonomian Provinsi Bali pada triwulan IV 2016, masih didominasi oleh 5 komponen lapangan usaha utama antara lain: (1) penyediaan akomodasi makan dan minum (23%), (2) pertanian, kehutanan dan perikanan (15%), (3) konstruksi (9%), (4) transportasi dan pergudangan (9%), dan (5) perdagangan besar dan eceran (8%). Dominasi industri pariwisata masih terlihat dari total pangsa lapangan usaha terkait dengan industri pariwisata yang mencapai 31%. Sementara itu, berdasarkan dari sumbangan pertumbuhan ekonominya, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum

serta lapangan usaha konstruksi menjadi lapangan usaha yang memiliki sumbangan tertinggi masing-masing sebesar 1,21% dan 0,6%. Sementara lapangan usaha pertanian yang merupakan lapangan usaha sektor utama terbesar kedua, mengalami penurunan sumbangan menjadi 0,55%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,68%.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

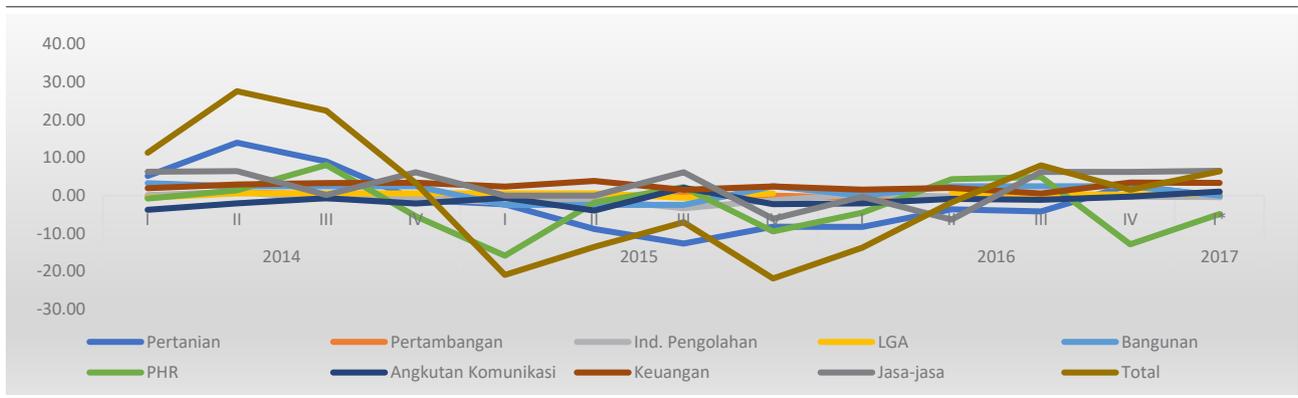
Grifik 1.25 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan IV 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grifik 1.26 Andil Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan IV 2016

Memasuki triwulan I 2017, sebagian besar lapangan usaha menunjukkan peningkatan terlihat dari peningkatan sebagian besar lapangan usaha utama perkiraan kegiatan dunia usaha (Survei Kegiatan Dunia Usaha) pada triwulan I 2017 antara lain PHR, angkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa.



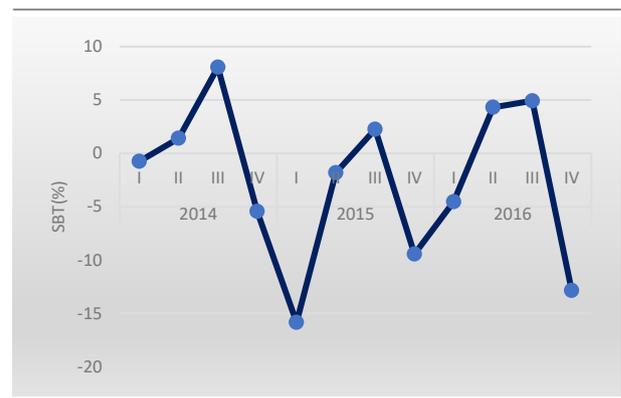
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.27 Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha

1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

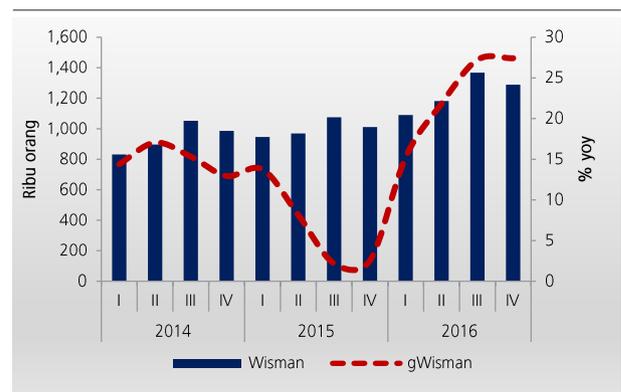
Perkembangan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami perlambatan kinerja pada triwulan IV 2016 yang tercatat tumbuh sebesar 6,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 7,48% (yoy). Perlambatan kinerja lapangan usaha ini terkonfirmasi oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di triwulan IV 2016 yang menunjukkan penurunan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk lapangan usaha ini dari sebesar 4,92% (SBT) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -12,86% (SBT) di triwulan IV 2016. Perlambatan kinerja lapangan usaha ini terjadi seiring dengan berakhirnya periode *peak season* pariwisata di triwulan III 2016. Hari raya natal dan tahun baru 2017 belum mampu mendorong kinerja pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan kunjungan wisman stabil tercatat sebesar 27,42% (yoy) pada triwulan IV 2016. Selain itu, perlambatan juga terkonfirmasi dari perlambatan pertumbuhan kedatangan penumpang pesawat udara dari sebesar 18,03% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 15,5% (yoy) pada triwulan IV 2016. Penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang dan bintang turut

mengkonfirmasi terjadinya perlambatan lapangan usaha ini seiring dengan permintaan terhadap kamar yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.28 Perkembangan Usaha Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (SBT)



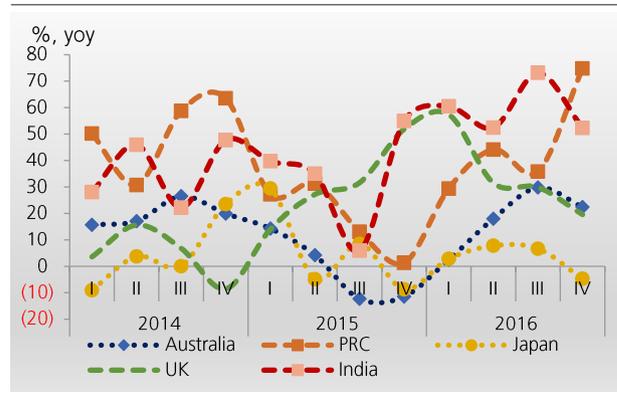
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.29 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan



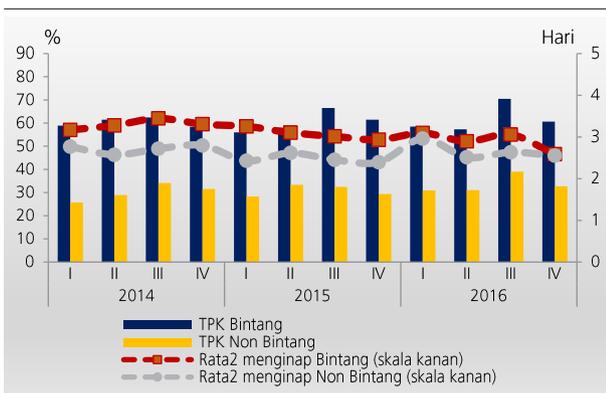
Sumber : PT. Angkasa Pura I

Grafik 1.30 Kedatangan Penumpang Pesawat Bandar Udara Ngurah Rai



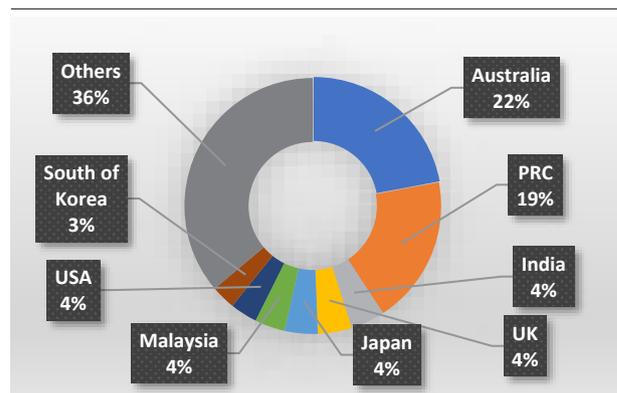
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.32 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.31 Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-Rata Lama Menginap



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.33 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali

Berdasarkan asal negaranya, pada triwulan IV 2016 wisman masih didominasi oleh wisman asal Australia dengan *share* sebesar 22%, Tiongkok sebesar 19%, India sebesar 4%, Inggris 4% dan Jepang 4%. India dan Inggris tercatat masuk ke dalam lima besar negara asal wisman seiring dengan adanya pembebasan visa ke Indonesia untuk 169 negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Meskipun demikian, pada triwulan IV 2016 pertumbuhan kunjungan dari negara tersebut secara umum mengalami perlambatan, antara lain Australia, Jepang, Inggris, dan India. Australia yang masih mencatat *share* negara asal wisman tertinggi mencatat perlambatan pertumbuhan dari sebesar 29,79% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 22,43% (yoy) pada triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut seiring dengan periode musim panas di

Australia yang menyebabkan keengganan wisatawan untuk keluar negeri serta persepsi rumah tangga tahun 2016 di Australia terhadap keuangan yang berada pada tingkat yang rendah³ sehingga menahan kunjungan wisman yang lebih tinggi di akhir tahun. Sementara itu, kunjungan wisman asal Tiongkok masih mengalami peningkatan sering dengan berlanjutnya tren *outbound tourist* serta didukung dengan penawaran paket wisata oleh pelaku usaha travel di Bali.

Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2016 kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami peningkatan dari sebesar 6,11% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 6,69% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan (1) upaya promosi pelaku usaha pariwisata; (2)

³ Statement On Monetary Policy Reserve Bank of Australia (RBA) February 2017 : "Households' perceptions of their personal finances are around average and their unemployment expectations are at low levels relative to recent years"

perbaikan kondisi perekonomian global dan negara asal wisman; (3) penambahan frekuensi penerbangan dari dan ke Bali ke beberapa negara asal wisman; dan (4) frekuensi MICE yang cukup tinggi di tahun 2016. Peningkatan tersebut terlihat dari peningkatan pertumbuhan kunjungan wisman dari sebesar 6,23% (yoy) pada tahun 2015 menjadi 23,14% (yoy) pada tahun 2016.

Memasuki triwulan I 2017 Lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum diperkirakan mengalami peningkatan sesuai dengan pola musimannya di awal tahun pasca tahun baru 2017, hari raya Nyepi, dan berlangsungnya Hari Raya Imlek. Peningkatan terutama terjadi pada wisman asal Tiongkok didukung dengan dibukanya charter dari 5 kota di China mulai Januari – Maret 2017 dengan rute Denpasar - Chengdu, Denpasar - Shenzhen, Denpasar - Kunming, Denpasar - Chongqing, dan Denpasar - Xiamen yang akan dilayani dengan pesawat Airbus A330 dengan kapasitas 360 seat. Selain itu, hasil survei dan *liaison* mengkonfirmasi potensi peningkatan seiring dengan (i) upaya promosi; (ii) pengembangan produk paket wisata dengan menekankan Bali and Beyond; (iii) peningkatan pelayanan; (iv) mulai berkembangnya beberapa segmen pasar baru yaitu Timur Tengah (antara lain Israel), Rusia dan Finlandia; (v) dampak lanjutan kebijakan bebas visa dan *open sky policy*. Berdasarkan hasil survei dan *liaison* Peningkatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum pada triwulan berjalan juga didorong oleh frekuensi MICE terutama *wedding* dan *meeting* yang cukup tinggi di bulan Januari 2017.

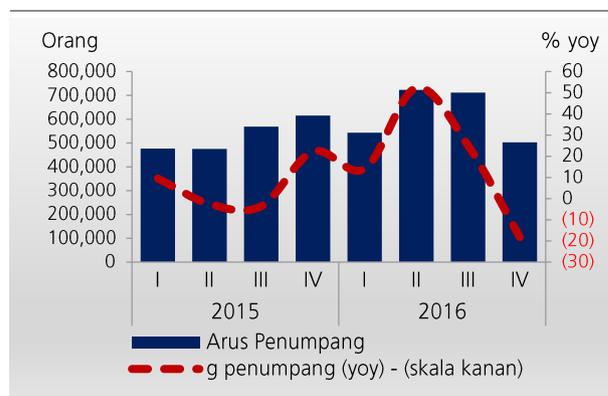
1.3.2. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Kategori transportasi dan pergudangan mengalami perlambatan dari sebesar 10,22%(yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 5,55% (yoy) pada triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan di transportasi laut seiring

telah berakhirnya *peak season* di triwulan sebelumnya (Hari Raya Idul Fitri dan libur sekolah) sehingga terjadi penurunan penumpang penyebrangan laut. Peningkatan kinerja transportasi udara masih belum mampu mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan secara keseluruhan. Meskipun demikian, secara keseluruhan tahun lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan dari pertumbuhan sebesar 4,54% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 7,72% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan kinerja industri wisata dan kunjungan wisman di tahun 2016.

Transportasi Laut

Pada triwulan IV 2016 perkembangan kinerja transportasi laut mengalami penurunan seiring dengan *peak season* libur sekolah dan Idul Fitri (arus mudik). Penurunan tersebut terlihat dari penurunan pertumbuhan arus penumpang transportasi laut dari sebesar 25,02% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -18,25% (yoy) pada triwulan IV 2016.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Grafik 1.34 Arus Penumpang Laut Provinsi Bali

Di sisi lain, seiring dengan kinerja transportasi udara mengalami peningkatan sesuai dengan pola musimannya menjelang tahun baru. Pertumbuhan keberangkatan jumlah penumpang mengalami peningkatan dari sebesar 19,88% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 21,99% (yoy) pada triwulan IV 2016.

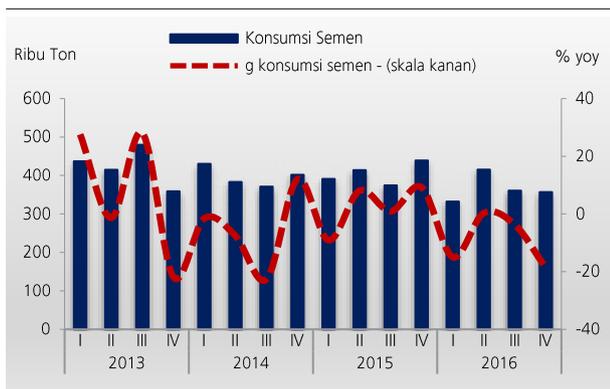


Sumber : BUMN

Grafik 1.35 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai

1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi

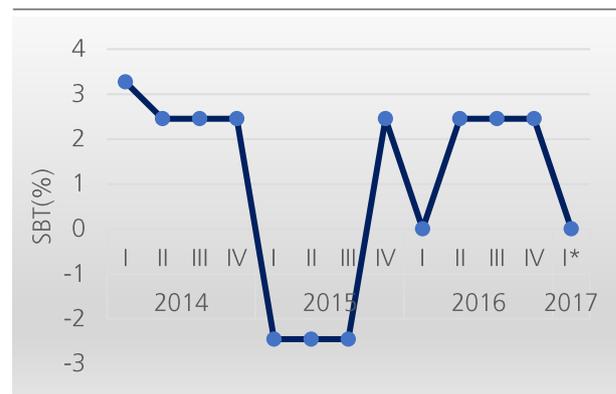
Seiring dengan perlambatan kinerja komponen investasi, lapangan usaha konstruksi turut mengalami perlambatan. Lapangan usaha konstruksi mengalami perlambatan dari sebesar 6,98% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 6,43% (yoy) pada triwulan IV 2016. Perlambatan ini diindikasikan oleh kontraksi penjualan semen yang semakin dalam dari sebesar -3,73% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -18,76% (yoy) pada triwulan IV 2016. Selain itu, perlambatan kinerja lapangan usaha ini terlihat dari perkembangan kegiatan usaha sektor bangunan yang stagnan sebesar 2,45% pada triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut seiring dengan pemotongan APBN dan penundaan pencairan DAU yang menghambat sejumlah pembangunan di Provinsi Bali.



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1.36 Perkembangan Konsumsi Semen Provinsi Bali

Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2016 kinerja lapangan usaha konstruksi mengalami peningkatan dari sebesar 5,01% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 7,26% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan tersebut sejalan dengan perbaikan ekspektasi pelaku usaha sebagai dampak dari berkurangnya ketidakpastian global serta penurunan suku bunga perbankan khususnya suku bunga kredit konstruksi (merespon penurunan *BI Rate/BI 7 Days Repo Rate*). Selain itu, relaksasi ketentuan LTV untuk KPR dan penurunan suku bunga KPR turut mendorong peningkatan permintaan rumah yang pada gilirannya meningkatkan kinerja lapangan usaha konstruksi. Program dan paket kebijakan Pemerintah XIII juga berpotensi mendorong peningkatan permintaan rumah tinggal. Komitmen Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur turut berkontribusi dalam peningkatan kinerja lapangan usaha konstruksi salah satunya pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara dan RS Mata Indra.



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.37 Kegiatan Usaha Sektor Bangunan

Memasuki triwulan I 2017, lapangan usaha konstruksi menunjukkan tendensi perlambatan sesuai dengan pola musimannya yang masih dalam proses pembuatan kontrak. Perkiraan perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi juga disebabkan oleh pembaharuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berpotensi kepada tertundanya pencairan anggaran termasuk

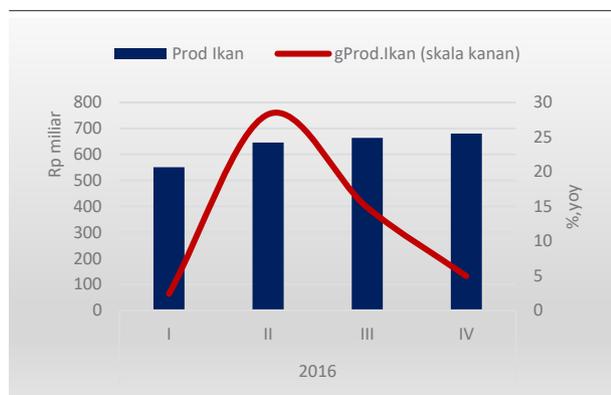
untuk belanja modal. Perlambatan juga seiring dengan pola musiman realisasi belanja Pemerintah yang masih dalam proses pengadaan di awal tahun.

1.3.4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perlambatan pertumbuhan dari sebesar 6,23% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 3,78% (yoy) pada triwulan IV 2016. Perlambatan terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja subkategori hortikultura dan perikanan. Subkategori hortikultura mengalami penurunan kinerja pada triwulan IV 2016 seiring dengan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan hasil panen mudah busuk salah satunya untuk komoditas bawang merah yang mengalami penurunan di akhir tahun 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut, subkategori perikanan turut

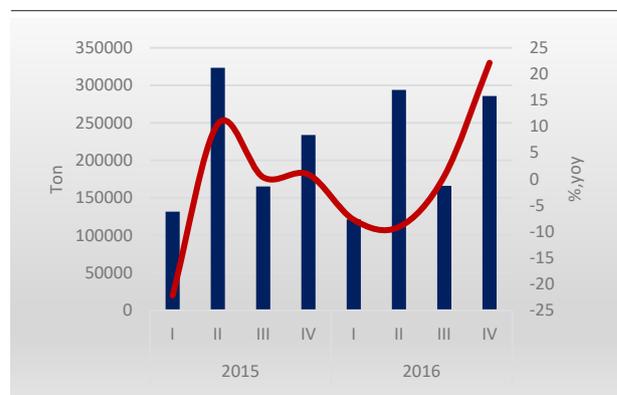
mengalami perlambatan dari pertumbuhan sebesar 14,58% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 4,935 (yoy) pada triwulan IV 2016. Kondisi tersebut disebabkan oleh gelombang tinggi yang menghalangi aktivitas nelayan serta adanya penghentian 401 kapal milik *Asosiasi Tuna Longline Indonesia* (ATLI).

Di sisi lain, subkategori tanaman bahan makanan mengalami peningkatan pertumbuhan dari sebesar 0,56% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 22,15% (yoy) pada triwulan IV 2016 seiring dengan adanya musim panen. Peningkatan subkategori ini juga terlihat dari hasil panen padi perlakuan organik tahap III bulan November 2016 lalu di Kelompok Tani, Ternak dan Ikan (Gianyar) telah mencapai hasil rata-rata sebesar 10,5 ton/Ha meningkat sebesar 90% dari kondisi awal yang rata-rata hanya sebesar 5,5 ton/Ha.



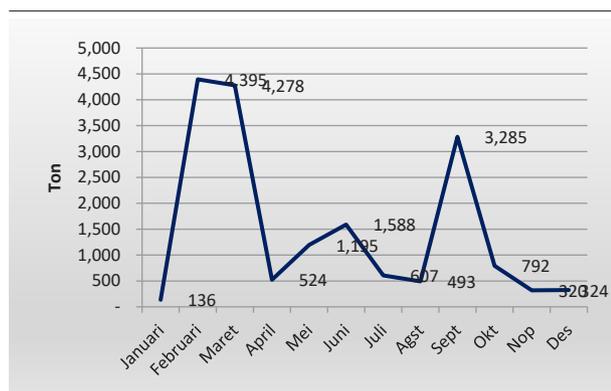
Sumber : Dinas Perikanan

Grafik 1.38 Perkembangan Produksi Perikanan



Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali

Grafik 1.40 Perkembangan Produksi Padi di Bali



Sumber : Dinas Pertanian dan Hortikultura

Grafik 1.39 Perkembangan Produksi Bawang Merah 2016

Sementara itu, untuk keseluruhan tahun kinerja lapangan usaha pertanian mengalami peningkatan dari pertumbuhan sebesar 2,72% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,1% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan tersebut seiring dengan ketersediaan air yang cukup selama periode tanam padi, penggunaan pupuk organik dan adanya program gerakan pengelolaan penerapan tanaman terpadu (GPPT) serta pendampingan secara konsisten yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan

(PPL) maupun pelaksanaan kegiatan sekolah lapang penanggulangan hama terpadu (SLHPT) oleh Dinas Pertanian dalam rangka mengatasi serangan hama, mendorong peningkatan produksi padi di triwulan laporan. Peningkatan ini juga, didorong oleh telah selesainya perbaikan saluran irigasi di beberapa lokasi sentra pertanian seperti Gianyar dan Tabanan.



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

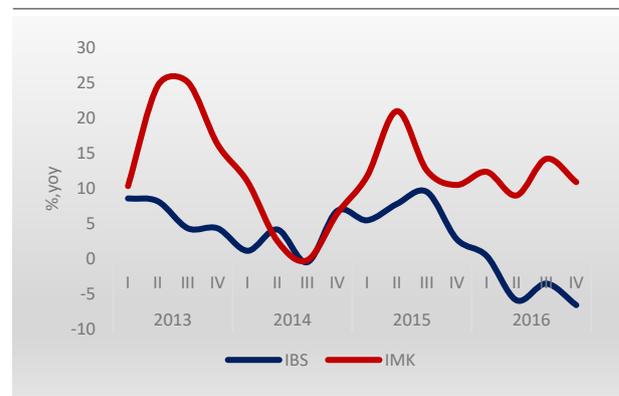
Grafik 1.41 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pertanian

Perkembangan lapangan usaha pertanian pada triwulan I 2017 menunjukkan tendensi penurunan yang terutama disebabkan oleh berlanjutnya La Nina yang menghambat kinerja sebagian besar subkategori lapangan usaha ini. Perkiraan perlambatan tersebut terlihat dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pertanian yang menunjukkan penurunan dari sebesar 2,84% (SBT) pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar -0,405 (SBT) pada triwulan I 2017. Penurunan tersebut seiring dengan masih tingginya curah hujan yang menghambat kinerja subkategori hortikultura dimana komoditas seperti cabai dan bawang menjadi mudah busuk. Selain itu, curah hujan yang tinggi disertai gelombang tinggi menghentikan aktivitas nelayan untuk melaut sehingga berdampak pada penurunan kinerja perikanan tangkap. Sementara itu, perkiraan berlanjutnya paceklik ikan di Kabupaten Jembrana juga berpotensi menahan kinerja perikanan tangkap. Adanya risiko serangan hama juga berpotensi berdampak pada penurunan kinerja lapangan usaha

pertanian pada triwulan berjalan. Salah satunya serangan hama di subak di daerah Negara mencapai hampir 6 Ha.

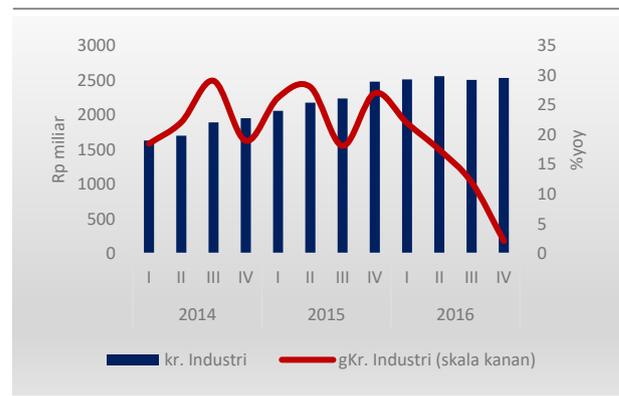
1.3.5. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan IV 2016, pertumbuhan lapangan industri pengolahan tercatat sebesar 2,99% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,3%(yoy). Perlambatan tersebut seiring dengan pola musimannya yang mengikuti pola hari raya keagamaan dan liburan antara lain untuk libur lebaran dan natal. Perlambatan tersebut terkonfirmasi dari penurunan pertumbuhan Indeks Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Indeks Manufaktur Mikro Kecil dan Menengah (IMK). IBS mengalami penurunan dari sebesar -3,53% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -6,58%



Sumber : BPS Provinsi Bali

Grafik 1.42 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)



Grafik 1.43 Kredit Kategori Industri

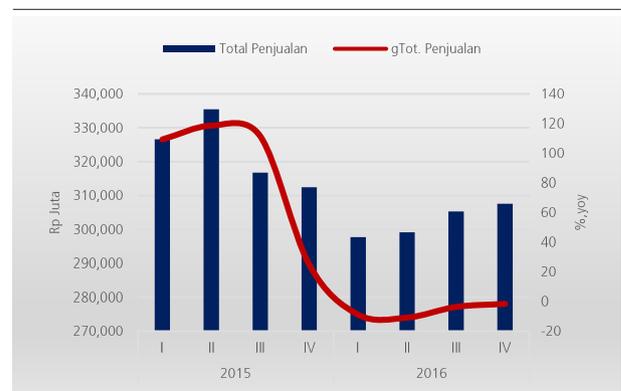
(yoy) pada triwulan IV 2016. Sejalan dengan kondisi tersebut, IMK mengalami perlambatan dari sebesar 14,19% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 10,88% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sementara itu, pertumbuhan kredit industri pengolahan masih menunjukkan perlambatan dari sebesar 12,02% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 2,15% (yoy) pada triwulan IV 2016.

Secara keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan industri pengolahan mengalami perlambatan dari sebesar 7,13% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,26% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi di hampir semua subkategori industri pengolahan antara lain industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, industri kayu, industri kertas, industri kimia, industri barang galian bukan logam, industri barang dari logam, industri mesin, industri alat angkutan, dan industri furniture. Perlambatan tersebut seiring dengan perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2016 sehingga berdampak pada penurunan permintaan.

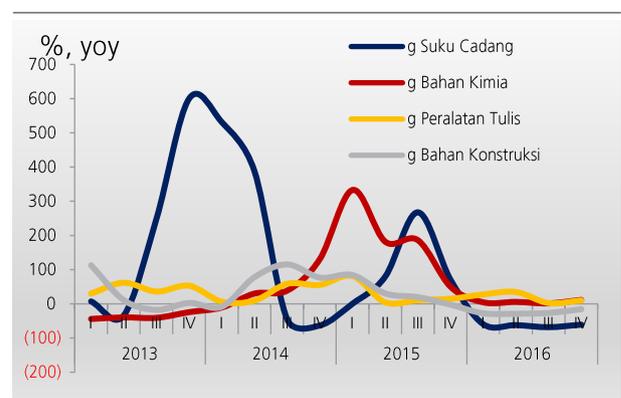
Memasuki triwulan I 2017, industri pengolahan menunjukkan tendensi peningkatan seiring dengan pola musimannya. Berdasarkan hasil survei dan *liaison*, industri pengolahan memiliki pola produksi yang tinggi di awal tahun sebagai persiapan hari raya lebaran dan Galungan di triwulan II 2017. Selain itu, lapangan usaha industri pengolahan turut berpotensi mengalami peningkatan pada triwulan berjalan, seiring dengan peningkatan permintaan dari Amerika Serikat. Perkiraan peningkatan kinerja lapangan usaha ini juga didukung oleh upaya ekspansi pasar oleh pelaku usaha (salah satu kontak menyatakan adanya *buyer* baru dari Korea dan pasar domestik).

1.3.6. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 Pada triwulan IV 2016, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan pertumbuhan dari sebesar 5,22% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 6,31%

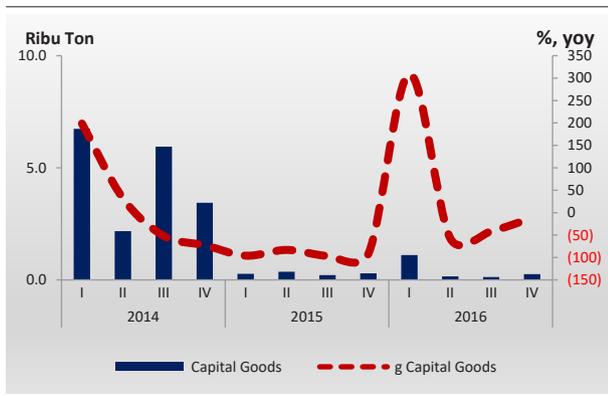
(yoy) pada triwulan IV 2016. Pertumbuhan tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran yang menunjukkan perbaikan pertumbuhan dari sebesar -3,61% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -1,56% (yoy) pada triwulan IV 2016. Peningkatan pada lapangan usaha ini seiring dengan perbaikan kinerja impor barang modal di akhir tahun dari sebesar -41,36% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar -12,10% (yoy) pada triwulan IV 2016. Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, yang menunjukkan perbaikan pertumbuhan pada sebagian besar kelompok komoditas antara lain kelompok bahan konstruksi, suku cadang, barang kerajinan dan mainan, makanan, minuman dan tembakau, pakaian jadi, bahan kimia, dan bahan bakar dan energi.



Sumber : Survei Penjualan Eceran
 Grafik 1.44 Perkembangan Total Penjualan



Sumber : Survei Penjualan Eceran
 Grafik 1.45 Perkembangan Total Penjualan Kelompok Komoditas



Sumber : Bea Cukai

Grafik 1.46 Perkembangan Volume Impor Barang Modal

Sementara itu, untuk keseluruhan tahun lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami perlambatan dari sebesar 7,94% (yoy) pada tahun 2015 menjadi sebesar 6,61% (yoy) pada tahun 2016. Perlambatan tersebut seiring dengan perlambatan konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan daya beli disebabkan peningkatan harga beberapa komoditas dan tarif listrik.

Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran triwulan I 2017 menunjukkan tendensi peningkatan, seiring dengan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan peningkatan

kinerja penyediaan akomodasi makan dan minum. Membaiknya daya beli masyarakat pasca kenaikan UMP, berlangsungnya hari raya imlek serta adanya perayaan hari keagamaan Nyepi, dan menjelang Galungan di awal triwulan II 2017 merupakan faktor pendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini, yang juga ikut mempengaruhi peningkatan sisi komponen konsumsi rumah tangga. Peningkatan lapangan usaha perdagangan juga terkonfirmasi oleh hasil survei dan *liaison* yang menunjukkan peningkatan baik untuk penjualan domestik maupun penjualan ekspor. *Likert scale* penjualan domestik tercatat mengalami peningkatan dari sebesar 2,3 pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 2,33 pada triwulan I 2017. Sejalan dengan kondisi tersebut, *likert scale* penjualan ekspor mengalami peningkatan dari sebesar 2,14 pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 2,38 pada triwulan I 2017. Selain itu, penurunan tarif tenaga listrik untuk 12 golongan non subsidi juga diperkirakan dapat berdampak pada peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

BOKS A

SURVEI HARGA PROPERTI TRIWULAN IV-2016: HARGA RUMAH DI PASAR PRIMER MENUNJUKKAN PENINGKATAN, NAMUN HARGA RUMAH DI PASAR SEKUNDER MENUNJUKKAN PENURUNAN

Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali di triwulan IV-2016, mengindikasikan adanya peningkatan pertumbuhan harga properti residensial pada pasar primer. Secara tahunan, perkembangan harga properti primer hingga triwulan IV-2016 menunjukkan peningkatan, tercermin dari pertumbuhan indeks harga properti residensial primer sebesar 0,79%(yoy). Berdasarkan tipe rumah, pertumbuhan terbesar secara tahunan terjadi pada rumah tipe kecil yang tumbuh sebesar 0,95%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar tumbuh sebesar 0,61%(yoy). Sementara pertumbuhan rumah tipe besar sebesar 0,55%(yoy) pada triwulan IV-2016, lebih tinggi dibanding triwulan III-2016 yang sebesar 0,34%(yoy). Di sisi lain, pertumbuhan rumah tipe menengah mengalami sedikit perlambatan, yaitu tercatat sebesar 0,88%(yoy) pada triwulan IV-2016, lebih rendah dibanding triwulan III-2016 yang sebesar 1,24%(yoy).

Indeks harga properti residensial Provinsi Bali pada triwulan IV-2016 sebesar 185,25 atau meningkat sebesar 0,40% (qtq). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding triwulan III-2016 yang mengalami kontraksi sebesar 0,13% (qtq). Berdasarkan tipe rumah, ekspansi pertumbuhan terjadi pada semua tipe rumah, dengan pertumbuhan tertinggi (secara

triwulanan) terjadi pada rumah tipe menengah yang tumbuh sebesar 0,53%(qtq) pada triwulan IV-2016. Sementara tipe rumah kecil dan besar masing-masing tumbuh sebesar 0,34%(qtq).

Masih seperti periode-periode sebelumnya, beberapa faktor yang dianggap responden menjadi penyebab kenaikan harga adalah kenaikan harga bahan bangunan (37,5%), biaya perizinan yang mahal (27,08%), dan kenaikan upah pekerja (25%). Hasil survei mengkonfirmasi bahwa fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi pilihan utama pembiayaan konsumen untuk semua tipe rumah. *Share buyer* responden yang melakukan pembelian dengan fasilitas KPR secara umum diatas 80%. Selain itu, pembayaran dengan sistem *cash* bertahap juga menjadi alternatif yang dipilih konsumen.

Harga properti residensial di pasar primer pada triwulan I-2017 diperkirakan kembali tumbuh lebih tinggi. Kondisi ini terkonfirmasi dari hasil survei yang mencatat pertumbuhan perkiraan harga properti residensial sebesar 1,03%(qtq). Hal ini menunjukkan responden tetap optimis terhadap perkembangan properti residensial yang diperkirakan membaik pada triwulan I-2017. Peningkatan harga tertinggi pada triwulan I-2017 diperkirakan terjadi pada rumah tipe menengah yang mencapai 1,53%(qtq). Sementara

Metodologi:

Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer, bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai perkembangan properti residensial, khususnya rumah primer di Indonesia, guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan *moneter*, melalui peningkatan kualitas data. Survei harga properti residensial di pasar primer dilakukan terhadap perusahaan pengembang perumahan yang melakukan transaksi penjualan di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, yang dilakukan secara triwulanan. Data yang dikumpulkan meliputi harga jual rumah, harga jual tanah, jumlah rumah yang dibangun dan jumlah rumah yang dijual, informasi-informasi tambahan seperti penyebab kenaikan harga, kondisi permintaan dan penawaran serta pembiayaan properti.

rumah tipe kecil dan besar masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 0,83%(qtq) dan 0,72%(qtq). Secara tahunan, harga properti residensial di pasar primer turut diperkirakan meningkat. Peningkatan terbesar diperkirakan terjadi pada rumah tipe menengah, yang mencapai 2,05%(yoy). Sementara harga rumah tipe kecil dan besar masing-masing diperkirakan sebesar 1,21%(yoy) dan 1,11%(yoy).

Di sisi lain, nilai pasar rumah tipe menengah dan besar di pasar sekunder pada triwulan IV-2016 menunjukkan penurunan atau kontraksi sebesar 0,01%(qtq), setelah sebelumnya mencatat pertumbuhan sebesar 0,19% di triwulan III-2016. Namun demikian, rumah tipe besar di wilayah Denpasar Barat menunjukkan peningkatan nilai pasar pada triwulan IV-2016 dibanding triwulan III-2016. Indeks nilai pasar rumah tipe besar di Denpasar Barat tumbuh sebesar 0,05%(qtq) pada triwulan IV-2016, lebih tinggi dibanding triwulan III-2016 yang sebesar -0,18%(qtq). Penurunan terbesar terjadi pada rumah tipe menengah di wilayah Denpasar Utara dan Denpasar Selatan. Sementara untuk rumah tipe besar, penurunan terbesar terjadi pula pada wilayah Denpasar Selatan dengan indeks sebesar -0,23%(qtq), lebih rendah 1,12% dibanding pertumbuhan di triwulan III-2016 yang mencapai 0,88%(qtq). Koreksi atau penurunan nilai rumah pada pasar sekunder diindikasikan terjadi karena sebagian besar obyek rumah tidak mengalami perubahan harga penawaran yang juga mencerminkan transaksi pasar sekunder yang relatif pasif. Hal ini mengindikasikan masyarakat lebih tertarik untuk membeli rumah di pasar primer (rumah baru), seiring dengan penurunan harga jual rumah primer pada triwulan III-2016.

Penurunan nilai pasar rumah sekunder tersebut juga terjadi seiring dengan lambatnya pertumbuhan

nilai tanah pada periode yang sama dimana indeks nilai tanah tipe menengah terkonfirmasi sebesar 0,42%(qtq), lebih rendah dibanding triwulan III-2016 yang sebesar 0,67%(qtq) dan indeks nilai tanah tipe besar tumbuh sebesar 0,45%(qtq), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 0,9%(qtq).

Dari sisi pelaku usaha di bidang *real estate*, peningkatan kinerja pertumbuhan properti residensial di pasar primer diindikasikan oleh peningkatan penyaluran kredit *real estate* untuk perumahan. Penyaluran kredit *real estate* perumahan tipe kecil pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 14,12%(yoy), jauh lebih tinggi dari triwulan III-2016 yang sebesar 5,49%(yoy). Sementara pertumbuhan penyaluran kredit *real estate* perumahan tipe menengah tercatat sebesar 57,95%(yoy), jauh lebih tinggi dibanding triwulan III-2016 yang sebesar -54,09%(yoy). Namun demikian, pertumbuhan penyaluran kredit *real estate* untuk rumah tipe besar mengalami kontraksi, yaitu dari 8,57%(yoy) pada triwulan III-2016 menjadi -9,72%(yoy) pada triwulan IV-2016. Kondisi ini sejalan dengan hasil SHPR Primer triwulan IV-2016, dimana rumah tipe menengah dan kecil diprediksi mengalami peningkatan permintaan pada triwulan mendatang, sehingga mendorong peningkatan kredit oleh pelaku usaha.

Namun disisi lain, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan untuk kepemilikan rumah tinggal (Kredit Pemilikan Rumah) secara umum menunjukkan penurunan. Pertumbuhan penyaluran KPR untuk tipe kecil di triwulan IV-2016 tercatat sebesar -21,87%(yoy), lebih rendah dibanding triwulan III-2016 yang sebesar -17,30%(yoy). Pertumbuhan penyaluran KPR untuk rumah tipe menengah turut mengalami penurunan, dari -0,09%(yoy) pada triwulan III-2016 menjadi -1,10%(yoy) pada triwulan

IV-2016. Sementara penyaluran KPR untuk rumah tipe besar tercatat sebesar -0,86%(yoy) pada triwulan IV-2016, lebih rendah dibanding triwulan III-2016 yang sebesar 1,65%(yoy). Dilihat dari nominalnya, penyaluran KPR rumah tipe kecil pada triwulan III-2016 tercatat sebesar Rp 2,4 triliun. Sementara penyaluran KPR ke rumah tipe menengah dan besar pada periode yang sama tercatat sebesar Rp 3,8 triliun dan Rp 4,1 triliun. Meski menunjukkan perlambatan, namun kualitas KPR secara umum

menunjukkan perbaikan. Non Performing Loan (NPL) untuk KPR tipe kecil tercatat mengalami perbaikan, dari 0,38% pada triwulan III-2016 menjadi 0,25% pada triwulan IV-2016. Sementara NPL untuk KPR tipe besar menurun, dari 2,48% pada triwulan III-2016 menjadi 1,63% pada triwulan IV-2016. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Provinsi Bali masih cenderung berfokus untuk memperbaiki kualitas kredit, termasuk KPR.

Tabel 1. Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

IHPR	2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I*
IHPR - Total	175.59	174.71	178.33	180.59	181.07	182.05	183.17	183.80	184.46	184.75	184.51	185.25	187.16
IHPR - Tipe Kecil	186.65	185.81	187.43	189.16	189.68	190.48	192.34	192.34	193.44	193.74	193.51	194.16	195.78
IHPR - Tipe Menengah	192.38	190.36	193.06	197.50	198.23	198.94	200.07	201.86	202.58	202.76	202.56	203.63	206.74
IHPR - Tipe Besar	147.91	147.91	153.70	154.62	154.85	156.14	156.62	156.83	157.08	157.42	157.16	157.69	158.83

*) Angka Perkiraan

Tabel 2. Growth (YoY) Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

Growth yoy (RHS)	2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I*
IHPR - Total	9.32	7.99	3.57	3.78	3.12	4.20	2.72	1.78	1.87	1.48	0.73	0.79	1.46
IHPR - Tipe Kecil	19.22	17.88	5.39	3.16	1.62	2.52	2.62	1.68	1.98	1.71	0.61	0.95	1.21
IHPR - Tipe Menengah	9.14	6.40	1.36	3.61	3.04	4.51	3.63	2.21	2.19	1.92	1.24	0.88	2.05
IHPR - Tipe Besar	-	-	3.92	4.53	4.69	5.56	1.90	1.43	1.44	0.82	0.34	0.55	1.11

*) Angka Perkiraan

Tabel 3. Growth (qtq) Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Primer

Growth qtq (RHS)	2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I*
IHPR - Total	0.91	-0.50	2.07	1.27	0.27	0.54	0.62	0.34	0.36	0.16	-0.13	0.40	1.03
IHPR - Tipe Kecil	1.80	-0.45	0.88	0.92	0.27	0.42	0.98	0.00	0.57	0.16	-0.12	0.34	0.83
IHPR - Tipe Menengah	0.93	-1.05	1.42	2.30	0.37	0.36	0.57	0.89	0.36	0.09	-0.10	0.53	1.53
IHPR - Tipe Besar	0.00	0.00	3.92	0.59	0.15	0.83	0.31	0.13	0.16	0.22	-0.17	0.34	0.72

*) Angka Perkiraan

Tabel 4. Perkembangan Indeks Nilai Pasar Rumah Tipe Menengah

WILAYAH	Q1-2016	Q2-2016	Q3-2016	Q4-2016
DENPASAR UTARA	1.12%	-0.22%	0.08%	-0.22%
DENPASAR BARAT	3.11%	0.12%	0.47%	0.16%
DENPASAR TIMUR	0.64%	-0.23%	0.28%	0.02%
DENPASAR SELATAN	-3.62%	0.25%	-0.06%	-0.22%
KUTA SELATAN	0.57%	-0.06%	0.20%	0.19%
RATA-RATA	0.36%	-0.03%	0.19%	-0.01%

Tabel 5. Perkembangan Indeks Nilai Pasar Rumah Tipe Besar

WILAYAH	Q1-2016	Q2-2016	Q3-2016	Q4-2016
DENPASAR UTARA	0.03%	0.04%	0.45%	-0.01%
DENPASAR BARAT	1.90%	0.17%	-0.18%	0.05%
DENPASAR TIMUR	0.54%	0.05%	0.17%	0.05%
DENPASAR SELATAN	1.06%	-0.06%	0.88%	-0.23%
KUTA SELATAN	0.41%	0.17%	-0.15%	-0.16%
RATA-RATA	0.79%	0.08%	0.23%	-0.06%

Tabel 6. Perkembangan Indeks Nilai Pasar Tanah Tipe Menengah

WILAYAH	Q1-2016	Q2-2016	Q3-2016	Q4-2016
DENPASAR UTARA	2.49%	0.26%	0.62%	0.12%
DENPASAR BARAT	2.15%	0.61%	1.08%	0.66%
DENPASAR TIMUR	2.07%	0.11%	0.82%	0.61%
DENPASAR SELATAN	-0.46%	0.76%	0.22%	0.02%
KUTA SELATAN	1.13%	0.38%	0.63%	0.68%
RATA-RATA	1.48%	0.42%	0.67%	0.42%

Tabel 7 Perkembangan Indeks Nilai Pasar Tanah Tipe Besar

WILAYAH	Q1-2016	Q2-2016	Q3-2016	Q4-2016
DENPASAR UTARA	1.02%	0.48%	1.21%	0.43%
DENPASAR BARAT	2.81%	0.87%	0.38%	0.63%
DENPASAR TIMUR	1.38%	0.59%	0.69%	0.67%
DENPASAR SELATAN	1.59%	0.35%	1.71%	0.19%
KUTA SELATAN	1.10%	0.74%	0.49%	0.34%
RATA-RATA	1.58%	0.61%	0.90%	0.45%

Tabel 8. Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah di Provinsi Bali

Indikator Kredit Properti	2014				2015				2016			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
KPR Rumah Tinggal Tipe s.d. 70 (juta rupiah)	6.300.315	6.582.122	6.697.677	6.792.728	6.776.357	6.818.464	6.893.943	6.994.936	7.016.288	6.895.066	6.344.471	6.270.742
- Rumah Tinggal s.d. Tipe 21 (juta rupiah)	3.101.399	3.232.202	3.252.985	3.260.939	3.202.111	3.169.596	3.156.783	3.115.706	3.076.642	2.994.160	2.610.684	2.434.257
- Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 (juta rupiah)	3.198.915	3.349.920	3.444.693	3.531.789	3.574.247	3.648.868	3.737.160	3.879.230	3.939.645	3.900.906	3.733.788	3.836.485
KPRumah Tinggal Tipe diatas 70 (juta rupiah)	3.112.702	3.331.988	3.447.375	3.675.072	3.755.911	3.828.272	3.965.209	4.070.401	4.070.629	4.100.900	4.030.663	4.105.239
KP Apartemen (juta rupiah)	86.161	87.049	82.682	81.258	80.693	79.444	77.136	87.439	95.345	92.635	90.276	90.441
- KP Apartemen s.d. Tipe 21 (juta rupiah)	2.362	2.984	2.259	2.335	2.619	2.283	2.138	4.279	10.234	8.875	7.031	6.831
- KP Apartemen Tipe 22 s.d. 70 (juta rupiah)	66.133	64.979	62.486	61.389	61.352	60.089	59.417	67.830	69.080	68.259	67.916	66.287
- KP Apartemen Tipe Diatas 70 (juta rupiah)	17.666	19.086	17.937	17.534	16.721	17.072	15.581	16.031	15.501	15.501	15.329	17.324
KP Ruko dan Rukan (juta rupiah)	265.489	413.179	320.479	366.660	375.834	390.813	403.043	436.627	443.113	456.051	469.421	464.033
Total KP Rumah / Apartemen / Ruko / Rukan (juta rupiah)	9.764.666	10.414.339	10.548.213	10.915.718	10.988.794	11.116.994	11.339.331	11.589.404	11.625.375	11.544.652	10.934.832	10.930.455
Growth KPR Rumah Tinggal Tipe s.d. 70 (%) yoy	17,27	12,53	10,73	11,21	7,56	3,59	2,93	2,98	3,54	1,12	-7,97	-10,35
Rumah Tinggal s.d. Tipe 21 (%) yoy, rhs	7,45	10,66	9,58	8,24	3,25	-1,94	-2,96	-4,45	-3,92	-5,53	-17,30	-21,87
Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 (%) yoy, rhs	28,66	14,41	11,83	14,10	11,73	8,92	8,49	9,84	10,22	6,91	-0,09	-1,10
Rui Rumah Tinggal Tipe diatas 70 (%) yoy, rhs	26,38	21,09	12,59	20,56	20,66	14,89	15,02	10,76	8,38	7,12	1,65	0,86

Tabel 9. Perkembangan Kredit Real Estate Perumahan Provinsi Bali

Indikator Kredit Properti	2014				2015				2016			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
KPR Rumah Tinggal Tipe s.d. 70 (juta rupiah)	6.300.315	6.582.122	6.697.677	6.792.728	6.776.357	6.818.464	6.893.943	6.994.936	7.016.288	6.895.066	6.344.471	6.270.742
- Rumah Tinggal s.d. Tipe 21 (juta rupiah)	3.101.399	3.232.202	3.252.985	3.260.939	3.202.111	3.169.596	3.156.783	3.115.706	3.076.642	2.994.160	2.610.684	2.434.257
- Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 (juta rupiah)	3.198.915	3.349.920	3.444.693	3.531.789	3.574.247	3.648.868	3.737.160	3.879.230	3.939.645	3.900.906	3.733.788	3.836.485
KPRumah Tinggal Tipe diatas 70 (juta rupiah)	3.112.702	3.331.988	3.447.375	3.675.072	3.755.911	3.828.272	3.965.209	4.070.401	4.070.629	4.100.900	4.030.663	4.105.239
KP Apartemen (juta rupiah)	86.161	87.049	82.682	81.258	80.693	79.444	77.136	87.439	95.345	92.635	90.276	90.441
- KP Apartemen s.d. Tipe 21 (juta rupiah)	2.362	2.984	2.259	2.335	2.619	2.283	2.138	4.279	10.234	8.875	7.031	6.831
- KP Apartemen Tipe 22 s.d. 70 (juta rupiah)	66.133	64.979	62.486	61.389	61.352	60.089	59.417	67.830	69.080	68.259	67.916	66.287
- KP Apartemen Tipe Diatas 70 (juta rupiah)	17.666	19.086	17.937	17.534	16.721	17.072	15.581	16.031	15.501	15.501	15.329	17.324
KP Ruko dan Rukan (juta rupiah)	265.489	413.179	320.479	366.660	375.834	390.813	403.043	436.627	443.113	456.051	469.421	464.033
Total KP Rumah / Apartemen / Ruko / Rukan (juta rupiah)	9.764.666	10.414.339	10.548.213	10.915.718	10.988.794	11.116.994	11.339.331	11.589.404	11.625.375	11.544.652	10.934.832	10.930.455
Growth KPR Rumah Tinggal Tipe s.d. 70 (%) yoy	17,27	12,53	10,73	11,21	7,56	3,59	2,93	2,98	3,54	1,12	-7,97	-10,35
Rumah Tinggal s.d. Tipe 21 (%) yoy, rhs	7,45	10,66	9,58	8,24	3,25	-1,94	-2,96	-4,45	-3,92	-5,53	-17,30	-21,87
Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 (%) yoy, rhs	28,66	14,41	11,83	14,10	11,73	8,92	8,49	9,84	10,22	6,91	-0,09	-1,10
Rui Rumah Tinggal Tipe diatas 70 (%) yoy, rhs	26,38	21,09	12,59	20,56	20,66	14,89	15,02	10,76	8,38	7,12	1,65	0,86

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II



Foto oleh: Umran Usman

Tegalalang, Gianyar

KEUANGAN PEMERINTAH



2.1. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD secara garis besar terdiri atas pendapatan daerah dan belanja-transfer daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sementara belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dengan demikian, APBD menggambarkan arah dan skala prioritas serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam penyusunan APBD, diharapkan setiap daerah dapat melakukan sinergi dengan kebijakan penganggaran dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat.

Anggaran keuangan pemerintah daerah di Bali terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan keuangan pemerintah pusat di daerah (APBN di Bali), dengan *share* terbesar adalah anggaran APBD Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan adanya perubahan APBN dan APBD untuk tahun anggaran 2016, pagu

anggaran belanja keuangan pemerintah (pusat dan daerah) di Bali mengalami perubahan untuk tahun 2016. Sebelumnya pagu anggaran belanja pemerintah di Bali mencapai Rp 31,43 triliun, yang terbagi atas APBD Provinsi 18,15%, APBD Kabupaten/Kota sebesar 55,03% dan APBN di Bali 26,82%. Setelah perubahan, pagu anggaran belanja tahun 2016 pemerintah menjadi sebesar Rp 32,95 triliun, yang terdiri atas APBD Provinsi dengan pangsa 17,65%, APBD kabupaten/kota sebesar 55,59% dan APBN di Bali sebesar 26,76%. Sementara itu, pagu pendapatan daerah di 2016 juga mengalami perubahan, yaitu dari Rp 21,06 triliun sebelum perubahan, meningkat menjadi Rp 21,62 triliun (setelah perubahan), yang terbagi atas APBD P Provinsi Bali sebesar 24,14% dan APBD P untuk 9 Kabupaten/Kota sebesar 75,86%.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah di tahun 2016 tumbuh sebesar 6,95% (yoy) atau meningkat dari Rp 27,65 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp 29,57 triliun di 2016. Secara nominal, porsi terbesar realisasi belanja dikontribusikan oleh APBD tingkat Kab/Kota, kemudian belanja APBN dan APBD Provinsi. Realisasi belanja APBD Kab/Kota di tahun 2016 tercatat sebesar Rp 16,19 triliun atau sebesar 54,75% dari total realisasi belanja Pemerintah di Provinsi Bali, meningkat sebesar

Tabel 2.1 Pagu Belanja Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	PAGU BELANJA PERUBAHAN 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU BELANJA 2016 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU BELANJA PERUBAHAN 2016 (Rp Miliar)	PANGSA
APBN	9.370	30,45%	8.431	26,82%	8.818	26,76%
APBD Provinsi Bali	5.561	18,07%	5.705	18,15%	5.816	17,65%
APBD Kab/Kota	15.840	51,48%	17.299	55,03%	18.315	55,59%
TOTAL	30.771		31.434		32.949	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

Tabel 2.2 Pagu Pendapatan Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	PAGU PENDAPATAN APBD P 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU PENDAPATAN APBD 2016 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU PENDAPATAN APBD P 2016 (Rp Miliar)	PANGSA
APBD Provinsi Bali	4.901	25,53%	5.376	25,53%	5.218	24,14%
APBD Kab/Kota	14.294	74,47%	15.681	74,47%	16.397	75,86%
TOTAL	19.195		21.057		21.615	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	REALISASI BELANJA 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	REALISASI BELANJA 2016 *) (Rp Miliar)	PANGSA	GROWTH (yoy)
APBN	8.563	30,97%	7.958	26,91%	-7,06%
APBD Provinsi Bali	4.999	18,08%	5.421	18,33%	8,44%
APBD Kab/Kota	14.086	50,95%	16.190	54,75%	14,94%
TOTAL	27.648		29.570		6,95%

*) angka sementara, belum audit

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

14,94% (yoy) dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, realisasi belanja APBN di Provinsi Bali di sepanjang tahun 2016 mencapai Rp 7,96 triliun atau sebesar 26,91% dari total realisasi belanja pemerintah di Provinsi Bali. Komponen belanja ini mengalami penurunan sebesar -7,06% (yoy) dibandingkan 2015, disebabkan oleh adanya penurunan pagu anggaran yang menyesuaikan dengan perlambatan penerimaan pemerintah. Sedangkan realisasi belanja APBD Provinsi Bali di tahun 2016, tercatat sebesar Rp 5,42 triliun atau sebesar 18,33% dari total realisasi belanja pemerintah, meningkat 8,44% (yoy) dibandingkan tahun 2015.

Secara umum perkembangan realisasi belanja pemerintah di Bali pada tahun 2016, dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi fokus pemerintah untuk mendorong akselerasi pembangunan proyek infrastruktur dalam upaya meningkatkan konektivitas (berupa peningkatan kapasitas jalan, pembangunan *shortcut* dan perbaikan jembatan) dan pelayanan kepada masyarakat (pembangunan rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) serta mendorong peningkatan produksi pertanian (perbaikan/pembangunan irigasi dan bendungan) ikut mendorong peningkatan realisasi belanja modal. Selain itu, adanya penambahan pagu anggaran belanja (dalam anggaran perubahan) di tahun 2016 baik untuk APBN, APBD Provinsi maupun kabupaten/kota, dibandingkan pagu anggaran

sebelum perubahan, ikut mempengaruhi kinerja realisasi anggaran belanja pada tahun 2016. Sementara itu dari sisi pendapatan, kebijakan pemerintah pusat yang sejak September 2016 melakukan penundaan transfer dana alokasi umum (DAU) ke Provinsi Bali dan 3 kabupaten/kota di Bali, ikut mempengaruhi kinerja realisasi pendapatan yang juga mempengaruhi kinerja realisasi belanja pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, adanya penurunan harga BBM bersubsidi dan perlambatan penjualan kendaraan bermotor ikut mempengaruhi kinerja pendapatan pemerintah melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Selain itu, program pemutihan atau penghapusan denda atau bunga pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan pemerintah di tahun 2016.

Sejalan dengan penurunan kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah di tahun 2016, yang tumbuh sebesar -4,47% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,56% (yoy), persentase realisasi belanja pemerintah terhadap pagu anggaran di tahun 2016 juga menunjukkan penurunan dibandingkan 2015. Persentase realisasi anggaran belanja pemerintah di tahun 2016 tercatat sebesar 89,74%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 89,85%. Penurunan kinerja

Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	REALISASI PENDAPATAN 2016 *) (Rp Miliar)	PANGSA	GROWTH (yoy)
APBD Provinsi Bali	4.968	25,38%	5.249	24,92%	5,66%
APBD Kab/Kota	14.603	74,62%	15.813	75,08%	8,29%
TOTAL	19.571		21.062		7,62%

*) angka sementara, belum audit

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

Tabel 2.5 Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Pagu di Bali 2015-2016

URAIAN	PERSENTASE REALISASI BELANJA TERHADAP PAGU APBD P 2015 (%)	PERSENTASE REALISASI BELANJA TERHADAP PAGU APBD P 2016* (%)
APBN	91,38	90,25
APBD Provinsi Bali	89,90	93,20
APBD Kab/Kota	88,93	88,40
TOTAL	89,85	89,74

*) angka sementara, belum audit

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

realisasi persentase belanja pemerintah di 2016, terutama disebabkan oleh menurunnya persentase realisasi belanja untuk anggaran 9 kabupaten/kota dan APBN yang memiliki pangsa lebih dari 80% terhadap total realisasi belanja pemerintah di Bali tahun 2016. Penurunan persentase realisasi belanja ini, disebabkan oleh penurunan pagu anggaran APBN P tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sejalan dengan perlambatan penerimaan pemerintah, adanya penundaan pencairan DAU untuk provinsi Bali dan 3 kabupaten/kota sejak September 2016 dan melambatnya penerimaan pendapatan asli daerah di 9 kabupaten/kota.

2.2 Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2016

Realisasi pendapatan pemerintah daerah menunjukkan perlambatan di tahun 2016 dibandingkan realisasi pada tahun 2015. Sementara itu, realisasi belanja justru menunjukkan peningkatan untuk periode yang sama. Serapan pendapatan di 2016 tercatat sebesar

Rp 5,25 triliun atau sebesar 100,59% terhadap pagu APBD P 2016. Capaian ini, lebih rendah bila dibandingkan dengan serapan pendapatan pada 2015 yang tercatat sebesar 101,37%. Sementara itu, realisasi belanja di tahun 2016 tercatat sebesar Rp 5,42 triliun atau sebesar 93,2% dari pagu anggaran, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja di tahun 2015 yang terserap sebesar 89,90%.

Secara nominal, jumlah pendapatan yang terserap pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015. Realisasi pendapatan di 2016 tercatat meningkat sebesar 5,67% (yoy), dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 4,97 triliun. Bila dibandingkan dengan triwulan III-2016 yang berhasil menghimpun pendapatan sebesar Rp 3,72 triliun, serapan pendapatan daerah di akhir tahun 2016 (triwulan IV), mengalami peningkatan sebesar 41,05%.

Tabel 2.6 Pagu & Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	PAGU APBD P 2015	REALISASI APBD TAHUN 2015	%	PAGU APBD 2016	PAGU APBD P 2016	REALISASI APBD TAHUN 2016*)	%
PENDAPATAN DAERAH	4.901	4.968	101,37	5.376	5.218	5.249	100,59
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	2.988	3.041	101,78	3.379	3.172	3.041	95,88
PENDAPATAN TRANSFER	1.134	1.070	94,39	1.182	1.752	1.867	106,56
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	779	856	109,95	815	294	341	115,82
BELANJA DAERAH	5.561	4.999	89,90	5.705	5.816	5.421	93,20
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.824	3.483	91,08	4.029	4.143	3.858	93,11
BELANJA LANGSUNG	1.737	1.516	87,28	1.676	1.673	1.563	93,43
SURPLUS/(DEFISIT)	-660	-31		-329	-598	-172	

*) angka sementara, belum audit

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi Bali tercatat mengalami defisit di 2016, yaitu sebesar Rp 172 miliar. Kondisi yang mencatatkan defisit ini, serupa dengan pola belanja pemerintah tahun 2015 yang juga mengalami defisit. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, defisit baru terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2015 dan 2016). Nilai nominal defisit di 2016 yang sebesar Rp 172 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 31 miliar.

2.2.1. Pagu Pendapatan Tahun 2016

Total pagu Anggaran pendapatan Pemprov Bali tahun 2016 dalam APBD perubahan tercatat sebesar Rp 5,22 triliun atau meningkat sebesar 6,47% (yoy) dibandingkan APBD-P tahun 2015. Peningkatan tertinggi, berasal dari pendapatan transfer (dana perimbangan) yang meningkat 54,54% (yoy), yang terutama didorong oleh peningkatan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan *share* anggaran terbesar dipergunakan untuk anggaran untuk biaya

operasional sekolah (BOS). Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya dana alokasi khusus (DAK) untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sejak tahun 2016, anggaran BOS untuk SMA/SMK dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi, setelah sebelumnya dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Peningkatan juga terjadi untuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meningkat sebesar 6,47% (yoy). Sedangkan, pagu komponen lain-lain pendapatan yang sah pada APBD-P tahun 2016 turun sebesar 62,23%, dibanding APBD 2015, terutama disebabkan oleh turunnya pagu anggaran dana penyesuaian dan otonomi khusus yang dialihkan ke pagu DAK.

2.2.1.1. Penyerapan Pendapatan APBD Provinsi Bali Tahun 2016

Penyerapan pendapatan Provinsi Bali di 2016, tercatat sebesar 100,59% dari pagu pendapatan APBD P. Capaian ini, lebih rendah dibandingkan

Tabel 2.7 Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	PAGU APBD P 2015	REALISASI APBD TAHUN 2015	PERSENTASE REALISASI (%)	PAGU APBD 2016	PAGU APBD P 2016	REALISASI APBD TAHUN 2016*)	PERSENTASE REALISASI (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI (%)
PENDAPATAN DAERAH	4.901	4.968	101,37	5.376	5.218	5.249	100,59	5,66
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	2.988	3.041	101,78	3.379	3.172	3.041	95,88	-
- Pendapatan Pajak Daerah	2.666	2.571	96,42	3.050	2.712	2.593	95,61	0,86
- Retribusi Daerah	46	60	131,30	47	50	64	126,95	6,69
- Hsl Pengelolaan. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	105	105	100,11	108	173	172	99,69	63,59
- Lain-Lain PAD yg Sah	171	305	178,57	174	236	212	89,64	-30,54
PENDAPATAN TRANSFER	1.134	1.070	94,39	1.182	1.752	1.867	106,56	74,45
-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	168	104	62,07	154	198	172	86,97	65,22
- Dana Alokasi Umum (DAU)	832	832	100,00	850	696	850	122,11	2,23
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	134	134	100,00	178	858	845	98,45	528,17
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	779	856	109,95	815	294	341	115,82	-60,21
- Pendapatan Hibah	5	5	100,01	5	5	5	100,00	2,93
- Dana Penyesuaian & otonomi khusus	525	526	100,05	526	5	5	100,00	-99,05
- Bantuan Keuangan dr Prov atau Pemda lain	249	326	131,03	284	284	331	116,38	1,47

*) angka sementara, belum audit

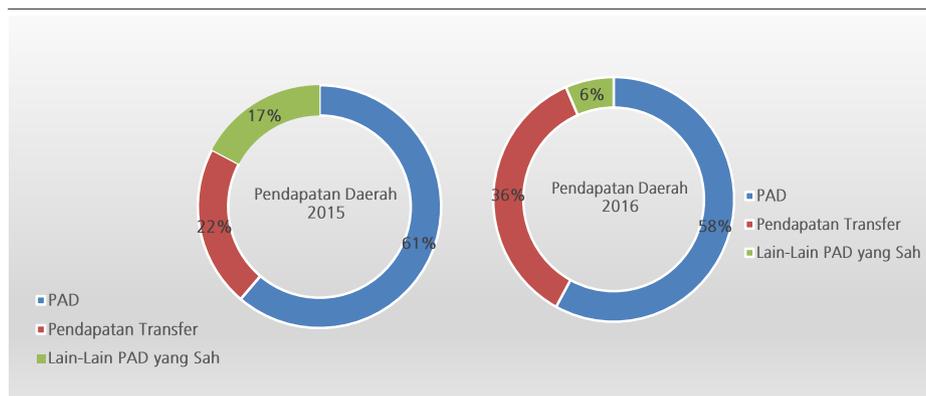
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

dengan penyerapan pendapatan tahun 2015 yang tercatat sebesar 101,37%. Realisasi penyerapan pendapatan di tahun 2016, juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata realisasi penyerapan pendapatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang mencapai 105,25%. Rendahnya persentase pencapaian realisasi pendapatan ini, terutama disebabkan oleh menurunnya persentase realisasi penerimaan khususnya untuk komponen Pendapatan Asli Daerah yang tercatat hanya sebesar 95,88%, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 101,78%. Sementara dua komponen lainnya yaitu pendapatan transfer (dana perimbangan) dan lain-lain pendapatan yang sah tercatat tetap menunjukkan peningkatan realisasi di tahun 2016. Secara nominal, realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2016 tetap lebih tinggi dibandingkan 2015, dengan pertumbuhan sebesar 5,67% (yoy). Peningkatan nominal pendapatan daerah, terutama didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan dari komponen dana transfer. Sementara itu di sisi yang lain, komponen PAD cenderung tetap sedangkan komponen lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan.

Penurunan persentase realisasi PAD, merupakan penyebab utama menurunnya persentase realisasi penyerapan pendapatan daerah di tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan, sumber utama pendapatan daerah untuk Provinsi Bali berasal dari komponen

ini, dengan pangsa mencapai 57,94% terhadap total penerimaan daerah tahun 2016. Pangsa ini lebih rendah, bila dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang sebesar 61,22%. Penurunan pangsa ini, terutama disebabkan oleh penurunan nominal realisasi penerimaan untuk sub komponen lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, sub komponen PAD yang lain, tetap menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan meskipun cenderung melambat. Peningkatan sub komponen tertinggi untuk PAD, terjadi pada sub komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang meningkat sebesar 63,59% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan ini, terutama dikontribusikan oleh adanya peningkatan realisasi pendapatan dari laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali di perusahaan milik daerah (BUMD).

Komponen kedua yang memiliki pangsa signifikan terhadap pendapatan daerah adalah komponen pendapatan transfer atau dana perimbangan. Pangsa realisasi komponen pendapatan transfer terhadap realisasi total pendapatan daerah di 2016 sebesar 35,57%, lebih tinggi dibandingkan pangsa tahun lalu yang sebesar 21,54%. Peningkatan ini, terutama didorong oleh meningkatnya pagu anggaran DAK dalam rangka pengelolaan BOS yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, komponen yang ketiga dari PAD yaitu komponen lain-lain pendapatan yang sah, pangsa realisasinya



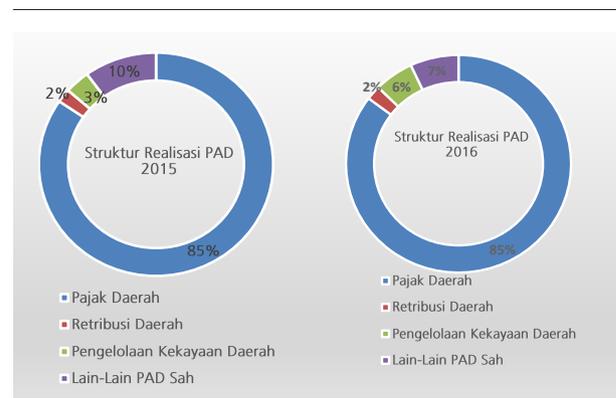
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Grafik 2.1 Pangsa Realisasi Anggaran Komponen Pendapatan Daerah

terhadap realisasi PAD tercatat sebesar 6,49%, lebih rendah dibandingkan pangsa tahun 2015 yang sebesar 17,24%. Penurunan pangsa ini, terutama disebabkan oleh adanya penurunan alokasi anggaran dana penyesuaian dan otonomi khusus, karena dialihkan untuk DAK di 2016.

Berdasarkan struktur komponen PAD tahun 2016, realisasi pendapatan pajak daerah merupakan sub komponen PAD dengan pangsa terbesar, tercatat 85% terhadap realisasi PAD. Sub komponen terbesar kedua adalah lain-lain PAD yang sah (7%), selanjutnya pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (6,11%) dan terakhir adalah retribusi daerah (2%). Sepanjang tahun 2016, realisasi penerimaan pajak daerah menunjukkan pertumbuhan yang melambat, tercatat hanya tumbuh sebesar 0,86% (yoy). Pertumbuhan ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 yang tercatat sebesar 2,13% (yoy). Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab realisasi pendapatan daerah di tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pajak daerah tercatat sebesar 95,61%, lebih rendah dibandingkan dengan 2015 yang mencapai 96,42%. Menurunnya realisasi pendapatan pajak daerah ini, terutama disebabkan oleh semakin menurunnya penjualan kendaraan baru sebagai kontributor penerimaan dalam bentuk pajak kendaraan baru (PKB). Penjualan kendaraan baru di 2016 berkontraksi sebesar -9,63 (yoy), lebih dalam dibandingkan 2015 yang berkontraksi sebesar -9,25% (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan oleh masyarakat yang masih memfokuskan untuk pemenuhan kebutuhan primer; adanya kecenderungan untuk menunda pembelian kendaraan baru; persaingan transportasi wisata yang makin ketat serta moratorium penambangan pasir, menjadi penyebab menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, adanya pembebasan denda untuk PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku sejak 20 Juni 2016, menjadi penyebab perlambatan realisasi

pendapatan pajak daerah. Seiring dengan kondisi tersebut, turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) sepanjang tahun 2016, juga berdampak pada turunnya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang diterima oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, penurunan pajak daerah ini, dapat sedikit tertahan oleh kenaikan sub komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Grafik 2.2 Struktur Realisasi PAD

Komponen Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), penyumbang utama pendapatan di komponen ini adalah DAU, dengan pangsa sebesar 45,54% terhadap pendapatan transfer 2016, diikuti oleh DAK (pangsa 45,25%) dan Dana Bagi Hasil (pangsa 9,21%). Realisasi penyerapan komponen pendapatan transfer pada 2016, tercatat sebesar 106,56% terhadap pagu APBD P 2016. Capaian ini, lebih rendah dibandingkan 2015, yang tercatat sebesar 94,39%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi penerimaan komponen pendapatan transfer pada 2016, tetap menunjukkan peningkatan signifikan yaitu tumbuh sebesar 74,45% (yoy). Peningkatan realisasi nominal komponen ini, terutama didorong oleh peningkatan realisasi nominal DAK, yang tercatat tumbuh sebesar 528,17% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian pengelolaan dana BOS SMA/SMK yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota menjadi pemerintah daerah di tingkat provinsi sejak tahun 2016. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan SMA/SMK saat ini berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Adapun alokasi anggaran dana BOS untuk tahun 2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp 759 miliar. Peningkatan realisasi dana perimbangan tahun 2016, juga didorong oleh peningkatan nominal realisasi dana bagi hasil pajak yang tumbuh sebesar 65,22% (yoy). Sementara itu, nominal realisasi DAU meskipun sejak September 2016 mengalami penundaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan RI, namun pembayarannya tetap dapat teralisasi di akhir periode tahun 2016, sehingga dapat tumbuh sebesar 2,23% (yoy).

Realisasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, secara nominal tercatat mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016, nominal realisasi untuk penerimaan komponen ini tercatat sebesar Rp 341 miliar atau dengan persentase realisasi terhadap pagu APBD P 2016 tercatat sebesar 115,82%. Meskipun realisasi terhadap pagu di 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, namun secara

nominal realisasi justru mengalami penurunan yang signifikan sebesar -60,21% (yoy). Penurunan ini, terutama disebabkan oleh adanya penurunan realisasi pendapatan dana penyesuaian otonomi khusus.

2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Tahun 2016

Pada tahun 2016, pagu anggaran belanja di APBD P Bali tercatat sebesar Rp 5,816 triliun atau meningkat sebesar 4,59% (yoy) dibandingkan pagu anggaran dalam APBD-P tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 5,56 triliun. Peningkatan tertinggi bersumber dari komponen belanja tidak langsung, yang meningkat sebesar 8,34% (yoy) menjadi Rp 4,14 triliun, lebih tinggi dibandingkan pagu APBD P 2015 tercatat sebesar Rp 3,82 triliun. Peningkatan komponen ini, terutama didorong oleh meningkatnya pagu anggaran untuk sub komponen belanja hibah dan sub komponen belanja bantuan keuangan. Sedangkan pagu anggaran untuk sub komponen lainnya dalam belanja langsung justru mengalami penurunan di tahun 2016, dibandingkan tahun 2015.

Tabel 2.8 Pagu dan Realisasi APBD P Provinsi Bali 2015-2016

URAIAN	PAGU APBD P 2015	REALISASI APBD TAHUN 2015	PERSENTASE REALISASI (%)	PAGU APBD 2016	PAGU APBD P 2016	REALISASI APBD TAHUN 2016*)	PERSENTASE REALISASI (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI (%)
BELANJA DAERAH	5.561	4.999	89,90	5.705	5.816	5.421	93,20	8,44
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.824	3.483	91,08	4.029	4.143	3.858	93,11	10,75
- Belanja Pegawai	895	734	81,94	941	844	754	89,34	2,79
- Belanja Subsidi	10	10	98,20	10	10	10	99,90	1,73
- Belanja Hibah	831	809	97,37	980	1.166	1.117	95,81	38,00
- Belanja Bantuan Sosial	159	152	95,23	180	158	156	98,33	2,67
- Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemda	1.217	1.088	89,40	1.150	1.159	1.026	88,52	-5,68
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota/Desa dan Partai Politik	700	690	98,69	753	801	795	99,15	15,08
- Belanja Tidak Terduga	12	0	1,60	15	4	0	4,52	1,59
BELANJA LANGSUNG	1.737	1.516	87,28	1.676	1.673	1.563	93,43	3,13
- Belanja Pegawai	91	84	92,36	103	102	97	94,61	15,37
- Belanja Barang dan Jasa	1.010	870	86,11	769	803	736	91,63	-15,41
- Belanja Modal	636	562	88,43	805	768	731	95,16	30,00
SURPLUS/(DEFISIT)	-660	-31		-329	-598	-172		

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Sementara itu, pagu anggaran belanja langsung justru mengalami penurunan di APBD P 2016 sebesar -3,63% (yoy), dibandingkan pagu anggaran APBD-P tahun 2015. Pagu anggaran belanja langsung APBD P 2016 tercatat sebesar Rp 1,673 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu anggaran APBD P 2015 yang sebesar Rp 1,737 triliun. Penurunan ini, terutama disebabkan oleh menurunnya pagu anggaran belanja barang dan jasa di tahun 2016 yang sebesar -20,51% (yoy). Sementara sub komponen lainnya, tetap menunjukkan peningkatan khususnya belanja modal yang tumbuh signifikan sebesar 20,81% (yoy). Peningkatan pagu belanja modal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk berfokus pada pengembangan infrastruktur untuk tahun 2016, antara lain berupa pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan rumah sakit Indera serta rumah sakit provinsi Bali Mandara.

Selanjutnya, komposisi pagu anggaran belanja tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pola historis beberapa tahun terakhir. Pagu anggaran belanja pada APBD P 2016 masih didominasi oleh belanja tidak langsung, dengan pangsa sebesar 71,23%, meningkat dibandingkan APBD P tahun 2015 dengan pangsa 68,77%. Sementara itu, porsi pagu anggaran belanja langsung dalam APBD P tahun 2016 tercatat sebesar 28,77%, lebih rendah dibandingkan pangsa di APBD P tahun 2015 sebesar 31,23%.

Perkembangan realisasi belanja pemerintah Provinsi Bali tahun 2016, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: penundaan pencairan anggaran DAU dari Kementerian Keuangan sejak periode September-Desember 2016, rendahnya persentase realisasi pendapatan daerah dari pagu anggaran APBD P 2016 dan fokus pemerintah untuk mendorong pengembangan infrastruktur. Realisasi belanja Provinsi Bali di tahun 2016, tercatat sebesar Rp 5,42 triliun atau dengan persentase 93,2% dari pagu APBD P 2016. Pencapaian realisasi belanja ini lebih

tinggi, baik secara persentase maupun secara nominal dibandingkan realisasi tahun 2015. Secara nominal, realisasi belanja pemerintah tumbuh sebesar 8,44% (yoy) di tahun 2016. Sedangkan persentase realisasi tercatat sebesar 93,20%, lebih tinggi dibandingkan dengan 89,90% di tahun 2015. Meningkatnya realisasi belanja ini, terjadi baik pada realisasi belanja langsung maupun realisasi belanja tidak langsung.

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung di tahun 2016 mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun persentase realisasi terhadap pagu anggaran APBD P 2016, dibanding tahun 2015. Secara nominal, realisasi belanja tidak langsung Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada tahun 2016 tercatat sebesar 3,86 triliun atau tumbuh sebesar 10,75% (yoy), dibandingkan tahun 2015. Peningkatan nominal realisasi ini, didorong oleh peningkatan yang signifikan untuk sub komponen belanja hibah dan sub komponen belanja bantuan keuangan yang masing-masing tumbuh sebesar 38% (yoy) dan 15,08% (yoy). Sementara itu, persentase realisasi belanja tidak langsung di 2016 juga tercatat lebih tinggi yaitu sebesar 93,11% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 91,08%. Peningkatan realisasi belanja tidak langsung, didorong oleh peningkatan persentase realisasi sebagian besar sub komponen penyusunnya. Meskipun demikian terdapat dua sub komponen yang realisasi persentasenya lebih rendah di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sub komponen belanja hibah dan belanja bagi hasil. Apabila ditinjau dari komponen pembentuknya, belanja tidak langsung terutama dipergunakan untuk kegiatan belanja hibah, dan belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemda dan belanja bantuan keuangan serta belanja pegawai, dengan pangsa masing-masing sebesar 28,95%; 26,60%; 20,60% dan 19,55% dari realisasi komponen belanja tidak langsung 2016.

Belanja hibah merupakan sub komponen yang

memiliki pangsa terbesar terhadap realisasi komponen belanja tidak langsung di 2016. Secara nominal, realisasi sub komponen ini tercatat sebesar Rp 1,12 triliun di 2016, lebih tinggi dibandingkan nominal realisasi pada 2015 yang sebesar Rp 809 miliar. Meskipun demikian, persentase realisasi sub komponen ini di 2016 yang mencapai 95,81%, masih lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi di 2015 yang sebesar 97,37%. Sementara itu, realisasi komponen belanja bagi hasil (dengan pangsa terbesar kedua), secara nominal mengalami penurunan sebesar -5,68% (yoy) dan secara realisasi persentase juga di tahun 2016 lebih rendah dibandingkan 2015.

Perkembangan komponen belanja langsung di tahun 2016, menunjukkan peningkatan nominal realisasi dan penyerapan anggaran belanja dibandingkan tahun 2015. Nominal realisasi belanja langsung tercatat sebesar Rp 1,56 triliun di 2016, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Rp 1,52 triliun di tahun 2015. Peningkatan persentase realisasi belanja, terjadi pada semua jenis sub komponen pembentuk belanja langsung, baik belanja pegawai, belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Peningkatan juga terjadi pada nominal realisasi dari sub komponen pembentuk belanja langsung, kecuali belanja barang dan jasa yang tetap mengalami penurunan.

Perkembangan realisasi belanja modal, secara nominal di tahun 2016 tercatat sebesar Rp 731 miliar, meningkat sebesar 30% (yoy), dibandingkan nominal realisasi di tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 562 miliar. Persentase realisasi belanja modal juga menunjukkan peningkatan di tahun 2016, yang mencapai 95,16% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 88,43%. Peningkatan realisasi belanja modal di tahun 2016, didorong oleh upaya Pemerintah Provinsi untuk mempercepat proses pengadaan di awal tahun; upaya untuk mengejar realisasi pembangunan beberapa proyek infrastruktur

fisik merupakan faktor pendorong meningkatnya serapan anggaran di sub komponen belanja modal. Realisasi belanja modal antara lain dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, drainase, gedung termasuk penyelesaian pembangunan rumah sakit Indera dan rumah sakit provinsi Bali Mandara. Sub komponen lainnya yang menunjukkan peningkatan nominal realisasi maupun persentase realisasi belanja adalah belanja pegawai. Realisasi nominal sub komponen ini, tercatat sebesar Rp 97 miliar atau persentase realisasi sebesar 94,61% dari pagu APBD P 2016. Capaian ini, lebih tinggi dibandingkan realisasi penyerapan 2015 yang tercatat sebesar 92,36% atau dengan nominal sebesar Rp 84 miliar.

Realisasi belanja barang dan jasa di 2016 tercatat sebesar Rp 736 miliar atau terealisasi sebesar 91,63% dari pagu anggaran APBD P 2016. Persentase realisasi ini, meningkat dibandingkan periode tahun 2015 yang sebesar 86,11%. Meskipun demikian, nominal realisasi justru menunjukkan penurunan sebesar -15,41% (yoy) dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 870 miliar. Penurunan nominal ini, disebabkan oleh terjadinya penurunan pagu anggaran di 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3. Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016

2.3.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016

Pagu anggaran pendapatan dalam APBD P untuk 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, di tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan pagu anggaran di APBD P tahun 2015. Seiring dengan telah disetujuinya dan ditetapkannya APBD perubahan tahun 2016 untuk 9 kabupaten/kota, mendorong terjadinya peningkatan pagu anggaran pendapatan di tahun 2016 yaitu dari Rp 15,68 triliun sebelum perubahan menjadi menjadi Rp 16,11 triliun dalam APBD-P yang ditetapkan dan disetujui pada 9 kabupaten/kota. Sementara itu, bila dibandingkan

Tabel 2.9 Pagu APBD P Untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali 2015-2016

Kabupaten	Pagu APBD P 2015 (Rp Miliar)				Pagu APBD P 2016 (Rp Miliar)				Perubahan 2015-2016 (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	644	710	333	1.687	740	847	296	1.883	14,94	19,28	-11,33	11,58
Kabupaten Tabanan	264	823	511	1.599	305	1.225	385	1.915	15,50	48,79	-24,73	19,77
Kabupaten Klungkung	100	559	220	879	122	715	231	1.068	22,20	27,93	4,93	21,51
Kabupaten Karangasem	232	727	425	1.385	229	930	295	1.455	-1,23	27,88	-30,51	5,07
Kabupaten Gianyar	409	685	340	1.433	507	968	210	1.684	23,89	41,34	-38,19	17,51
Kabupaten Badung	2.832	359	436	3.628	3.195	512	241	3.948	12,83	42,45	-44,83	8,83
Kabupaten Buleleng	265	994	648	1.906	316	1.450	451	2.216	19,24	45,91	-30,41	16,28
Kabupaten Bangli	88	575	218	881	103	849	193	1.144	17,05	47,63	-11,62	29,92
Kabupaten Jemberana	80	583	234	897	101	751	232	1.084	25,93	28,80	-0,78	20,84
Total	4.914	6.015	3.365	14.294	5.618	8.246	2.533	16.397	14,33	37,09	-24,74	14,71

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

dengan APBD P tahun 2015, maka pagu anggaran pendapatan daerah untuk seluruh APBD-P kabupaten/kota tahun 2016 meningkat sebesar 12,72% (yoy). Bila ditinjau dari sisi jenisnya, peningkatan pagu tertinggi adalah untuk komponen pendapatan transfer, yang meningkat sebesar 37,09% (yoy). Sementara pagu PAD meningkat sebesar 14,33% (yoy), sedangkan lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami pagu sebesar -24,74% (yoy).

Bila dilihat dari daerahnya, peningkatan pagu anggaran tertinggi dalam APBD Perubahan terjadi Kabupaten Bangli, yang meningkat sebesar 29,92 (yoy), dengan nilai nominal tercatat sebesar Rp 1,14 triliun. Sedangkan peningkatan pagu anggaran pendapatan terendah setelah dilakukan perubahan, tercatat di Kabupaten Karangasem, yang hanya

tumbuh sebesar 5,07% (yoy), dengan nilai nominal sebesar Rp 1,46 triliun. Selanjutnya, daerah dengan pagu anggaran pendapatan tertinggi dalam APBD P di tahun 2016, tercatat adalah Kabupaten Badung sebesar Rp 3,95 triliun, atau dengan pangsa mencapai 24,08% dari total pagu pendapatan APBD P tahun 2016 dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Bali. Sementara itu, daerah dengan pagu anggaran pendapatan terendah dalam APBD P 2016 adalah Kabupaten Klungkung, dengan nominal tercatat sebesar Rp 1,07 triliun dan pangsa sebesar 6,51% dari total pagu pendapatan APBD P seluruh kabupaten/kota di 2016.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2016, untuk 9 kabupaten/kota secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar 8,29% (yoy) dibandingkan periode tahun 2015 yaitu dari Rp 14,60

Tabel 2.10 Realisasi Nominal Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2015-2016

Kabupaten	Realisasi Tahun 2015 (Rp Miliar)				Realisasi Tahun 2016 (Rp Miliar)				Growth Tahunan (yoy) 2015-2016 (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	699	693	336	1.728	834	878	258	1.970	19,40	26,68	-23,23	14,03
Kabupaten Tabanan	301	816	499	1.616	318	1.102	375	1.796	5,73	35,12	-24,85	11,12
Kabupaten Klungkung	120	542	251	913	134	700	177	1.011	12,05	29,06	-29,44	10,73
Kabupaten Karangasem	243	706	418	1.368	233	938	222	1.393	-4,33	32,73	-46,82	1,82
Kabupaten Gianyar	457	674	397	1.528	530	906	193	1.629	15,82	34,50	-51,30	6,61
Kabupaten Badung	3.001	332	401	3.735	3.341	512	157	4.011	11,32	54,25	-60,78	7,39
Kabupaten Buleleng	293	983	661	1.938	282	1.306	376	1.963	-3,78	32,77	-43,20	1,31
Kabupaten Bangli	88	569	216	873	98	713	183	994	11,12	25,23	-15,41	13,74
Kabupaten Jemberana	98	577	228	904	115	707	224	1.046	16,68	22,44	-1,65	15,74
Total	5.300	5.893	3.409	14.603	5.884	7.762	2.167	15.813	11,02	31,70	-36,44	8,29

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

triliun (2015) menjadi Rp 15,81 triliun (2016). Adapun daerah dengan realisasi nominal pendapatan tertinggi diraih oleh Kabupaten Badung, yang tercatat sebesar Rp 4,01 triliun meningkat sebesar 7,39% (yoy). Peningkatan ini, terutama didorong oleh tingginya realisasi PAD yang tumbuh mencapai 54,25% (yoy) pada tahun 2016. Sementara itu, daerah dengan nilai nominal realisasi pendapatan terendah adalah Kabupaten Bangli, yang tercatat sebesar Rp 994 miliar, karena terbatasnya sumber pendapatan asli daerah. Seperti pada tahun 2015, Kabupaten Bangli juga menjadi daerah dengan pendapatan nominal terendah di Bali. Meskipun demikian, pertumbuhan nominal realisasi pendapatan Kabupaten Bangli di tahun 2016 masuk dalam tiga besar pertumbuhan pendapatan tertinggi, yaitu tumbuh sebesar 13,74% (yoy).

Apabila ditinjau dari sisi pertumbuhan nominal realisasi pendapatan di tahun 2016, daerah dengan pertumbuhan pendapatan terendah adalah Kabupaten Buleleng yang hanya tumbuh sebesar 1,31% (yoy), dengan nilai nominal pendapatan tercatat sebesar Rp 1,96 triliun. Sementara itu, daerah dengan pertumbuhan nominal realisasi pendapatan

tertinggi adalah Kabupaten Jemberana, dengan pertumbuhan mencapai 15,74% (yoy) dan nilai nominal tercatat sebesar Rp 1,05 triliun.

Selanjutnya, realisasi penyerapan pendapatan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali terhadap pagu APBD P 2016 menunjukkan penurunan, yaitu dari 102,16% di 2015 menjadi 96,44% pada 2016. Jika memperhatikan realisasi penyerapan pendapatan setiap kabupaten/kota di 2016, hanya kota Denpasar, yang menunjukkan peningkatan persentase realisasi pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 102,40% (2015) menjadi 104,65% (2016). Sedangkan 8 daerah kabupaten/kota lainnya, menunjukkan penurunan persentase realisasi penyerapan pendapatan terhadap pagu APBD P 2016.

Daerah dengan persentase realisasi pendapatan tertinggi pada tahun 2016 adalah Kota Denpasar, dengan persentase mencapai 104,65%. Tingginya realisasi di Denpasar, didorong oleh tingginya realisasi PAD yang sebesar 112,69% dan pendapatan transfer yang mencapai 103,69%. Sedangkan daerah dengan persentase realisasi penyerapan pendapatan

Tabel 2.11 Persentase Realisasi Pendapatan Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Terhadap Pagu APBD P (2015-2016)

Kabupaten	Persentase Realisasi Terhadap Pagu APBD P 2015 (%)				Persentase Realisasi Terhadap Pagu APBD P 2016 (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	108,48	97,63	100,81	102,40	112,69	103,69	87,28	104,65
Kabupaten Tabanan	113,94	99,10	97,63	101,08	104,30	90,00	97,47	93,78
Kabupaten Klungkung	120,25	97,03	114,06	103,94	110,26	97,89	76,71	94,71
Kabupaten Karangasem	104,71	97,11	98,34	98,76	101,42	100,79	75,26	95,71
Kabupaten Gianyar	111,85	98,39	116,79	106,59	104,57	93,62	92,01	96,71
Kabupaten Badung	105,98	92,43	92,02	102,96	104,57	100,08	65,42	101,60
Kabupaten Buleleng	110,74	98,95	102,13	101,67	89,36	90,04	83,36	88,59
Kabupaten Bangli	99,70	99,06	99,33	99,19	94,66	84,02	95,07	86,84
Kabupaten Jemberana	122,68	98,98	97,68	100,76	113,68	94,10	96,83	96,50
Total	107,87	97,97	101,30	102,16	104,75	94,12	85,55	96,44

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

terendah di 2016 adalah Kabupaten Bangli, dengan persentase 86,84%, yang disebabkan menurunnya realisasi penyerapan pendapatan seluruh komponen pembentuk pendapatan daerah, bila dibandingkan tahun 2015.

2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016

Pagu anggaran belanja APBD P Kabupaten/Kota di tahun 2016, menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Sehubungan dengan adanya perubahan APBD tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota (APBD-P tahun 2016), mendorong peningkatan jumlah pagu anggaran belanja di tahun 2016, dari sebesar Rp 17,30 triliun (sebelum perubahan) menjadi Rp 18,32 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah pagu anggaran belanja kab/kota untuk tahun 2016 perubahan tercatat meningkat sebesar 15,62% (yoy). Peningkatan pagu anggaran belanja terjadi, baik untuk belanja tidak langsung (5,65% yoy) dan belanja tidak langsung (30,76% yoy). Seluruh kab/kota di Provinsi Bali, menunjukkan peningkatan pagu nominal belanja APBD P di tahun 2016, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Daerah dengan peningkatan pagu anggaran belanja tertinggi pada APBD P tahun 2016, dicapai oleh Kabupaten Bangli, dengan peningkatan mencapai 21,74% (yoy), sedangkan pertumbuhan

pagu terendah dialami oleh kabupaten Karangasem sebesar 4,39% (yoy).

Selanjutnya, daerah dengan nominal pagu belanja tertinggi di tahun 2016 tercatat dicapai oleh Kabupaten Badung, dengan nilai sebesar Rp 4,63 triliun meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 4,05 triliun. Sementara itu, daerah dengan nilai nominal pagu belanja terendah di APBD P 2016 adalah Kabupaten Jemberana, yang tercatat sebesar Rp 1,21 triliun, meningkat signifikan (19,18% yoy), dibandingkan tahun 2015 yang tercatat mencapai Rp 1,01 triliun.

Perkembangan realisasi belanja 9 Kabupaten/kota di Bali tahun 2016, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2015. Nominal realisasi belanja tahun 2016, untuk seluruh kabupaten/kota di Bali tercatat sebesar Rp 16,19 triliun, meningkat sebesar 14,94% (yoy) dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 14,09 triliun. Peningkatan realisasi belanja ini, terutama didorong oleh peningkatan yang signifikan pada realisasi belanja langsung, yang tumbuh sebesar 22,69% (yoy).

Daerah dengan pertumbuhan tertinggi untuk realisasi belanja di 2016, tercatat adalah Kabupaten Jemberana, yang tumbuh sebesar 22,57%, yaitu dari Rp 886 miliar di 2015 menjadi Rp 1,09 triliun di 2016.

Tabel 2.12 Pagu Belanja APBD P 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2015-2016

Kabupaten	Pagu APBD P 2015 (Rp Miliar)			Pagu APBD P 2016 (Rp Miliar)			Perubahan 2015-2016 (%)		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
Kota Denpasar	1.005	880	1.885	1.088	961	2.048	8,26	9,16	8,68
Kabupaten Tabanan	1.144	570	1.715	1.321	741	2.062	15,46	29,96	20,28
Kabupaten Klungkung	646	371	1.017	620	597	1.217	-3,96	60,74	19,66
Kabupaten Karangasem	953	551	1.503	948	622	1.569	-0,52	12,89	4,39
Kabupaten Gianyar	1.106	555	1.661	1.216	758	1.974	9,95	36,61	18,86
Kabupaten Badung	2.198	1.854	4.052	2.258	2.370	4.628	2,72	27,87	14,23
Kabupaten Buleleng	1.219	768	1.987	1.370	1.005	2.375	12,39	30,84	19,52
Kabupaten Bangli	681	328	1.009	684	545	1.229	0,34	66,17	21,74
Kabupaten Jemberana	595	417	1.012	581	631	1.212	-2,27	51,31	19,81
Total	9.546	6.294	15.840	10.085	8.230	18.315	5,65	30,76	15,62

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Tabel 2.13 Realisasi Belanja APBD P untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode 2015-2016

Kabupaten	Realisasi Tahun 2015 (Rp Miliar)			Realisasi Tahun 2016 (Rp Miliar)			Growth Tahunan (yoy) 2015-2016 (%)		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
Kota Denpasar	903	745	1.648	1.038	834	1.872	14,87	11,94	13,55
Kabupaten Tabanan	1.050	536	1.586	1.172	700	1.872	11,63	30,55	18,02
Kabupaten Klungkung	573	324	897	587	458	1.046	2,52	41,36	16,56
Kabupaten Karangasem	890	462	1.352	922	459	1.381	3,58	-0,58	2,16
Kabupaten Gianyar	936	568	1.504	1.094	683	1.777	16,84	20,16	18,09
Kabupaten Badung	1.909	1.537	3.447	2.102	1.915	4.017	10,08	24,58	16,55
Kabupaten Buleleng	1.121	745	1.866	1.274	815	2.089	13,68	9,38	11,96
Kabupaten Bangli	616	284	900	634	417	1.052	2,89	47,24	16,86
Kabupaten Jemberana	507	379	886	521	565	1.086	2,73	49,10	22,57
Total	8.506	5.580	14.086	9.344	6.846	16.190	9,85	22,69	14,94

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan belanja langsung (49,10%) dan belanja tidak langsung (2,73%). Peningkatan tersebut, didorong oleh upaya Pemerintah Kabupaten Jemberana untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur berupa pembangunan/perbaikan jalan, jembatan dan pembangunan gedung. Upaya yang ditempuh antara lain melalui percepatan kegiatan pengadaan dan lelang proyek sehingga mendorong peningkatan realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana di tahun 2016. Sementara itu, pertumbuhan realisasi belanja terendah dialami oleh Kabupaten Karangasem, yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,16%(yoy) dengan nilai nominal realisasi belanja tercatat sebesar Rp 1,38 triliun di 2016.

Persentase serapan realisasi belanja Pemda kab/kota di 2016, menunjukkan penurunan bila dibanding tahun 2015. Penurunan persentase realisasi belanja tahun 2016, ikut berkontribusi penurunan kinerja konsumsi pemerintah di tahun 2016 yang mengalami kontraksi. Kebijakan penundaan DAU sejak September 2016 untuk 3 kabupaten/kota di Bali dan penurunan realisasi pendapatan daerah, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi realisasi belanja kabupaten/kota di tahun 2016. Meskipun demikian, kebijakan beberapa pemerintah daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja, khususnya untuk belanja barang dan belanja modal, dapat menahan laju perlambatan realisasi belanja pemerintah daerah di kabupaten/kota di tahun 2016. Secara umum, persentase penyerapan anggaran belanja kab/kota

Tabel 2.14 Realisasi Persentase Belanja Terhadap Pagu APBD P untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode 2015-2016

Kabupaten	Persentase Realisasi Belanja Terhadap Pagu APBD P Tahun 2015 (%)			Persentase Realisasi Belanja Terhadap Pagu APBD P Tahun 2016 (%)		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
Kota Denpasar	89,91	84,65	87,46	95,40	86,81	91,37
Kabupaten Tabanan	91,78	93,96	92,51	88,73	94,39	90,77
Kabupaten Klungkung	88,74	87,32	88,22	94,72	76,79	85,93
Kabupaten Karangasem	93,40	83,91	89,92	97,24	73,90	88,00
Kabupaten Gianyar	84,68	102,36	90,58	89,99	90,02	90,00
Kabupaten Badung	86,86	82,94	85,07	93,09	80,80	86,80
Kabupaten Buleleng	92,00	96,98	93,92	93,05	81,07	87,98
Kabupaten Bangli	90,46	86,39	89,14	92,76	76,55	85,57
Kabupaten Jemberana	85,21	90,90	87,56	89,57	89,58	89,58
Total	89,11	88,65	88,93	92,65	83,19	88,40

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

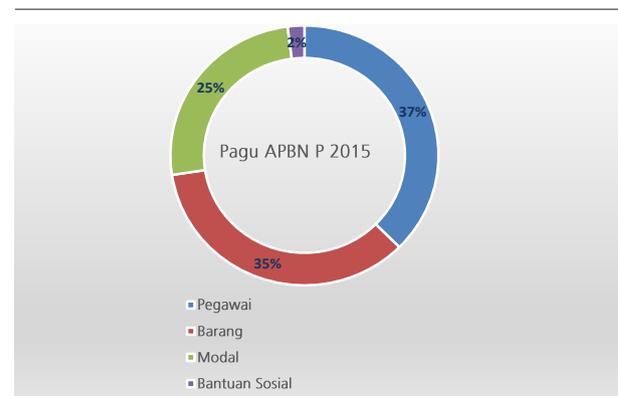
di tahun 2016 mencapai 88,40%, lebih rendah bila dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 88,93%. Adapun daerah dengan persentase penyerapan realisasi belanja tertinggi adalah Kota Denpasar, dengan persentase realisasi belanja mencapai 91,37% dari pagu APBD P 2016. Sementara Kab Bangli, merupakan kabupaten dengan persentase penyerapan realisasi belanja terendah, yang hanya mencapai 85,57% di 2016.

2.4. Realisasi APBN Provinsi Bali Tahun 2016

2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali Tahun 2016

Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bali di tahun 2016, mengalami penurunan sejalan dengan upaya pemerintah yang melakukan penghematan anggaran mengikuti perlambatan penerimaan negara khususnya dari penerimaan pajak dan cukai. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menekan defisit anggaran di tahun 2016, seiring dengan tidak tercapainya target penerimaan khususnya dari penerimaan pajak dan cukai. Tercatat, terjadi penurunan pagu anggaran dalam APBN P 2016 sebesar -5,90% (yoy), dari sebelumnya tercatat sebesar Rp 9,37 triliun (2015) menjadi Rp 8,82 triliun (2016). Terdapat perubahan pagu anggaran untuk tahun 2016 setelah disetujuinya perubahan pada APBN-P tahun 2016, sehingga terjadi peningkatan pagu anggaran dari sebelumnya sebesar Rp 8,43 triliun.

Pagu anggaran tertinggi dalam APBN perubahan, dialokasikan untuk belanja pegawai untuk kementerian/ lembaga vertikal yang beroperasi di Provinsi Bali. Berdasarkan pagu anggarannya, porsi anggaran terbesar untuk anggaran belanja APBN di Provinsi Bali untuk 2016 tercatat sebesar 43,01%, dengan nominal sebesar Rp 3,74 triliun. Pagu anggaran ini, lebih tinggi dibandingkan 2015 yang tercatat sebesar Rp 3,54 triliun dengan pangsa mencapai 37,49%. Sementara itu, pagu belanja barang memiliki pangsa 37,80% ditahun 2016, dengan nilai nominal tercatat mencapai Rp 3,33 triliun, pangsa dan nominal ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 35,11% dan nominal mencapai Rp 3,29 triliun. Sedangkan pagu anggaran belanja modal untuk tahun 2016 tercatat sebesar Rp 1,69 triliun, dengan pangsa sebesar 19,11%, lebih tinggi secara porsi maupun nominal dibanding 2015 yang

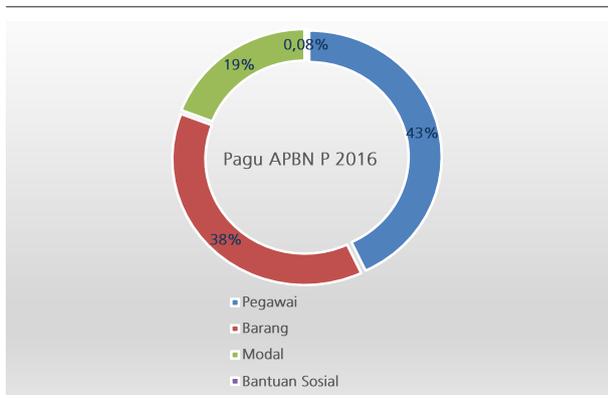


Grafik 2.3 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2016

Tabel 2.15 Pagu dan Realisasi APBN P Provinsi Bali Tahun 2015-2016

Jenis Belanja	2015			2016			Growth yoy (%)	
	Pagu APBN P (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	Pagu APBN P (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
Pegawai	3.513	3.543	100,86	3.792	3.741	98,65	7,96	5,60
Barang	3.290	2.773	84,29	3.334	2.834	85,01	1,33	2,20
Modal	2.380	2.065	86,78	1.685	1.376	81,67	-29,19	-33,36
Bantuan Sosial	188	182	96,76	7	7	98,28	-96,24	-96,18
Total	9.370	8.563	91,38	8.818	7.958	90,25	-5,90	-7,06

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali



Grafik 2.4 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2015

masing-masing tercatat Rp 2,38 triliun dan 25,39%. Penurunan pagu anggaran juga terjadi untuk komponen bantuan sosial dari sebelumnya sebesar Rp 188,42 miliar (2015), turun menjadi Rp 7,08 miliar (2016).

Perkembangan Realisasi belanja APBN P untuk wilayah Provinsi Bali di 2016, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015 baik untuk nominal maupun persentase realisasi terhadap pagu. Adanya perlambatan penerimaan negara khususnya dari pajak dan cukai dan upaya pemerintah untuk mengelola defisit anggaran pada level yang ditetapkan bersama dengan DPR RI (2,7%) merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja realisasi belanja APBN di tahun 2016. Persentase realisasi belanja di tahun 2016 tercatat sebesar 90,25% terhadap pagu APBN 2016, lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi 2015 yang sebesar 91,38%. Kondisi ini yang menyebabkan penurunan kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2016 yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh lebih tinggi.

Secara nominal, serapan realisasi belanja APBN pada 2016 tercatat sebesar Rp 7,96 triliun, menurun sebesar -7,06% (yoy) dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 8,56 triliun. Penurunan serapan belanja yang signifikan tersebut, terutama disebabkan oleh

menurunnya realisasi modal dan bantuan sosial masing-masing sebesar -33,36% (yoy) dan -96,18% (yoy), yang mengikuti penurunan pagu anggaran belanja di tahun 2016.

Selanjutnya, realisasi nominal komponen belanja pegawai di 2016 tercatat sebesar Rp 3,74 triliun atau dengan realisasi mencapai 98,65% dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan nominal 2015 yang sebesar Rp 3,54 triliun, atau dengan persentase realisasi mencapai 100,86%. Tingginya realisasi nominal belanja pegawai tahun 2016, sebagai dampak akumulasi oleh adanya kebijakan pembayaran THR (gaji ke-14) pada minggu ke- 4 Juni 2016, yang baru dilakukan di 2016.

Sementara itu, nominal realisasi belanja barang juga menunjukkan peningkatan di 2016, dengan nominal tercatat sebesar Rp 2,83 triliun atau meningkat sebesar 2,2% (yoy), dibandingkan nominal realisasi 2015 yang mencapai Rp 2,77 triliun. Persentase realisasi terhadap pagu juga menunjukkan peningkatan untuk komponen ini, yaitu menjadi sebesar 85,01% (2016) dari sebelumnya sebesar 84,29%. Sementara itu, belanja modal sebagai stimulus dalam perekonomian dan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan konektivitas antar daerah menunjukkan penurunan realisasi nominal dan persentase di tahun 2016, karena melambatnya pendapatan negara. Realisasi belanja modal APBN 2016, tercatat sebesar Rp 1,34 triliun, turun sebesar 33,36% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 2,07 triliun. Persentase realisasi serapan belanja modal pada tahun 2016 juga mengalami penurunan yang mencapai 81,67% terhadap pagu anggaran, dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 86,78%. Sementara belanja bantuan sosial mengalami penurunan pada 2016, dibandingkan 2015, baik dari sisi nominal realisasi maupun persentase realisasi terhadap pagu.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III



Foto oleh: I Gede Agustin Premana

Merta Buana, Karangasem

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH



3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

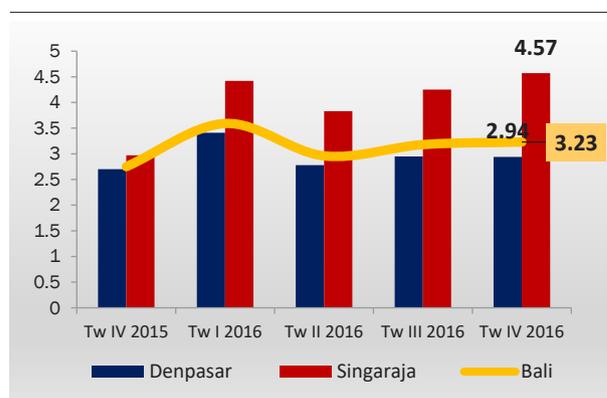
Perkembangan Inflasi Triwulan IV – 2016

Berbeda dengan inflasi nasional, Inflasi Provinsi Bali pada triwulan IV 2016 tercatat lebih tinggi. Inflasi Bali di triwulan IV 2016 tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional di periode yang sama yang tercatat sebesar 3,02% (yoy). Inflasi Bali di periode triwulan laporan juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,75% (yoy). Pencapaian ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,18% (yoy). Inflasi pada periode laporan terutama disumbang oleh komponen *administered prices* dan *volatile food*, sementara inflasi inti tercatat relatif rendah. Inflasi IHK Bali secara keseluruhan tahun 2016 masih berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia serta sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar $4\pm 1\%$ (yoy).

Peningkatan inflasi Bali pada triwulan IV 2016 terutama disebabkan oleh inflasi komoditas pada kelompok pengeluaran bahan makanan serta transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Berdasarkan kota pembentuknya, inflasi tertinggi terjadi di Kota Singaraja yang tercatat sebesar 4,57% (yoy) yang berada relatif jauh di atas inflasi nasional (3,02%) dan Kota Denpasar yang tercatat sebesar 2,94% (yoy).

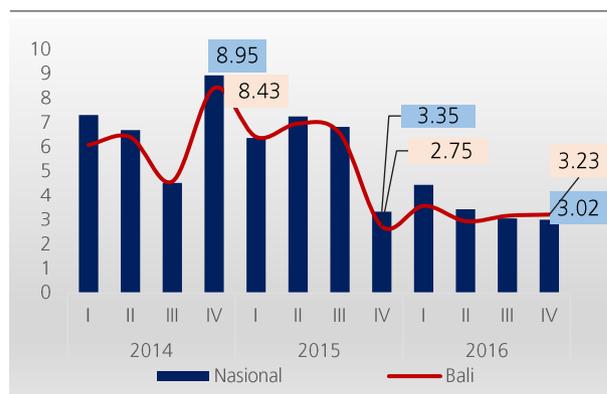
Secara bulanan, inflasi Bali masih searah dengan pola selama 3 tahun terakhir dan tercatat relatif lebih rendah dan stabil dibandingkan dengan inflasi keseluruhan tahun di 3 tahun sebelumnya. Inflasi Bali pada Desember 2016 tercatat sebesar 0,68% (mtm), dengan rincian kota sampel inflasi terdiri atas Denpasar sebesar 0,69% (mtm), dan Singaraja sebesar 0,63% (mtm). Berdasarkan inflasi triwulan IV 2016 dan hasil *tracking* pergerakan harga di tingkat konsumen, baik melalui Survei Pemantauan Harga (SPH) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan PIHPS Provinsi Bali "SiGapura", inflasi Bali

pada triwulan I 2017 diperkirakan akan melandai. Perkiraan ini seiring dengan telah berlalunya *peak season* liburan sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Namun demikian, inflasi Bali diperkirakan masih akan berada dalam level moderat berdasarkan perkembangan terkini faktor yang menjadi sumber tekanan inflasi di triwulan I 2017. Sumber tekanan antara lain: penyesuaian harga pada kelompok *administered prices*, masih berlanjutnya peningkatan harga cabai rawit merah, dan ekspektasi masyarakat seiring dengan kecenderungan peningkatan harga dan ketersediaan stok.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)

Perkembangan Inflasi Januari 2017

Pada bulan pertama tahun 2017, Provinsi Bali mengalami inflasi cukup tinggi, yaitu 1,46% (mtm) atau 4,13% (yoy). Pencapaian ini, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Nasional yang juga

mengalami inflasi sebesar 0,97% (mtm) atau 3,49% (yoy). Inflasi Bali di Januari 2017, juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi Bank Indonesia sebesar 0,54% (mtm). Tekanan inflasi tersebut antara lain disebabkan oleh berlanjutnya dampak anomali cuaca terhadap produksi cabai rawit merah dan berkurangnya stok daging ayam ras.

Secara spasial, kedua kota sampel inflasi Bali tercatat mengalami inflasi dengan rincian Kota Denpasar sebesar 1,39% (mtm) dan Kota Singaraja sebesar 1,79% (mtm). Untuk Denpasar, komoditas yang tercatat menjadi penyumbang utama inflasi Januari 2017 adalah biaya perpanjangan STNK (andil sebesar 0,23), cabai rawit (0,21), tarif pulsa ponsel (0,19), tarif listrik (0,16), dan mobil (0,11). Hampir serupa dengan Denpasar, komoditas yang menyumbang inflasi di Singaraja antara lain: cabai rawit (andil sebesar 0,81), tarif listrik (0,34), biaya perjalanan STNK (0,23), daging ayam ras (0,09), dan bensin (0,09).

Dibandingkan dengan kota sampel lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI), pencapaian inflasi Kota Denpasar dan Singaraja, tercatat berada pada level yang tinggi dengan inflasi tertinggi di Kota Pontianak sebesar 1,82% (mtm) dan inflasi terendah pada Kota Manokwari sebesar 0,09% (mtm).

Menanggapi tingginya inflasi di bulan Januari 2017 yang terjadi secara nasional dan merata di seluruh kota di Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Program kerja TPID akan difokuskan pada aspek produksi, distribusi, dan menjaga ekspektasi masyarakat. Program tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat dalam upaya menjaga stabilitas harga.

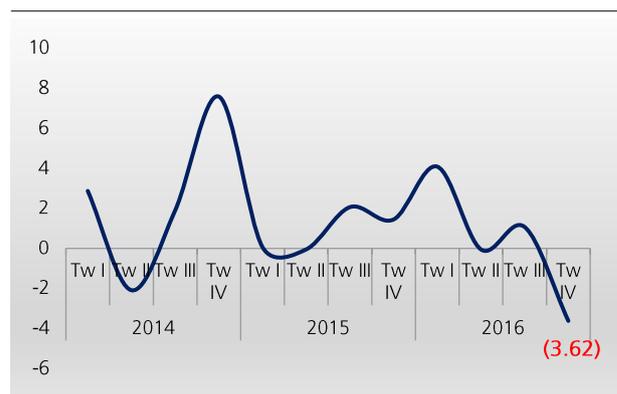
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Tekanan inflasi Bali pada keseluruhan tahun 2016, terutama didorong oleh kelompok pengeluaran makanan jadi 7,10% (yoy), sandang 5,92% (yoy), dan bahan makanan 5,42% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi pada seluruh kelompok barang dan jasa tersebut terjadi seiring dengan peningkatan permintaan. Hal tersebut khususnya terjadi di periode akhir tahun 2016 yang merupakan faktor musiman berupa *peak season* libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru 2017.

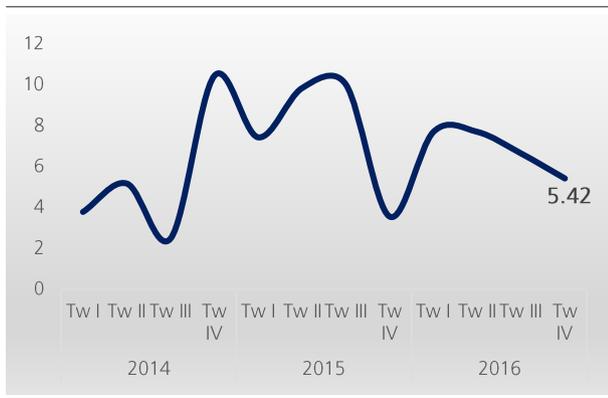
a) Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan pada triwulan IV 2016 mengalami deflasi sebesar -3,62% (qtq), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 1,07% (qtq). Secara tahunan, inflasi kelompok bahan makanan juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,42%(yoy). Tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan, terutama disebabkan peningkatan permintaan khususnya pada periode akhir tahun 2016, seiring *peak season* libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru 2017. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Bali pada November – Desember 2016, juga menyebabkan gangguan produksi bumbu-bumbuan (cabai rawit dan bawang merah) dan sayuran serta



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

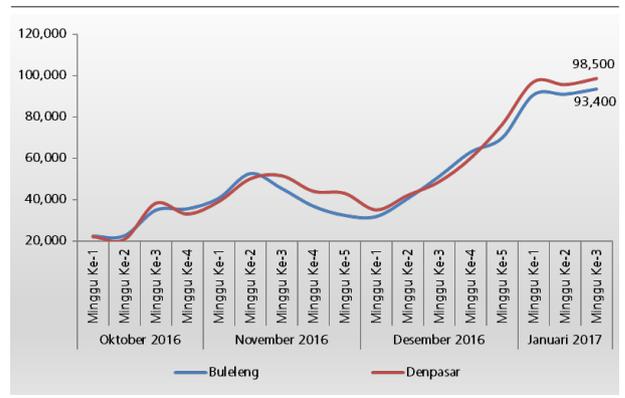


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.4 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali

buah-buahan di beberapa daerah sentra penghasil. Produksi cabai merah juga terganggu oleh serangan hama seperti antraknosa dan lalat buah serta kondisi gugur bunga karena penanaman *off season*.

Kondisi angin kencang dan anomali cuaca dalam 3 bulan terakhir di 2016, telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan yang meningkatkan harga ikan laut. Kondisi tersebut menambah tekanan inflasi dan mempengaruhi kinerja kategori pertanian Bali di triwulan IV 2016. Tren peningkatan harga cabai rawit di Bali, telah terjadi sejak November 2016 dan mencapai puncaknya pada bulan Januari 2017. Berdasarkan pemantauan harga pada SiGapura, rata-rata harga komoditas cabai rawit merah pada November 2016 berada dikisaran Rp45.500/kg untuk Denpasar dan Rp41.532/kg di Singaraja. Kenaikan ini berlanjut hingga Desember yang secara rata-rata tercatat sebesar Rp52.370/kg untuk Denpasar dan



Sumber : www.sigapura.org, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan Harga Cabai Merah (Rp/kg) di Provinsi Bali

Rp48.056/kg di Singaraja. Selanjutnya, selama Januari 2017, rata-rata harga komoditas tersebut mencapai Rp96.958/kg di Denpasar dan Rp91.642/kg pada Singaraja. Sebagai upaya stabilisasi harga, terutama untuk cabai rawit merah dan komoditas ikan-ikanan (terjadi mulai akhir tahun 2016), beberapa SKPD (tergabung dalam TPID) antara lain menargetkan peningkatan luas tanam dari semula seluas 3.306 Ha pada 2016 menjadi sebesar 6.293 Ha pada 2017.

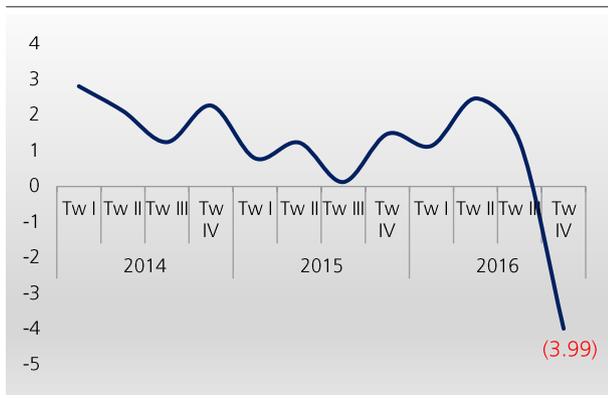
b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Inflasi kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau di triwulan IV 2016, tercatat mengalami deflasi sebesar -3,99% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,26% (qtq). Sementara itu, secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat sebesar 7,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

Tabel 3.1 Produksi Cabai Rawit Merah Tahun 2016 di Provinsi Bali

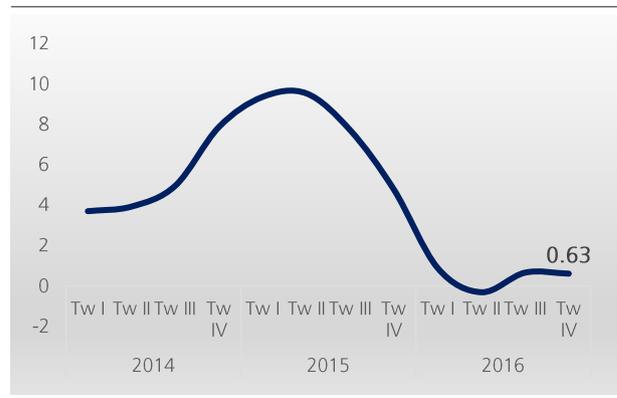
No	Kabupaten/Kota	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jumlah (Kwintal)
1	JEMBRANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4
2	TABANAN	539	468	663	706	1,335	1,415	1,204	1,109	902	1,132	1,094	514	11,081
3	BADUNG	209	776	1,070	272	342	930	364	772	992	936	448	516	7,627
4	GIANYAR	1,107	1,108	1,018	690	758	484	491	594	673	354	87	604	7,968
5	KLUNGKUNG	3,902	6,087	9,898	5,527	4,095	4,853	2,486	6,087	4,187	3,251	990	7,513	58,876
6	BANGLI	4,783	3,931	2,758	2,303	1,615	11,617	13,048	4,783	2,819	3,379	4,901	3,152	59,089
7	KARANGASEM	2,587	1,173	3,506	17,213	17,368	17,613	14,347	9,614	7,421	5,374	3,278	10,664	110,158
8	BULELENG	10	196	180	38	3,230	4,920	59,397	59,348	4,883	1,978	1,870	1,201	137,251
9	DENPASAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
BALI		13,137	13,739	19,093	26,749	28,743	41,832	91,337	82,307	21,877	16,407	12,668	24,169	392,058

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bali, diolah



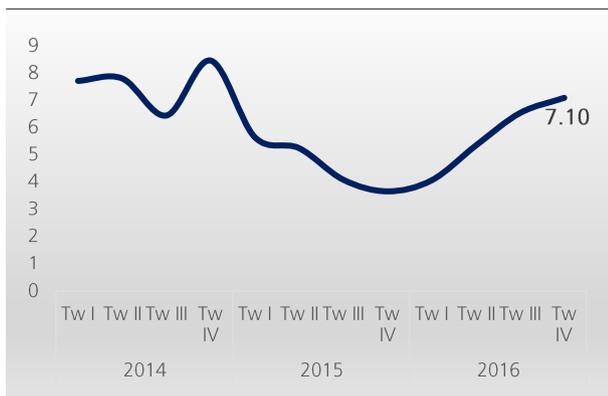
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.6 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali



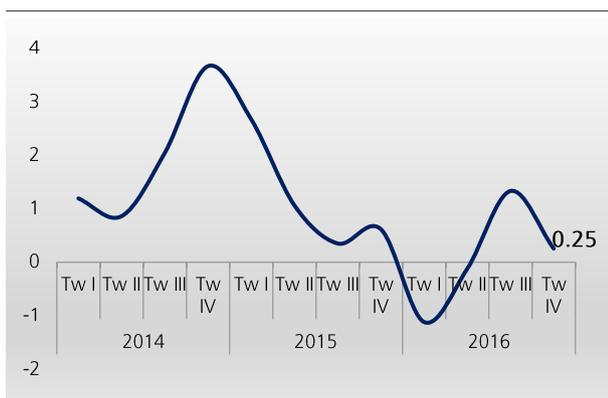
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.9 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.7 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.8 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

sebesar 6,54% (yoy). Secara tahunan, peningkatan tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau terutama disumbangkan oleh komoditas rokok kretek filter, rokok putih, dan

air kemasan. Peningkatan harga komoditas rokok dan tembakau merupakan dampak dari kenaikan cukai rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan No 147/PMK.010/2016. Kenaikan tarif tertinggi sebesar 13,46% diberlakukan untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah sebesar 0% untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB. Kenaikan rata-rata tertimbang mencapai sebesar 10,54% terhitung pada 1 Januari 2017.

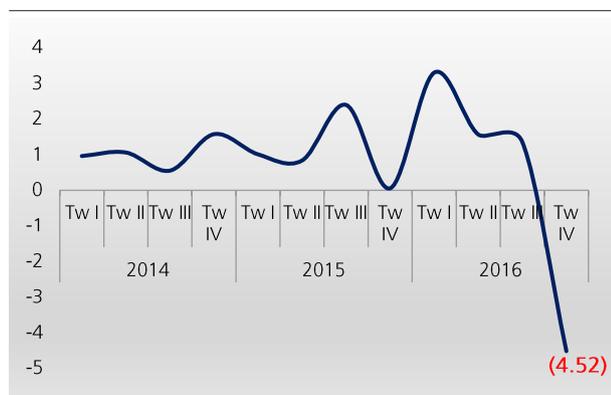
c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan gas juga tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun dengan periode yang sama tahun lalu. Pada triwulan IV 2016, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 0,25% (qtq) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 1,33% (qtq). Sementara itu, secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat berada dalam level yang cukup rendah sebesar 0,63% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,79% (yoy). Meski terdapat penyesuaian Tarif Listrik yang dilaksanakan setiap bulannya sepanjang tahun 2016, laju inflasi kelompok perumahan masih dalam level yang rendah. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang juga mendorong inflasi, antara lain adanya

peningkatan harga sewa rumah dan kontrak rumah di akhir tahun dan gejolak harga bahan bakar rumah tangga pada momen *peak season*. Komoditas dengan bobot NK tertinggi di Bali pada kelompok ini antara lain adalah Sewa Rumah (0,05); Tarif Listrik (0,04); Kontrak Rumah (0,03), Tukang Bukan Mandor (0,02) dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,02).

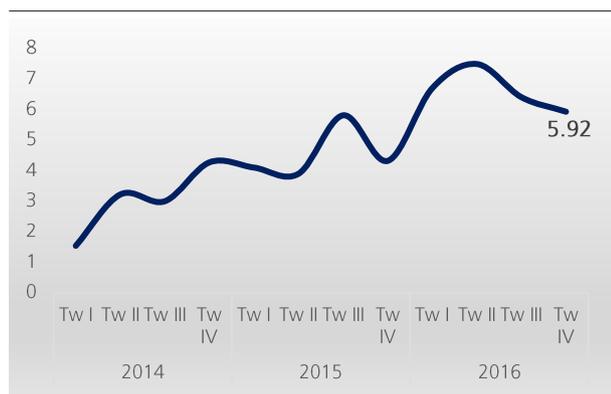
d) Kelompok Sandang

Searah dengan kelompok perumahan, air, listrik dan gas, inflasi pada kelompok sandang tercatat menurun cukup dalam pada triwulan IV 2016 yaitu deflasi sebesar -4,52% (qtq) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu yang inflasi sebesar 1,36% (qtq). Sementara itu, secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat sebesar 5,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,39% (yoy). Melandainya tekanan inflasi di



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.10 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali



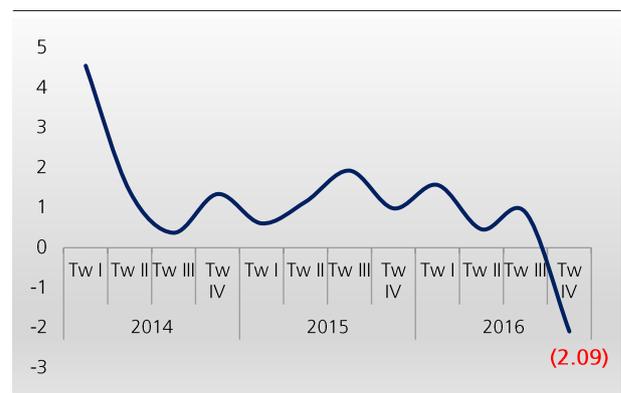
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.11 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali

kelompok ini, terutama didukung oleh harga emas perhiasan yang mengalami koreksi harga di periode laporan. Komoditas emas perhiasan di Provinsi Bali, tercatat mengalami deflasi sebesar -3,02% (mtm) di Desember 2016. Hal ini juga terjadi secara nasional, dengan deflasi emas perhiasan terdalam terjadi di Provinsi NTB (5,75%, mtm), DKI Jakarta (5,71%, mtm), dan Kaltara (5,33%, mtm).

e) Kelompok Kesehatan

Inflasi pada kelompok kesehatan mengalami penurunan, baik secara triwulanan maupun tahunan. Di triwulan laporan, kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar -2,09% (qtq) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu yang inflasi sebesar 0,89% (qtq). Sementara itu, secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat sebesar 3,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,81% (yoy).



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

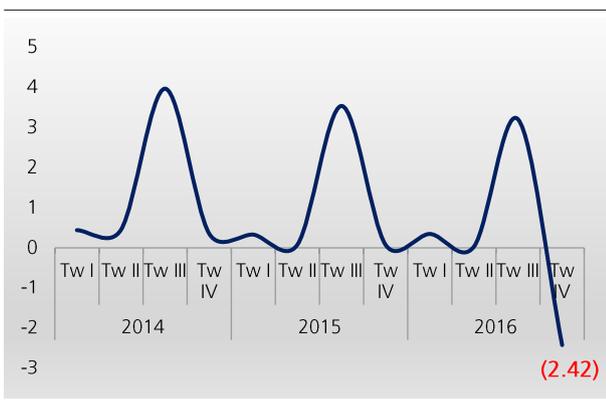
Grafik 3.12 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

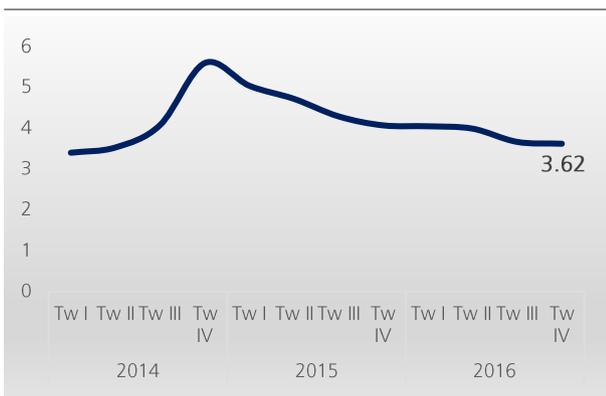
Grafik 3.13 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

f) Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga
 Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga secara triwulanan tercatat mengalami deflasi sebesar -2,42% (qtq) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.14 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali



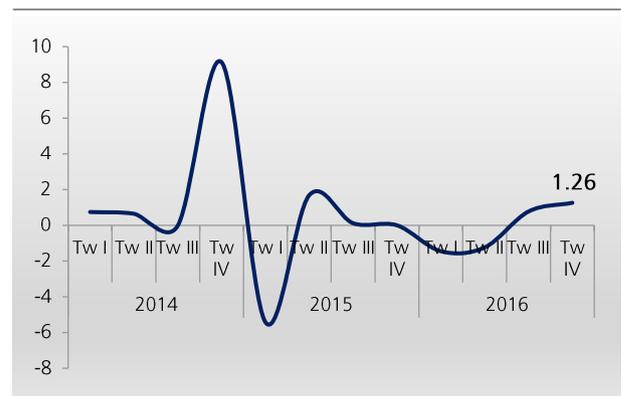
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.15 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

lalu yang inflasi sebesar 3,20% (qtq). Penurunan tekanan secara kuartalan ini, terutama disebabkan oleh telah berakhirnya pendaftaran sekolah yang berlangsung selama triwulan III 2016 dan turunnya indeks harga komoditas buku tulis bergaris dan kertas HVS. Search dengan pergerakan triwulanan, secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat sebesar 3,62% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode laporan triwulan III 2016 sebelumnya yang sebesar 5,24% (yoy).

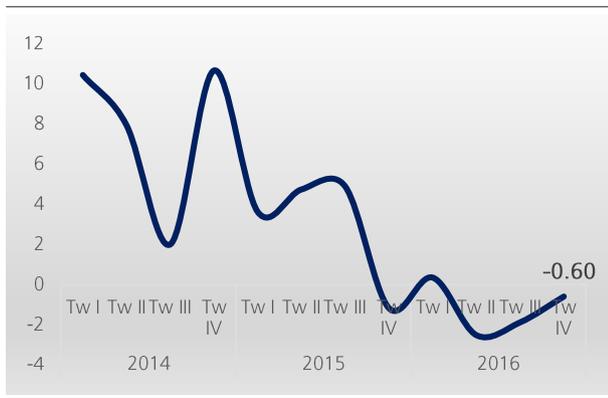
g) Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan, mengalami peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan. Pada triwulan IV 2016, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 1,26% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu, yang tercatat mengalami sebesar 0,78% (qtq). Peningkatan tekanan inflasi ini, sejalan dengan peningkatan permintaan menjelang periode *peak season* liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru pada triwulan IV. Sementara itu, secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat deflasi sebesar -0,60% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang juga tercatat deflasi sebesar -1,18% (yoy).



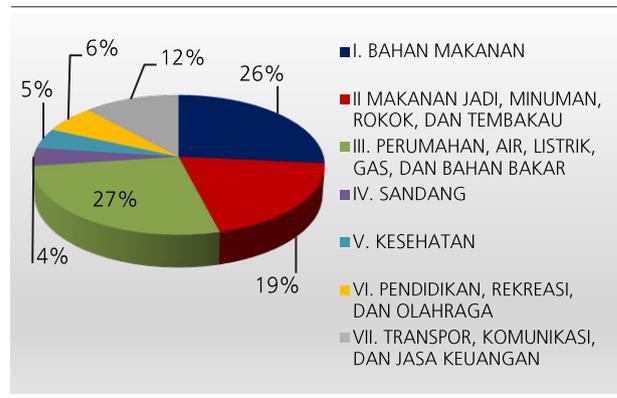
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.16 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.17 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

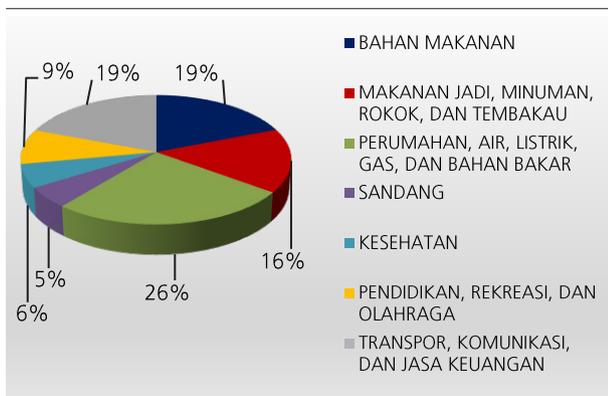


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.19 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

3.2.2. Inflasi Menurut Kota

Sejak 1 Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota perhitungan inflasi di Bali menjadi 2 (dua) kota sampel inflasi, yaitu Denpasar dan Singaraja. Berdasarkan SBH 2012, bobot Kota Denpasar terhadap



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.18 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar

inflasi nasional adalah sebesar 1,78%, sedangkan bobot Kota Singaraja adalah sebesar 0,58%. Karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan jadi dan perumahan, sebagaimana tercermin pada dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.

a) Kota Denpasar

Berdasarkan perkembangan inflasi Kota Denpasar, pencapaian hingga akhir Tahun 2016 tercatat sebesar 2,94% (yoy). Perkembangan inflasi Denpasar, tercatat relatif rendah dan stabil dan selalu berada di bawah inflasi tertimbang Provinsi Bali. Karakteristik inflasi Denpasar juga seringkali dipengaruhi oleh peningkatan permintaan jelang periode *peak season*

Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Barang	2016											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	0.10	3.77	6.93	1.02	3.90	7.15	-0.21	4.77	6.18	0.86	4.51	4.51
2	Makanan Jadi	0.40	1.25	4.33	0.33	3.81	5.58	0.87	5.18	6.82	0.35	7.70	7.70
3	Perumahan, Air, LGA	-0.29	-1.32	1.07	0.13	-1.48	-0.35	0.22	-0.28	0.54	0.12	0.39	0.39
4	Sandang	0.30	3.51	6.24	0.07	4.88	7.33	1.00	6.43	6.27	-0.41	5.41	5.41
5	Kesehatan	0.68	1.61	6.24	0.02	2.10	5.40	0.14	2.65	3.70	0.40	3.68	3.68
6	Pendidikan, Rekreasi, & OR	0.18	0.21	4.13	-0.06	0.24	4.07	-0.25	2.91	3.01	0.00	3.10	3.10
7	Transportasi & Komunikasi	-0.12	-1.37	0.34	0.54	-2.34	-2.19	0.37	-1.37	-1.36	2.38	-0.03	-0.03
	UMUM	0.06	0.62	3.41	0.39	0.92	2.78	0.26	2.15	2.95	0.69	2.94	2.94

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.3 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil dan Frekuensi Inflasi di Kota Denpasar Tahun 2016

Komoditas	Andil Inflasi	Komoditas	Frekuensi 2016
Angkutan Udara	0.54	Emas Perhiasan	9
Rokok Kretek Filter	0.25	Bawang Putih	8
Rokok Putih	0.23	Margarine	8
Air Kemasan	0.21	Air Kemasan	8
Bawang Putih	0.20	Rokok Putih	8
Bawang Merah	0.19	Tepung Terigu	7
Cabai Rawit	0.15	Daging Ayam Ras	7
Cabai Merah	0.12	Kepiting/Rajungan	7
Sekolah Menengah Atas	0.10	Mujair	7
Rokok Kretek	0.09	Tongkol Pindang	7

*) Threshold inflasi > 0,02% (mtm)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

pariwisata dan perayaan Hari Besar Keagamaan. Hal ini sejalan dengan kondisi Bali secara keseluruhan, mengingat angka inflasi tertimbang Provinsi Bali mayoritas dibentuk oleh inflasi Kota Denpasar.

Sepanjang tahun 2016, komoditas yang perlu menjadi perhatian berdasarkan frekuensi penyumbang inflasi di Denpasar adalah kelompok *volatile food*. Inflasi dari kelompok hortikultura ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas Bali dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sementara di akhir triwulan IV (Desember 2016), yang tercatat menjadi penyumbang utama inflasi di Denpasar adalah tarif angkutan udara, cabai rawit, jeruk, bawang putih, dan bensin. Hal ini dikarenakan peningkatan permintaan khususnya pada periode akhir tahun 2016 seiring

peak season libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru 2017. Selain itu, curah hujan yang cukup tinggi di Bali pada periode November – Desember 2016, juga menyebabkan produksi bumbu-bumbuan (cabai rawit dan bawang merah) dan sayuran serta buah-buahan terganggu di beberapa daerah penghasil. Produksi cabai merah juga terganggu oleh serangan hama, seperti antraknosa dan lalat buah serta kondisi gugur bunga karena penanaman *off season*.

b) Kota Singaraja

Laju inflasi Kota Singaraja pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan, yaitu dari 8,97% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 9,98% (yoy) pada triwulan IV 2016. Realisasi inflasi Kota Singaraja relatif jauh di atas inflasi nasional maupun inflasi Kota

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Barang	2016											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	2.60	5.56	11.56	-0.03	4.63	10.46	-0.29	6.91	8.97	1.98	9.98	9.98
2	Makanan Jadi	0.12	0.66	2.76	0.29	2.93	4.17	-0.33	3.96	5.14	0.03	4.08	4.08
3	Perumahan, Air, LGA	-0.12	-0.24	0.10	0.05	-0.14	0.00	0.16	1.67	1.38	0.01	1.83	1.83
4	Sandang	1.26	2.41	8.95	1.48	5.12	8.22	0.33	6.01	7.01	0.10	8.47	8.47
5	Kesehatan	0.42	0.77	3.04	0.08	1.10	3.00	0.22	3.99	5.41	0.04	4.65	4.65
6	Pendidikan, Rekreasi, & OR	0.37	0.74	3.64	0.00	0.74	3.59	2.67	6.71	6.96	0.00	6.24	6.24
7	Transportasi & Komunikasi	-0.12	-1.89	0.37	0.00	-4.32	-4.23	0.05	-4.58	-4.56	0.52	-3.48	-3.48
	UMUM	0.81	1.56	4.42	0.13	1.65	3.83	0.07	3.44	4.25	0.63	4.57	4.57

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.5 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil dan Frekuensi Inflasi di Kota Singaraja Tahun 2016

Komoditas	Andil Inflasi	Komoditas	Frekuensi 2016
Cabai Rawit	0.75	Buncis	9
Bensin	0.03	Bawang Putih	9
Tarif Pulsa Ponsel	0.02	Kelapa	9
Bayam	0.02	Daging Ayam Ras	8
Layang/Benggol	0.01	Cumi-cumi	8
Jeruk	0.01	Layang/Benggol	8
Cumi-cumi	0.01	Bayam	8
Buncis	0.01	Tauge/Kecambah	8
Rokok Putih	0.01	Cabai Rawit	7
Tarif Listrik	0.01	Rokok Putih	7

*) Threshold inflasi > 0,02% (mtm)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Denpasar. Disparitas inflasi antara Kota Singaraja dan Kota Denpasar yang cukup besar, tidak lepas dari masih minimnya kondisi infrastruktur perhubungan menuju Kota Singaraja, ditengah masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pokok Kota Singaraja dari daerah lain.

Kondisi inflasi Kota Singaraja secara bulanan tercatat lebih bergejolak dan sedikit berbeda dengan inflasi Denpasar. Faktor pendorong terjadinya inflasi sebagian besar berasal dari kelompok bahan makanan, kelompok sandang, serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

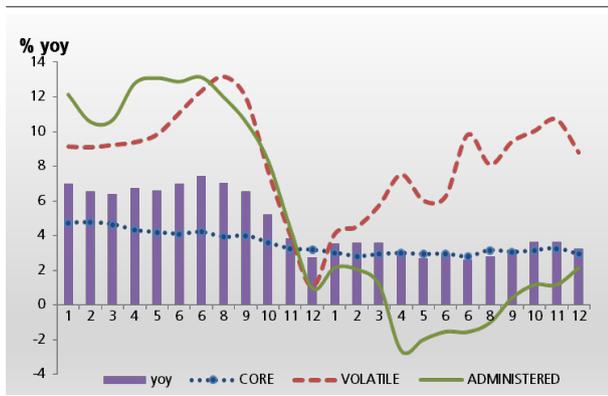
Sejak dicacah inflasinya, pergerakan inflasi Kota Singaraja lebih sensitif terhadap gejolak dari sisi suplai dibandingkan dengan inflasi Kota Denpasar. Hal ini tidak lepas dari kondisi jalur perhubungan dan distribusi Denpasar-Singaraja dan Pelabuhan Gilimanuk-Singaraja yang masih memerlukan perhatian. Optimalisasi dan perbaikan infrastruktur perhubungan seperti Pelabuhan Celukan Bawang, diperkirakan dapat meminimalkan tekanan inflasi di Kota Singaraja. Di samping itu, perlu adanya intensifikasi pemanfaatan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan produksi lokal mengingat besarnya potensi pertanian di Kabupaten Buleleng.

Kelompok pengeluaran tertinggi pada triwulan akhir 2016 adalah kelompok bahan makanan jadi dan sandang yang masing-masing tercatat sebesar 9,98% (yoy) dan 8,47% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi bahan makanan jadi di Kota Singaraja, tidak lepas dari semakin mahalnya harga bahan makanan. Sementara faktor pemicu peningkatan harga bahan makanan di periode laporan, lebih disebabkan oleh berkurangnya suplai akibat faktor anomali cuaca; peningkatan *demand* seiring dengan perayaan Hari Raya Keagamaan; serta meningkatnya ekspektasi pedagang seiring dengan pergantian tahun dan kenaikan UMR.

Apabila ditinjau pergerakannya sepanjang tahun 2016, maka 5 komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi adalah cabai rawit, bensin, dan tarif pulsa ponsel. Sementara komoditas yang paling sering mengalami inflasi adalah buncis, bawang putih, kelapa, dan daging ayam ras.

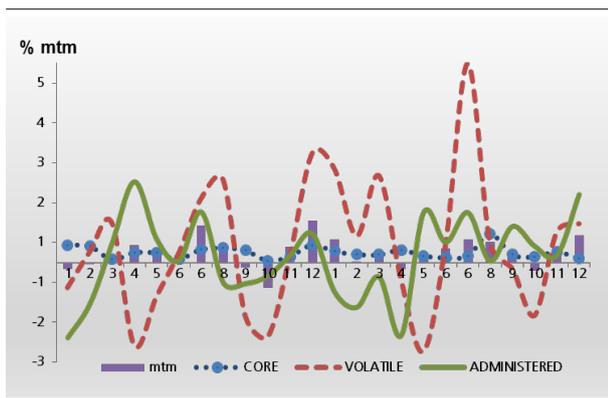
3.3. DISAGREGASI INFLASI

Berdasarkan disagregasi inflasi, peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2016 terutama bersumber pada kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu, sumbangan inflasi kelompok inti tercatat relatif stabil.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.20 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.21 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm)

a) Volatile Food

Setelah sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi di triwulan sebelumnya, tekanan inflasi kelompok pada triwulan IV 2016 tercatat melandai dan masih dalam level yang moderat. Pergerakan inflasi kelompok pada triwulan IV 2016 di Denpasar dan Singaraja, masing-masing tercatat sebesar 4,50% (yoy) dan 9,98% (yoy). Meskipun tidak setinggi peningkatan indeks harga saat adanya peningkatan permintaan jelang perayaan Hari Raya Keagamaan (Galungan, Lebaran, dan Idul Adha), namun tekanan inflasi pada kelompok ini masih didorong oleh komoditas bumbu-bumbuan. Dari sisi *demand*, terjadi peningkatan permintaan seiring dengan masuknya periode libur sekolah dan *peak season* Hari Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pada sisi lain terjadi penurunan pasokan akibat anomali cuaca yang

menyebabkan produksi bumbu-bumbuan (cabai rawit dan bawang merah) dan sayuran serta buah-buahan terganggu di beberapa daerah penghasil. Produksi cabai merah juga terganggu oleh serangan hama seperti antraknosa dan lalat buah serta kondisi gugur bunga karena penanaman *off season* pada periode November – Desember 2016. Kondisi angin kencang dalam 2 bulan terakhir, turut mendorong laju inflasi karena turunnya hasil tangkapan nelayan sehingga mendorong peningkatan harga ikan laut. Dengan kondisi permintaan yang tetap tinggi, menyebabkan harga komoditas tersebut mengalami peningkatan.

Dalam menyikapi berbagai potensi risiko inflasi, TPID Provinsi Bali senantiasa melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi Provinsi Bali. Pengendalian inflasi pangan diarahkan pada: (i) menjaga ketersediaan pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai, (ii) mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi dan prognosa pangan pokok serta langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok, (iii) memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan pokok

b) Administered Prices

Tekanan inflasi kelompok *administered prices* di triwulan IV 2016, tercatat mengalami peningkatan seiring masuknya periode libur sekolah, natal, dan tahun baru khususnya di Bulan Desember 2016. Inflasi kelompok AP di Provinsi Bali, terutama bersumber dari kenaikan tarif/harga beberapa komoditas seperti angkutan udara, angkutan antar kota, rokok putih, dan bensin. Tarif angkutan udara di Provinsi Bali untuk periode Desember 2016, mengalami inflasi sebesar 32,92% (mtm) seiring dengan tingginya permintaan untuk liburan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2017 serta dimulainya periode liburan anak sekolah. Kenaikan tarif angkutan udara tertinggi terjadi di Sumsel (52,80%), Babel (48,15%) dan Jabar

(35,94%). Bensin mengalami inflasi sebesar 0,82% (mtm) di Denpasar dan 1,01% (mtm) di Singaraja, yang didorong oleh kenaikan harga pada jenis BBM Peralite dan Pertamina (masing-masing naik sebesar Rp150/liter). Kenaikan harga bensin non subsidi terjadi seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Tekanan inflasi *administered prices* terus berlanjut hingga Januari 2017 terutama disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan pemerintah dalam beberapa aspek. Adanya kenaikan biaya perpanjangan STNK terhitung per tanggal 6 Januari 2017, antara lain berupa biaya pengurusan administrasi kendaraan seperti BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor), mengalami kenaikan tarif sejalan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejalan dengan penetapan ini, inflasi komoditas Biaya Perpanjangan STNK di Provinsi Bali tercatat sebesar 105,28% (mtm) pada Januari 2017. Sementara, kenaikan indeks harga komoditas tarif listrik sejalan dengan adanya pencabutan subsidi golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA-RTM (R-1/TR) menjadi sebesar Rp791/kWh per 1 Januari 2017 sesuai Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016 yang turut mendorong inflasi tarif listrik menjadi sebesar 5,23% (mtm). Selain itu, penyesuaian harga oleh PT. Pertamina (Persero) terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Pertamina, Series, Peralite, dan Dextrite sebesar Rp300/liter per tanggal 5 Januari 2017 juga menyebabkan peningkatan indeks harga komoditas bensin dengan tingkat inflasi sebesar 2,19% (mtm). Komoditas rokok kretek filter juga tercatat menyumbang inflasi sebesar 0,07 dengan capaian inflasi sebesar 4,11% yang disebabkan kenaikan batas Harga Jual Eceran (HJE) terendah per batang atau gram dan kenaikan tarif

cukai per batang atau gram sesuai Permen Keuangan No.147/PMK.010/2016.

c) *Core Inflation*

Secara fundamental, inflasi kelompok inti tercatat cukup stabil dan masih berada dalam tren penurunan. Stabilitas inflasi kelompok inti didukung oleh masih memadainya sisi *supply* dan terjaganya ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok inti pada triwulan IV 2016 di Denpasar dan Singaraja masing-masing tercatat sebesar 2,80% (yoy) dan 3,21% (yoy). Inflasi inti terkendali karena konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan dalam mengarahkan ekspektasi inflasi.

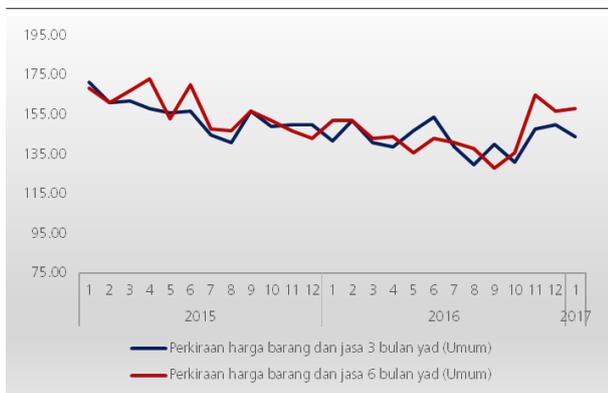
Ekspektasi inflasi masyarakat Bali, terutama dari sisi konsumen cukup terjaga, meskipun sedikit mengalami peningkatan sebagai pengaruh periode *peak season* pada triwulan IV 2016. Di sektor riil, hal ini tercermin pada hasil Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Konsumen berpendapat akan terjadi kenaikan harga secara umum dalam 3 bulan yang akan datang dibandingkan dengan saat ini, tercermin dari indeks ekspektasi konsumen yang berada di atas 100. Dengan demikian, pengendalian ekspektasi inflasi sebagai langkah antisipatif menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Optimalisasi forum strategis TPI, baik pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan ekspektasi inflasi masyarakat perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dalam rangka pengendalian inflasi di Bali. Forum koordinasi TPID baik tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi terus diperkuat melalui koordinasi rutin. Untuk komoditas beras, upaya stabilisasi harga secara langsung dilakukan oleh Perum Bulog Divre Bali melalui penyerapan gabah/beras serta melalui rangkaian Pasar Murah dan Operasi Pasar bekerjasama dengan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota. Selain beras, stabilisasi harga pangan dan langkah pengendalian juga difokuskan terhadap komoditas cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, telur ayam ras, dan minyak goreng. Bentuk intervensi secara tidak langsung yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Bali antara lain melalui pemantauan dan penyampaian harga barang kebutuhan pokok melalui PIHPS Provinsi Bali dengan sebutan SiGapura “Sistem Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis” sebagai salah satu upaya pemantauan harga dan dalam rangka memberikan informasi baik pada tingkat produsen dan konsumen untuk menghindari informasi yang asimetris.

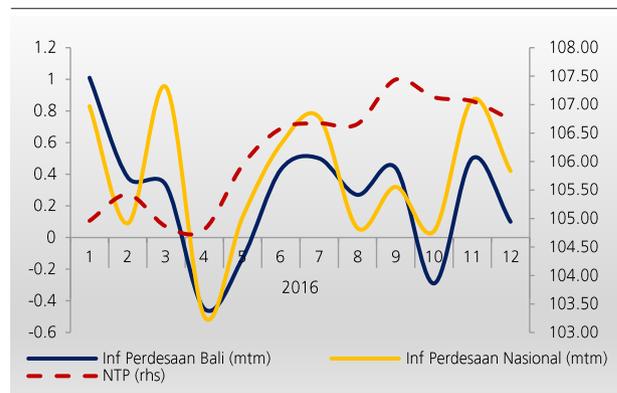
3.4. INFLASI PERDESAAN

Sama halnya dengan IHK sampel inflasi, IHK Perdesaan terdiri dari 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Tekanan inflasi perdesaan Bali di sepanjang tahun 2016, menunjukkan pergerakan melandai di bawah inflasi perdesaan Nasional. Selain itu, dengan dukungan TPID Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Bali, tingkat inflasi perdesaan Provinsi Bali pada keseluruhan tahun tercatat sebesar 3,12% (ytd), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi perdesaan nasional yang sebesar 4,63% (ytd).



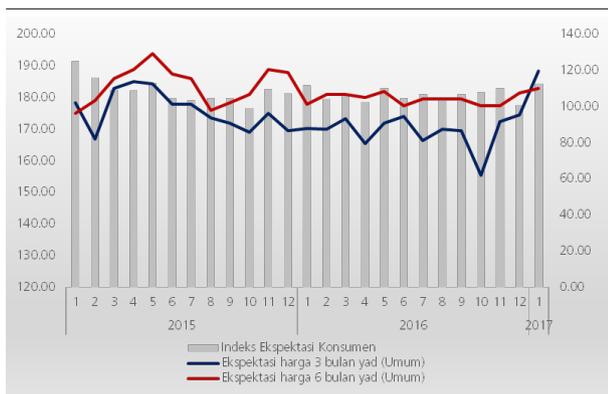
Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grifik 3.22 Interaksi Permintaan dan Penawaran



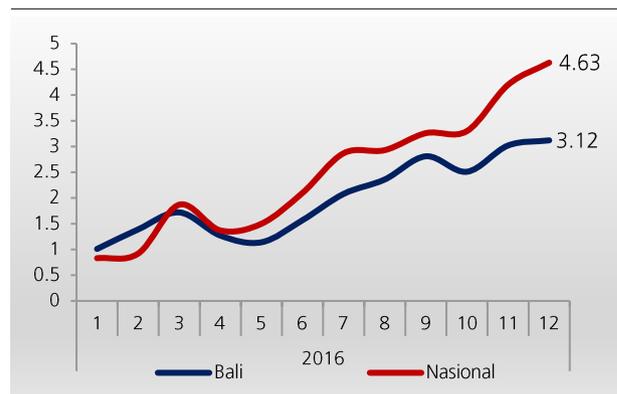
Sumber : BPS, diolah

Grifik 3.24 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grifik 3.23 Ekspektasi Konsumen



Sumber : BPS, diolah

Grifik 3.25 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)

Pada triwulan laporan, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan dari 105,15 di triwulan IV 2015 menjadi 106,98 pada triwulan IV 2016. Kondisi tersebut mencerminkan kesejahteraan petani yang sedikit mengalami peningkatan, dengan kondisi inflasi perdesaan yang relatif rendah.

BOKS B

Growth Diagnostic Provinsi Bali

Penelitian *Growth Diagnostic* (GD) adalah penelitian yang menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Hausmann, Rodrik dan Velasco (2005) yaitu HRV Tree. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis, menilai, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang berkualitas dan inklusif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang dihimpun dari pelaksanaan *Focus Group Discussion* yang dilakukan dengan pemangku kebijakan di Provinsi Bali. Penelitian ini juga diperkuat dengan penggunaan model *Computable General Equilibrium (CGE)-INDOTERM* untuk mendapatkan dampak simulasi kebijakan terhadap perekonomian.

Overview Perekonomian Provinsi Bali

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya tumbuh kuat di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali selama periode 2011 – 2015⁴ yang tercatat sebesar 6,62% (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode yang sama sebesar 5,87% (yoy). PDRB per kapita tercatat sebesar Rp 42,7 juta.

Kuatnya kinerja pertumbuhan ekonomi Bali tersebut didorong oleh kuatnya kinerja industri pariwisata yang memiliki kontribusi terbesar dalam ekonomi Bali. Industri pariwisata yang direpresentasikan oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) memiliki rata-rata pangsa mencapai 31,5% pada

periode 2000-2015 terhadap perekonomian Bali. Perkembangan kinerja industri pariwisata yang sangat signifikan berdampak pada penurunan kontribusi sektor pertanian yang disebabkan oleh tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian. Meskipun demikian, sektor pertanian masih mampu menjadi sektor utama dengan rata-rata kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 20,3% pada periode 2000-2015.

Perkembangan industri pariwisata di Provinsi Bali yang mengandalkan kekayaan budaya dan alamnya terus mengalami pertumbuhan yang kuat dengan tren yang meningkat. Sektor pariwisata telah berkontribusi nyata dalam membuka kesempatan kerja dan memberikan peluang berusaha yang lebih luas bagi masyarakat Bali. Kuatnya pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali memberikan dampak positif kepada sektor pendukung pariwisata lainnya khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ketersediaan barang untuk belanja wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Hambatan Utama Provinsi Bali

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, secara umum terdapat 4 hambatan utama dalam perekonomian Bali. Hambatan pertama adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang didominasi oleh lulusan SMP ke bawah serta rata-rata lama sekolah yang masih di bawah Provinsi peersnya. Hambatan utama selanjutnya adalah infrastruktur penunjang konektivitas dan kelistrikan. Keterbatasan kapasitas jalur distribusi Gilimanuk-Denpasar dan Gilimanuk - Singaraja menyebabkan inefisiensi distribusi

Tabel 1. Matriks Hambatan Utama Perekonomian Jawa Bali

Analisis		Penjelasan	
Pembayaran Ekonomi	Analisis Ketenagakerjaan	Lulusan SD masih mendominasi mencapai 37,45%, di sisi lain permintaan akan tenaga kerja terstandar semakin meningkat.	
	Analisis Lingkungan Bisnis	SDM, akses infrastruktur (konektivitas), dan inovasi pariwisata menjadi binding constraint	
	Pendapatan Sosial	Geografis	Letak geografis yang strategis dan memiliki natural resources yang dapat mendorong PDRB.
		Infrastruktur	Akses jalan penghubung antar kabupaten/kota di Provinsi Bali masih belum efisien. Sustanabilitas infrastruktur kelistrikan di Provinsi Bali
		SDM	Rendahnya kapasitas tenaga kerja dikarenakan keterbatasan akses ke pendidikan menengah. IPM Provinsi Bali tertinggi ke 5 dan angka kemiskinan di bawah nasional
	Makro	Moneter	Khusus di tahun 2014, tingginya laju inflasi di Bali dipengaruhi oleh masih tingginya laju inflasi di Singaraja. Faktor yang mempengaruhi adalah masih tingginya ketergantungan pasokan bahan makanan dari daerah lain.
		Fiskal	Penyerapan APBD cukup baik
	Kegagalan Pasar	Koordinasi (Inflasi)	Inefisiensi jalur distribusi yang berpotensi mendorong angka inflasi
		Inovasi	Produk ekspor masih di dominasi oleh barang mentah (perikanan) dan industri dengan pemanfaatan teknologi rendah Inovasi pengemasan variasi produk pariwisata yang relatif terbatas
	Pembiayaan	Internasional	Penanaman Modal
Domestik		Biaya	Tingkat suku bunga investasi cukup tinggi, namun tidak berpengaruh terhadap perkembangan investasi.
		Risiko	NPL Lebih rendah dibandingkan daerah peer
		Kompetisi	Rasio kredit terhadap PDRB masih rendah Jumlah bank masih terpusat di Bali Selatan (Derpasar, Badung, Gianyar, Tabanan)

	constraint
	Potensi constraint
	no constraint

barang dan minimnya aksesibilitas wisatawan untuk berpergian di luar Bali Selatan. Selain itu, hanya terdapat satu pintu masuk jalur udara Bali yaitu Bandara Ngurah Rai yang telah melebihi standar utilitas (mencapai 93%) dengan kapasitas *runway* yang masih terbatas⁵. Terlebih, Provinsi Bali juga masih menghadapi hambatan ketersediaan infrastruktur listrik yang belum merata diseluruh kabupaten/ kota serta ketersediaan pasokan listrik yang hanya memadai sampai dengan 2019. Hambatan terakhir adalah kegagalan pasar di industri pariwisata Bali, yang mengakibatkan pertumbuhan kunjungan wisman yang cenderung melambat seiring dengan peningkatan kompetisi antar negara tujuan destinasi wisata serupa.

Simulasi Kebijakan

Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang telah teridentifikasi tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah merancang beberapa program kebijakan. Secara nasional, Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk peningkatan

kualitas pendidikan SDM di Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun kelistrikan, juga secara gencar dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Untuk mengetahui dampak ekonomi dari kebijakan reformasi struktural tersebut, maka dilakukan simulasi dengan model *Multiregional Computable General Equilibrium (CGE) INDOTERM*⁶.

Untuk mengatasi kendala kualitas pendidikan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, ditargetkan bahwa Bali akan memiliki rata-rata lama sekolah 10,07 tahun pada tahun 2020, di mana pada tahun 2014 hanya 8,62 tahun. Peningkatan rata-rata lama sekolah mampu memberikan tambahan terhadap pertumbuhan *baseline* sebesar 0,55% dan penambahan pertumbuhan *employment* 0,99%. Peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja yang pada gilirannya akan mendukung terwujudnya

⁵ Berdasarkan *Focus Group Discussion "Growth Diagnostic Provinsi Bali"*, 4 Agustus 2016, hanya terdapat satu *runway* Bandara Ngurah Rai yang tidak dapat digunakan oleh pesawat berbadan besar dengan rute London menyebabkan Bali tidak dapat menjadi hub penerbangan dari Eropa.

⁶ Model yang dibangun oleh Bappenas, CoPS Australia, CEDS UNPAD, ADB dan USAID.

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Anugrah (2015) menjelaskan peningkatan rata-rata lama sekolah akan mendorong produktivitas pekerja, terutama kepada golongan *unskilled labor*. Khususnya untuk Bagi perekonomian Bali yang didorong oleh kinerja industri pariwisata, kualitas pendidikan menjadi sangat penting. Mengacu pada studi yang dilakukan oleh Maxwell et al. (2001) dan Fleetwood (2002b), menyatakan bahwa hanya tenaga kerja dengan pendidikan yang memadai yang dapat mengakomodir pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional, yang merupakan kunci utama dalam memastikan kepuasan *customer* dan terwujudnya pertumbuhan yang *sustained*.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam transportasi barang dan arus wisatawan intra Provinsi Bali, maka diperlukan akses alternatif yang lebih efisien. Horridge (2012), dalam "*Effects of reducing transport costs in Indonesia*", mengemukakan bahwa perbaikan infrastruktur konektivitas berdampak pada efisiensi dalam transportasi dan juga efektivitas tenaga kerja di seluruh industri. Salah satu program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasi permasalahan ini adalah pembangunan jalan tol antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Besaran shock dalam simulasi dikalkulasi melalui pendekatan efisiensi waktu tempuh yang dapat meningkatkan produktivitas sektoral. Dengan menggunakan model penelitian tersebut, efisiensi waktu tempuh sebesar 40,47% melalui pembangunan jalan tol berpotensi menambah pertumbuhan PDRB terhadap *baseline* sebesar 0,24%, dengan tambahan pertumbuhan *aggregate employment* sebesar 0,50%.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam transportasi barang dan arus wisatawan intra Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga telah mencanangkan

pembangunan kereta api Bali Utara - Bali Selatan. Chen dan Haynes (2012) mengemukakan pembangunan kereta api akan meningkatkan kunjungan wisatawan mencapai 20%. Pembangunan kereta api tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi seiring dengan waktu tempuh dan pengeluaran untuk transportasi darat yang berkurang. Dengan demikian, asumsi yang digunakan dalam simulasi ini adalah efisiensi logistik dan peningkatan kunjungan wisatawan. Pembangunan kereta api Bali Utara – Bali Selatan berpotensi menambah pertumbuhan PDRB terhadap *baseline* sebesar 0,13%, dengan tambahan pertumbuhan *aggregate employment* sebesar 0,10%.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali, Pemerintah telah menyiapkan program pembangunan Bandara Bali Utara. Bandara Ngurah Rai yang merupakan satu-satunya akses masuk melalui udara ke Provinsi Bali telah mencapai utilitas di atas standar yang ditetapkan yang menghambat kenyamanan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu dengan dibangunnya Bandara Bali Utara diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali. Dengan dibangunnya bandara Bali Utara, diasumsikan akan terjadi peningkatan kapasitas bandara di Bali sebesar 77,08% pada tahun 2018. Kemudian, sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang, terjadi kenaikan permintaan di sektor pendukung pariwisata khususnya dari wisatawan mancanegara sebesar 39,92%. Pembangunan Bandara Bali Utara berpotensi menambah pertumbuhan PDRB terhadap *baseline* sebesar 0,99%, dengan tambahan pertumbuhan *aggregate employment* sebesar 0,5%. Tingginya dampak tersebut seiring dengan besarnya potensi peningkatan kunjungan wisatawan. Pembangunan bandara Bali Utara tersebut diharapkan dapat

mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang sustainabel, sebagaimana studi yang dilakukan oleh Oxford Economic Forecasting (2003), dengan mengambil studi kasus di Afrika yang menyatakan industri transportasi udara memiliki peran penting, dalam terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang sustainabel seiring dengan ekspansi wisatawan.

Dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan listrik yang sustainabel, telah terdapat rencana peningkatan kapasitas listrik di Bali sebagai bagian dari program nasional peningkatan 35.000 MW listrik. Simulasi pembangunan infrastruktur listrik dilakukan dengan peningkatan investasi secara *multiyears* di sektor listrik. Nilai investasi disesuaikan agar terjadi peningkatan kapasitas suplai maupun transmisi listrik di Bali. Dalam simulasi ini, diasumsikan bahwa rencana pembangunan pembangkit 35.000 MW listrik tercapai dan Jawa-Bali *crossing* telah beroperasi, sehingga didapatkan peningkatan kapasitas listrik sebesar 50% di Bali. Dari hasil simulasi didapatkan bahwa dampak dari kebijakan kelistrikan menambah pertumbuhan terhadap *baseline* untuk PDRB sebesar 0,14%. Namun demikian, dampak peningkatan kapasitas listrik tersebut tidak menambah pertumbuhan untuk *aggregate employment* secara signifikan yang hanya tercatat sebesar 0,06%.

Penataulangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Bali diharapkan dapat meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali. Penataulangan KSPN yang didukung dengan bantuan promosi dari Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor terkait pariwisata di Bali. Simulasi penataulangan 10 KSPN pariwisata dilakukan dengan menggunakan pendekatan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 sebanyak 8 juta

kunjungan. Hasil dari simulasi ini menunjukkan adanya potensi penambahan pertumbuhan terhadap *baseline* (persen rata-rata per tahun 2016-2020) sebesar 0,18% dan penambahan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,16%. Dampak dari penataulangan KSPN ini cukup besar terhadap ekonomi Bali, mengingat peranan industri pariwisata di Provinsi Bali yang sangat besar. Dengan adanya penataulangan 10 KSPN yang didukung dengan upaya promosi, maka diharapkan dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagaimana Movahed (2005) menjelaskan promosi industri pariwisata di Shiraz City (Iran) mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Mengacu pada hasil simulasi yang telah dilakukan, *most binding constraint* dari investasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Bali adalah kondisi infrastruktur penunjang konektivitas di Provinsi Bali. Kebijakan pembangunan bandara Bali Utara berpotensi memberikan dampak pertumbuhan ekonomi terbesar, yaitu rata-rata per tahun mencapai 0,99% di atas *baseline no policy*. Kebijakan akselerasi pembangunan bandara Bali Utara tersebut juga berpotensi mendorong penyerapan tenaga kerja terbesar, yaitu 0,5% di atas *baseline no policy*. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk dapat diselesaikan sebagai hambatan utama dalam mendorong peningkatan investasi, khususnya terkait peran provinsi Bali sebagai basis pariwisata nasional. Kebijakan berikutnya sesuai dengan urutan besaran dampak kebijakan adalah peningkatan kualitas SDM, pembangunan jalan tol, pengembangan pariwisata, peningkatan kapasitas listrik, dan pembangunan kereta api.

Tabel 2 Hasil Simulasi Kebijakan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Bali

No.	Kebijakan	ASUMSI	Dampak Makro Ekonomi *)		Kontribusi Industri				
			PDRB	Tenaga Kerja	PDRB		Tenaga Kerja		
					Top Gainers	Top Gainers Manufaktur	Top Gainers Sektor Jasa		
1	Pembangunan Jalan Tol	Pembangunan tol yang menghubungkan Bali utara dan Bali Selatan	0.24	0.50	Real Estate 1.55 Gov Serv. 0.66 Trade 0.45	Paddy 0.23 Crops 0.20 Animals 0.17	Gov Serv. 0.61 Trade 0.21 Air Trans 0.21		
2	Pembangunan Kereta Api	Pembangunan Kereta Api yang menghubungkan Bali utara dan Bali Selatan.	0.13	0.10	Rest. Htl 0.16 Construc. 0.15 Gov. Serv 0.09	Food Prod 0.02 Paddy 0.01 Oth. Mining 0.01	Rest. Htl 0.30 Constr. 0.27 Trade 0.45		
3	Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan rata-rata lama sekolah dari yang semula selama 9,83 tahun menjadi 10,07 tahun.	0.55	0.99	Rest. Htl 0.56 Air Trans 0.37 Oth. Serv 0.31	Crops 0.35 Textile 0.28 Paddy 0.20	Rest. Htl 1.05 Air Trans 0.69 Oth. Serv 0.58		
4	Peningkatan Kapasitas Listrik	Peningkatan Kapasitas Listrik meningkat sebesar 50%	0.14	0.06	Construc. 0.08 Gov Serv. 0.07 Elecgas 0.06	Textile 0.05 Food Prod 0.01 Crops 0.36	Gov Serv. 0.10 Construc. 0.08 Oth. Serv 0.06		
5	Pengembangan Pariwisata	Penataulang 10 KSPN di Provinsi Bali	0.18	0.16	Construc. 0.23 Rest. Htl 0.22 Real Estate 0.16	Oth.Mining 0.008 Sea Fish 0.001	Rest. Htl 0.30 Gov Serv. 0.26 Construc. 0.26		
6	Bandara Bali Utara	Pembangunan Bandara Bali Utara	0.99	0.50	Air Trans 0.99 Construc. 0.91 Gov Serv. 0.53	Oth.Mining 0.03 Sea Fish 0.003	Construc. 0.98 Gov Serv. 0.90 Air Trans 0.59		
Total			2.23	2.31					

Rekomendasi

Sesuai dengan hasil simulasi yang dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan fokus pemerintah terhadap peningkatan dukungan infrastruktur penunjang konektivitas : Bandara Bali Utara. Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian, mengingat besarnya dampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Setelah itu berturut-turut perlu untuk menjadi perhatian yaitu pembangunan jalan tol, pengembangan pariwisata, peningkatan kapasitas listrik, dan pembangunan kereta api. Berikut adalah rekomendasi dalam implementasi kebijakan reformasi struktural pemerintah dalam menyelesaikan hambatan utama perekonomian Bali.

1. Peningkatan infrastruktur konektivitas : Bandara Bali Utara
 - Percepatan pembangunan Bandara Bali Utara untuk mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan.
 - Perlunya mempercepat pembangunan jalan

tol penghubung Bali Selatan – Bali utara dan pembangunan kereta api untuk dapat mendukung efektivitas pembangunan Bandara Bali Utara.

- Peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan program pembangunan agar dapat menghasilkan realisasi program yang efisien dan efektif terutama dalam upaya mendukung kelancaran penyelesaian proses perizinan dan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas.
2. Pengembangan pariwisata : penataulangan 10 KSPN Bali
 - Kesadaran Pemerintah dan Masyarakat untuk menjaga dan merawat kesinambungan destinasi wisata di Provinsi Bali.
 - Mendorong pengembangan pengemasan produk pariwisata untuk merespon perubahan struktur wisatawan dan untuk

peningkatan daya saing serta dukungan perluasan pasar dengan promosi pariwisata Bali dengan perluasan pasar.

- Pemanfaatan teknologi informasi serta kerjasama dengan platform promosi pariwisata eksisting dengan inovasi penawaran paket pariwisata.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia : peningkatan rata-rata lama sekolah

- Peningkatan upaya Pemerintah untuk penerapan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun.
- Penyediaan program peningkatan kualitas pendidikan siap pakai yang tersertifikasi khususnya untuk tenaga kerja pariwisata. Pasca berlakunya MEA 2015 maka kompetisi tenaga kerja khususnya bidang pariwisata semakin ketat sehingga diperlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian dengan

standar internasional. Selain itu, penyiapan pendidikan siap wirausaha salah satunya mengadakan kursus keterampilan guna meningkatkan SDM terampil.

- Perlunya strategi dalam mendorong kualitas SDM dan inovasi seperti melakukan pelatihan rutin, “adopsi teknologi” bagi pekerja (terutama yang tidak bersekolah atau berkemampuan rendah).

4. Peningkatan infrastruktur kelistrikan.

- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan Kementerian Kehutanan untuk mengatasi kendala pembebasan lahan.
- Prioritisasi pembangunan gardu induk yang menyuplai listrik ke daerah-daerah industri

Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB IV

Foto oleh: Wilda Tri Farizqi

Klaster Tenun Songket, Kelompok Putrimas Jembrana

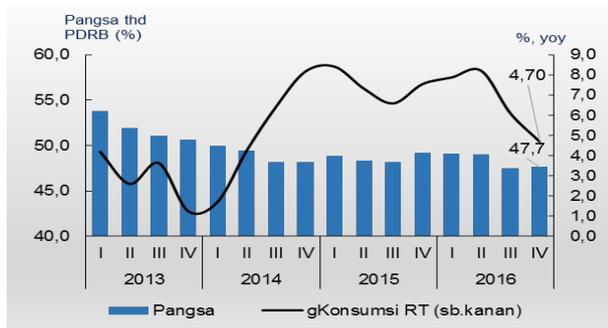
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGANDAN UMKM



4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Dalam sebuah sistem keuangan, rumah tangga merupakan obyek yang memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai penyedia dana dan sebagai penerima pendanaan dari institusi keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga adalah tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat konsumsi, dan kondisi pembiayaan/kredit oleh rumah tangga.



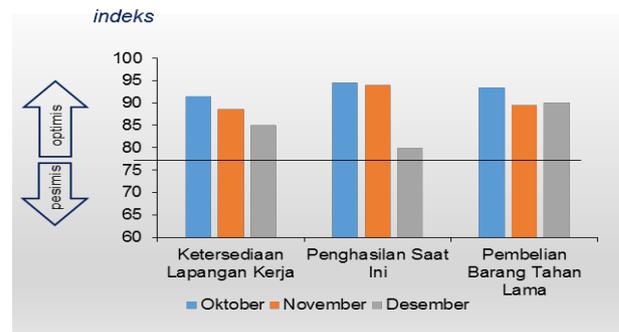
Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali

Pada triwulan IV 2016, kinerja konsumsi rumah tangga yang melambat, turut menjadi faktor penyebab perlambatan ekonomi Bali. Dengan pangsa yang sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya (naik dari 47,5% menjadi 47,7%), konsumsi rumah tangga tercatat mengalami perlambatan dari sebesar 6,11% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 4,70% (yoy) di triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut seiring dengan terjadinya kenaikan harga (inflasi) yang signifikan di sepanjang triwulan IV 2016, didorong oleh faktor musiman berupa perayaan hari raya keagamaan dan adanya penyesuaian tarif listrik di bulan Oktober 2016 pada ke-12 golongan tarif), sehingga membatasi kemampuan belanja masyarakat.

Perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut, sejalan dengan menurunnya optimisme rumah tangga dalam melakukan kegiatan konsumsi. Hal ini tercermin dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen

(IKK) selama triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 98,03, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 100,06. Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam rentang waktu Oktober-Desember 2016, terjadi pelemahan keyakinan konsumen, sejalan dengan pendapatan masyarakat yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, konsumen rumah tangga masih menunjukkan optimisme terhadap potensi perbaikan ekonomi di masa yang akan datang, sebagaimana ditunjukkan oleh indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang meningkat di triwulan IV 2016.



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.2 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini

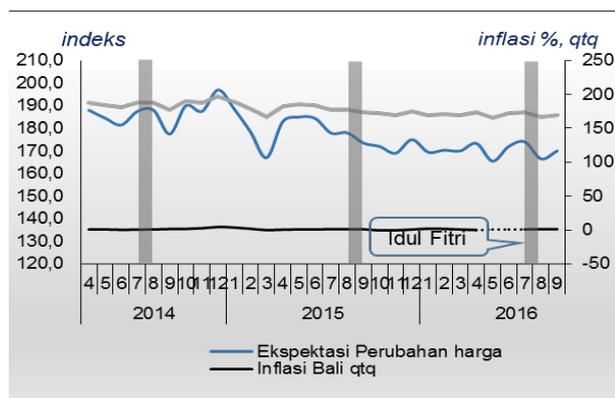
Optimisme konsumen rumah tangga di Bali pada triwulan IV 2016 terhadap kondisi penghasilan, menunjukkan sedikit penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Begitu pula untuk perkiraan 6 bulan ke depan, rumah tangga masih melihat adanya sedikit penurunan pendapatan/penghasilan. Sejalan dengan hal ini, optimisme rumah tangga terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini juga mengalami penurunan. Meskipun optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan saat ini menurun, namun tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja untuk 6 bulan mendatang sedikit membaik.

Sumber kerentanan lainnya adalah terkait dengan adanya potensi tekanan harga. Pada triwulan I 2017, diperkirakan rumah tangga masih akan menghadapi

tekanan harga bahan pangan dan makanan jadi, dikarenakan kondisi anomali cuaca yang masih akan berlanjut hingga akhir periode tersebut.

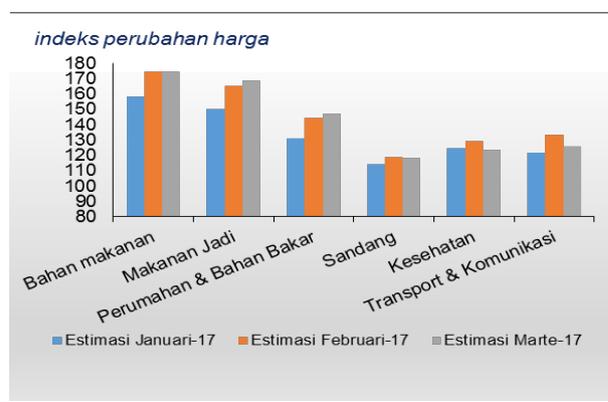
4.1.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2016, penggunaan keuangan rumah tangga masih didominasi oleh konsumsi sebesar 67%. Kondisi tersebut sejalan dengan perlambatan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2016 yang turut menjadi faktor penyebab perlambatan ekonomi Bali secara keseluruhan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh tendensi kenaikan harga (TTL) dan peningkatan harga sejumlah komoditas terkait faktor cuaca. Meskipun demikian, keyakinan rumah tangga untuk melakukan konsumsi serta dapat menutupi pembayaran cicilan hutang sedikit meningkat dari 19,7% pada triwulan III 2016, menjadi sebesar 20,7% pada triwulan IV 2016. Namun demikian, sebagai konsekuensinya, dana yang disisihkan untuk menabung cenderung menurun dari 15,7% menjadi 12,3% pada periode yang sama.



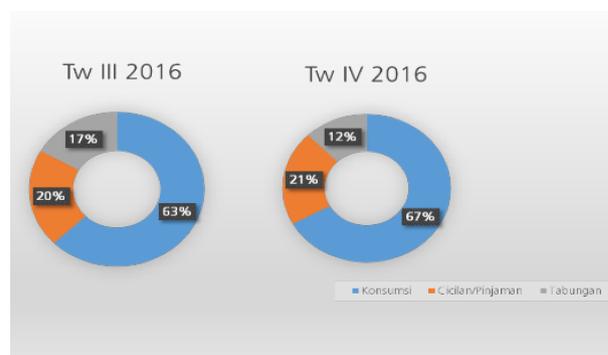
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.3 Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Mendatang



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.4 Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali

Apabila dilihat berdasarkan pendapatannya, tingkat pengeluaran konsumsi yang tertinggi dilakukan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah (Rp 1-2 juta). Di lain sisi, semakin tinggi tingkat pendapatannya cenderung semakin kecil tingkat pengeluarannya untuk konsumsi.

Tabel 4.1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan

Penggunaan	Pengeluaran/bulan					
	Rp1 - 2 jt	Rp2,1 - 3 jt	Rp3,1 - 4 jt	Rp4,1 - 5 jt	>Rp5 jt	Rata-rata
Konsumsi	69,7%	68,9%	65,8%	66,1%	64,8%	67,0%
Cicilan/Pinjaman	21,0%	18,0%	21,3%	19,8%	23,5%	20,7%
Tabungan	9,4%	13,2%	12,9%	14,1%	11,7%	12,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 4.2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln	Triwulan IV 2016			
	Debt Service Ratio (DSR)			
	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	2,2%	4,0%	1,2%	1,8%
Rp2,1 - 3 jt	13,3%	10,4%	6,7%	5,7%
Rp3,1 - 4 jt	12,8%	6,7%	8,2%	4,7%
Rp4,1 - 5 jt	4,7%	2,2%	3,7%	3,5%
>Rp5 jt	3,2%	0,8%	1,8%	2,2%
Total	36,1%	24,2%	21,7%	18,0%

Pengeluaran/ bln	Perubahan Debt Service Ratio (DSR)*			
	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	-0,8%	-9,1%	155,0%	-27,9%
Rp2,1 - 3 jt	-47,3%	-157,6%	244,6%	-47,5%
Rp3,1 - 4 jt	-33,5%	-204,1%	205,6%	55,8%
Rp4,1 - 5 jt	-0,8%	-252,6%	296,7%	-29,2%
>Rp5 jt	-53,0%	-238,8%	332,7%	-16,1%
Total	-34,0%	-157%	241,3%	-11,0%

TMP = Tidak Memiliki Pinjaman/Cicilan

* Perubahan triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan III 2016

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Tabel 4.3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln	Triwulan IV 2016				
	Tabungan				TBM
	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	
Rp1 - 2 jt	4,5%	2,2%	0,8%	0,2%	1,5%
Rp2,1 - 3 jt	17,1%	7,2%	3,4%	1,8%	6,6%
Rp3,1 - 4 jt	15,8%	8,1%	3,9%	1,2%	3,5%
Rp4,1 - 5 jt	6,4%	3,7%	1,8%	1,2%	1,0%
>Rp5 jt	4,2%	2,2%	0,7%	0,3%	0,7%
Total	48,1%	23,4%	10,6%	4,7%	13,3%

Pengeluaran/ bln	Perubahan Tabungan*				TBM
	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	
Rp1 - 2 jt	46,9%	-8,5%	-60,3%	98,3%	-44,9%
Rp2,1 - 3 jt	-18,3%	-293,7%	554,5%	-18,9%	-44,1%
Rp3,1 - 4 jt	8,7%	-312,8%	663,2%	-0,8%	-5,6%
Rp4,1 - 5 jt	38,3%	-338,9%	756,4%	-43,3%	98,3%
>Rp5 jt	23,0%	-336,5%	1238,8%	-100,0%	73,5%
Total	7,8%	-284,8%	624,1%	-22,1%	-17,2%

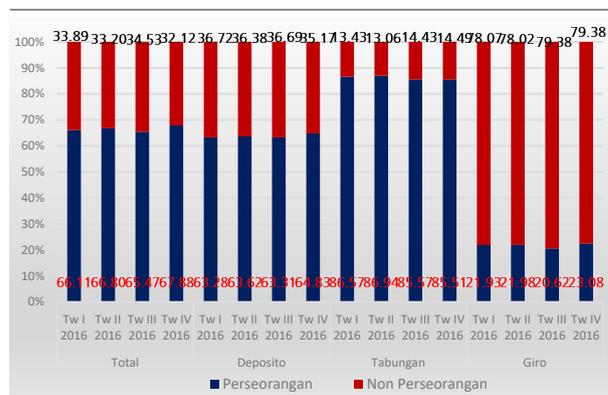
TMB = Tidak Menabung

* Perubahan triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan III 2016

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

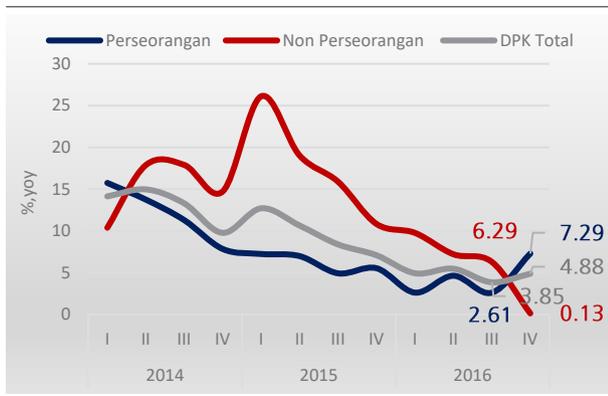
Jika ditilik dari perilaku berutang, terdapat penurunan risiko dari sisi kredit, karena secara agregat terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki *debt service ratio* lebih dari 30% pendapatannya (DSR>30%). Pada triwulan IV 2016, jumlah rumah tangga dengan DSR>30% turun sebesar 11%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Institusi keuangan menilai bahwa rumah tangga dengan DSR>30%, memiliki risiko yang tinggi dan dapat menjadi penyebab kredit yang kurang lancar. Meskipun mengalami penurunan, terdapat peningkatan potensi risiko pada kelompok pendapatan tertinggi (Rp 3,1 – 4 juta). Pada kelompok pendapatan tersebut, peningkatan rumah tangga dengan DSR>30% mencapai 55,8%.

Di sisi lain, meskipun tidak terlalu tinggi, namun masih terdapat peningkatan risiko pada perilaku menabung. Hal ini, terlihat dari bertambahnya jumlah rumah tangga yang tidak dapat menabung sebesar 17,2%, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rumah tangga yang paling besar peningkatannya dalam hal tidak dapat menabung, berada pada kelompok pendapatan Rp 1-2 juta. Rumah tangga yang tidak dapat menabung ini, merupakan sumber risiko pada stabilitas sistem keuangan, karena dapat mengganggu likuiditas institusi keuangan dari sisi sumber dana. Meskipun demikian, pada kelompok tersebut juga terjadi penambahan rumah tangga yang menabung di atas 30% pendapatannya (tabungan>30%).



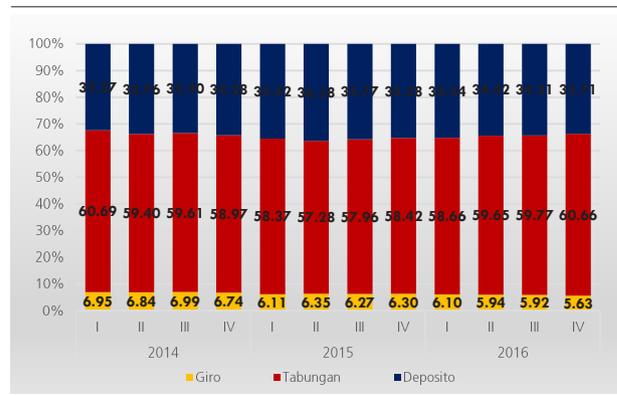
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Komposisi DPK Bali



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Bali



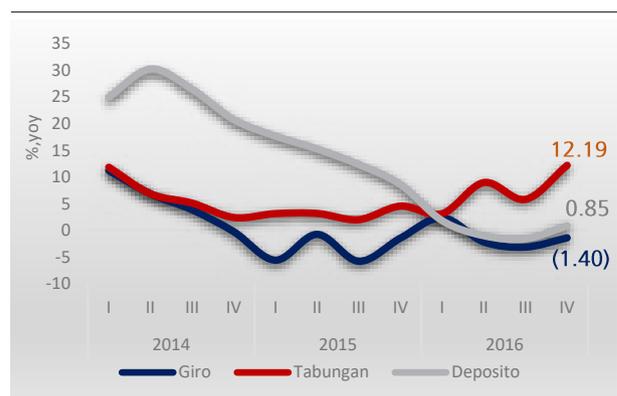
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Komposisi DPK Perseorangan di Bali

4.1.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan Di Perbankan

Sektor rumah tangga masih mendominasi dana pihak ketiga (DPK) yang berada di perbankan Bali. Hal ini, tercermin dari pangsa DPK perseorangan pada triwulan IV 2016 yang mencapai 67,88% dari keseluruhan DPK di Bali. Seiring dengan perlambatan kinerja konsumsi RT, pertumbuhan DPK perseorangan di perbankan dalam bentuk tabungan mengalami peningkatan dari sebesar 5,81% (yoy) di triwulan III 2016, menjadi sebesar 12,19% (yoy) pada triwulan IV 2016. Hal ini menunjukkan kecenderungan preferensi rumah tangga dalam melakukan penempatan masih didominasi pada fasilitas tabungan.

Pada triwulan IV 2016, porsi DPK dalam bentuk deposito yang dilakukan oleh nasabah perseorangan mencapai 33,71%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 34,31%. Semetara itu, porsi tabungan perseorangan pada perbankan Bali mencapai 60,66% dibandingkan dengan total keseluruhan DPK perseorangan. Kondisi ini, sejalan dengan penurunan kinerja konsumsi masyarakat sehingga masyarakat cenderung menyimpan dana dalam bentuk yang mudah dicairkan yaitu tabungan. Sementara itu, giro memiliki porsi sebesar 5,63% pada triwulan IV 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 5,92%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9 Pertumbuhan DPK Perseorangan Bali Tiap Jenis Penempatan

Dilihat dari jumlah rekening DPK perseorangan, pada triwulan IV 2016 terdapat penambahan jumlah rekening sebesar 5,20% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penambahan rekening tersebut, terjadi pada hampir seluruh kategori kecuali simpanan bernilai sedang (>100 juta – 500 juta) yang terkontraksi lebih dalam sebesar 2,01%, dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya terkontraksi sebesar 0,71%. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kota/kabupaten yang ada di Bali. Adapun penambahan rekening simpanan terbesar, terjadi di Kota Denpasar (bertambah sebesar 8,68%) dan penambahan rekening terendah terjadi di Kabupaten Gianyar (kontraksi 1,15%).

Tabel 4.4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali

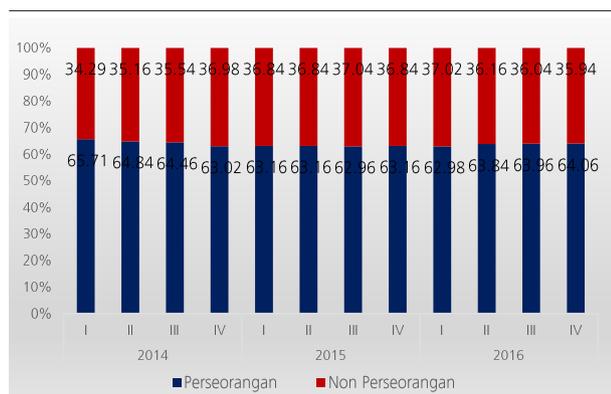
DAERAH		Jumlah	<10 JT	>10 JT - 100 JT	>100JT - 500JT	>500JT - 1 M	>1 M - 2 M	>2 M - 5M	>5M - 10M	>10M -15M	>15M - 20M	>20M
Kab. Buleleng	Rek	311.388	269.397	36.674	4.751	260	134	60	8	3	2	2
	Δ%	2,48	1,79	8,97	-1,23	7,00	26,42	42,86	60,00		0,00	-33,33
Kab. Jembrana	Rek	153.487	135.051	16.751	1.630	26	15	13	1	0	0	0
	Δ%	1,28	0,81	4,39	7,80	13,04	0,00	44,44	-66,67			
Kab. Tabanan	Rek	183.737	151.541	28.794	3.236	77	65	24	0	0	0	0
	Δ%	0,85	-0,10	5,46	6,55	-3,75	32,65	20,00				
Kab. Badung	Rek	428.545	344.290	68.071	11.731	1.359	653	325	35	17	6	6
	Δ%	0,78	0,32	2,97	2,03	2,80	8,47	3,17	-36,36	21,43	20,00	100,00
Kab. Gianyar	Rek	182.310	150.375	27.747	3.904	139	108	35	0	1	0	0
	Δ%	-1,15	-1,93	2,56	3,55	3,73	25,58	-18,60		0,00		
Kab. Klungkung	Rek	80.892	66.489	12.748	1.524	78	48	5	0	0	0	0
	Δ%	0,38	-1,74	11,54	11,49	2,63	6,67	-16,67		-100,00		
Kab. Bangli	Rek	72.365,00	60.864,00	10.430,00	1.035,00	19,00	16,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ%	-0,54	-0,91	0,41	13,24	46,15	-5,88	0,00				
Kab. Karangasem	Rek	138.292,00	115.138,00	20.807,00	2.254,00	40,00	46,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ%	1,31	0,27	6,74	6,98	37,93	17,95	-22,22				
Kota Denpasar	Rek	2.061.188,00	1.740.267,00	246.719,00	55.746,00	5.146,00	2.733,00	1.692,00	184,00	24,00	14,00	12,00
	Δ%	8,68	9,88	3,62	-4,81	2,29	12,10	7,84	30,50	0,00	40,00	9,09
PROVINSI BALI	Rek	3.612.204,00	3.033.412,00	468.741,00	85.811,00	7.144,00	3.818,00	2.162,00	228,00	45,00	22,00	20,00
	Δ%	5,20	5,53	4,27	-2,01	2,78	12,39	7,35	11,76	12,50	29,41	17,65

Rek = Jumlah rekening; D % = Perubahan jumlah rekening pada triwulan III 2016 dibandingkan dengan triwulan II 2016

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.1.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

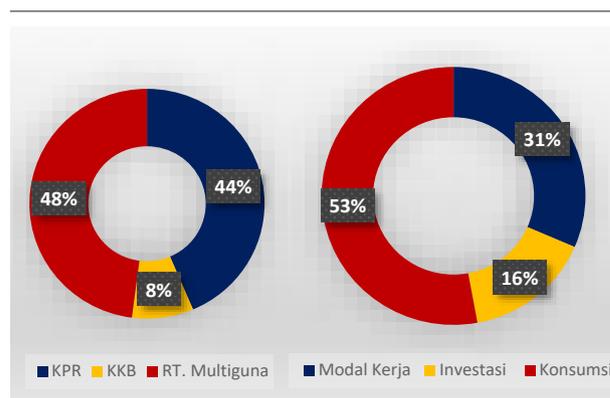
Dari sisi kredit perbankan, rumah tangga di Bali mendominasi penyaluran kredit. Hal ini terlihat dari pangsa kredit untuk perseorangan yang mencapai 64,06% dari keseluruhan kredit yang direalisasikan untuk daerah ini pada triwulan IV 2016. Sebagian besar kredit perseorangan tersebut digunakan untuk konsumsi yaitu sebesar 53%, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan produktif seperti untuk modal kerja dan investasi sebesar masing-masing 31% dan 16%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan

Kredit konsumsi oleh perseorangan digunakan untuk berbagai keperluan. Paling besar adalah kredit kepemilikan rumah (KPR) yang mencapai pangsa sebesar 44% dari keseluruhan kredit konsumsi perseorangan. Penggunaan kedua terbesar adalah kredit multiguna yang mencapai pangsa 48%. Sementara itu kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) masih relatif kecil sebesar 8%.



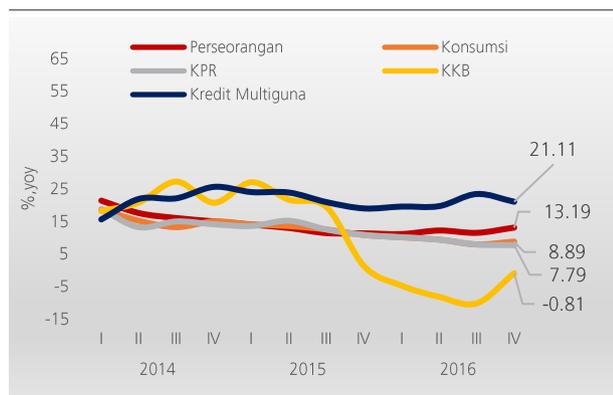
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Komposisi Kredit Konsumsi dan Komposisi Kredit

Dari sisi pertumbuhan kreditnya, kredit perseorangan tumbuh sebesar 13,19% (yoy) pada triwulan IV 2016, lebih tinggi daripada periode sebelumnya yang tumbuh 11,57% (yoy). Peningkatan kredit

perseorangan tersebut masih didorong oleh peningkatan kredit multiguna. Sementara itu, kredit kepemilikan kendaraan bermotor masih mengalami kontraksi sebesar -0,81% (yoy). Kontraksi tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -10,07% (yoy). Sejalan dengan perkembangan tersebut, kredit kepemilikan rumah (KPR) turut menunjukkan tren melambat sejak awal tahun 2014. Pada triwulan III 2016, KPR hanya tumbuh sebesar 8,01% (yoy).

Dilihat dari sisi tingkat suku bunga, perkembangan suku bunga kredit perseorangan menunjukkan arah yang relatif stabil dan mulai mengarah ke level yang lebih rendah. Pada periode triwulan IV 2016, suku bunga tertimbang kredit perseorangan di Bali mencapai 12,49% per tahun, lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang mencapai 12,68% per tahun.



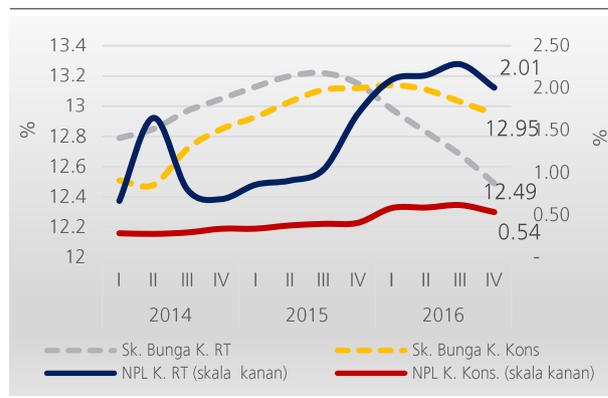
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Bali

Tabel 4.5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan IV 2016

Daerah	Kredit (Rp Miliar)	Pangsa %	JUMLAH REKENING			
			KPR	KKB	Peralatan	Multiguna
Kab. Buleleng	6.178	10,88	3.630	3.879	1.353	19.283
Kab. Jembrana	2.459	4,33	5.643	1.710	648	5.231
Kab. Tabanan	5.583	9,83	5.962	3.377	759	16.750
Kab. Badung	9.794	17,24	6.539	4.925	989	22.921
Kab. Gianyar	4.844	8,53	3.320	4.895	249	11.444
Kab. Klungkung	1.797	3,16	299	759	82	6.963
Kab. Bangli	1.795	3,16	4.339	829	77	2.946
Kab. Karangasem	2.866	5,05	1.618	1.328	129	9.441
Kota Denpasar	21.484	37,82	22.316	21.720	1.803	42.369
PROVINSI BALI	56.800	100,00	53.666	43.422	6.089	137.348

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali

Dari sisi risikonya, risiko kredit rumah tangga di triwulan IV 2016 masih menunjukkan tekanan yang minimal. Hal ini tercermin dari NPL kredit perseorangan yang berada pada level 2,01%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 2,28%. Bahkan NPL pada kredit konsumsi perseorangan hanya berada pada level 0,54%. Secara spasial, kredit perseorangan masih terkonsentrasi di daerah Bali Selatan, yaitu Kota Denpasar, dengan pangsa sebesar 37,82%, diikuti oleh penyaluran di Kabupaten Badung dengan pangsa sebesar 17,24%.

Kredit Kepemilikan Rumah

Masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan KPR di Bali, menambah tekanan risiko pada pelaku usaha di bidang konstruksi perumahan dan penjualan *real estate*. Penjualan rumah baru yang masih rendah, dapat menyebabkan tekanan pada kondisi keuangan

Tabel 4.6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali

Jenis KPR	Pangsa %	Growth (%.yoy)			NPL(%)		
		TW II-16	TW III-16	TW IV-16	TW II-16	TW III-16	TW IV-16
RT. KPR sd 21	22,33	-5,43	-17,41	-21,87	0,24	0,37	0,25
RT. KPR sd 70	32,33	6,79	-0,10	-1,22	1,24	1,30	1,35
RT. KPR 70+	38,96	6,52	0,09	-0,80	2,01	2,45	1,86
RT. KPA sd 21	0,35	-5,07	-5,92	-12,39	0,00	0,00	0,00
RT. KPA sd 70	0,92	-0,52	-5,43	-9,64	19,06	16,73	20,53
RT. KPA 70+	0,41	-27,11	-27,44	-26,13	4,04	4,86	4,07
RT. Ruko	4,71	11,06	19,88	14,11	0,89	0,82	1,12
KPR	100	3,30	-3,99	-5,92	1,45	1,67	1,49

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

pelaku usaha konstruksi dan *real estate*. Hal ini juga tercermin dari melambatnya kinerja lapangan usaha *real estate* (PDRB) pada triwulan IV 2016, yang hanya tumbuh sebesar 2,77% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,52% (yoy). Dari jenis KPR-nya, perlambatan pertumbuhan di triwulan IV 2016 terjadi pada hampir semua jenis KPR, terutama KPA dengan tipe kecil (s.d.T.21) dan tipe besar (>T.70). Selain itu, permintaan untuk KP Ruko, meskipun tumbuh positif namun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tercatat permintaan ruko pada triwulan IV sebesar 24,53%, lebih lambat dari triwulan sebelumnya yang mencapai 27,01% (yoy). Perlambatan permintaan KP Ruko, salah satunya dipengaruhi oleh penurunan optimisme konsumen dalam hal ini pelaku usaha, terhadap perkiraan perkembangan kegiatan usaha.

Darisisi risiko, perilaku rumah tangga dalam melakukan pembayaran cicilan pemilikan rumah masih terjaga, meskipun terdapat potensi peningkatan tekanan. Pada triwulan IV 2016, NPL gross KPR mencapai 1,37% sedikit menurun dari triwulan sebelumnya yang mencapai 1,62%. Risiko kredit yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada penyaluran KPA tipe sedang (T.22 s.d. T.70) yang telah melampaui *threshold* 5%, tercatat sebesar 31,38%.

Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Pertumbuhan Kredit kendaraan bermotor (KKB) di Bali pada triwulan IV 2016 masih berkontraksi sebesar

0,81% (yoy), sedikit meningkat triwulan sebelumnya berkontraksi 10,07% (yoy). Dilihat dari jenis kendaraan yang dibeli, kendaraan roda enam mengalami kontraksi terbesar yaitu mencapai 33,72% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 5,52% (yoy). Selain itu, pertumbuhan kredit kendaraan roda dua juga masih mengalami kontraksi di triwulan IV 2016 sebesar 9,13% (yoy), sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi hingga 15,51% (yoy). Sementara itu, pembiayaan pembelian kendaraan roda empat (mobil) tumbuh positif sebesar 0,52% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 10,21% (yoy).

Penurunan kredit kepemilikan kendaraan bermotor tersebut sejalan dengan penurunan pertumbuhan pendaftaran kendaraan baru di triwulan IV 2016. Pada periode laporan tercatat pendaftaran pertumbuhan kendaraan baru berkontraksi sebesar 14,11% (yoy) dari 12,83% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Dari sisi risiko kredit, meskipun pertumbuhan KKB mengalami kontraksi namun NPL gross kredit ini relatif rendah yaitu pada kisaran 0,51%, cenderung stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,57%. KKB mobil mencatat NPL yang sangat rendah yaitu sebesar 0,44%. Sementara NPL tertinggi dicatat oleh kendaraan roda dua (motor) yang tercatat sebesar 1,73%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,34% dan masih di bawah *threshold* 5%.

Tabel 4.7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali

Jenis KKB	Pangsa %	Growth (% yoy)			NPL (%)		
		TW II-16	TW III-16	TW IV-16	TW II-16	TW III-16	TW IV-16
Mobil	91,95	-6,96	-10,21	0,52	0,51	0,47	0,44
Sepeda Motor	4,97	-12,83	-15,51	-9,13	2,74	2,34	1,73
Truk	2,00	-46,14	5,52	-33,72	1,62	1,13	1,35
lainnya	1,08	-4,01	6,04	-1,11	0,13	0,14	0,04
KKB	100	-8,08	-10,07	-0,81	0,64	0,57	0,51

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Kredit Multiguna

Besarnya penggunaan kredit konsumsi perseorangan secara multiguna menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga masih cukup besar, di luar kebutuhan untuk memiliki rumah dan kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga. Hal ini terjadi karena pengajuan kredit multiguna relatif mudah dengan menggunakan jaminan/agunan yang dimiliki oleh rumah tangga. Selain itu penggunaan dana yang diterima dapat secara leluasa digunakan oleh rumah tangga dalam melakukan aktivitas konsumsi seperti merenovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, maupun pembelian barang berharga/elektronik, dan bahkan dapat digunakan untuk modal usaha.

Pada triwulan IV 2016, kredit multiguna tumbuh sebesar 21,11% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,49% (yoy). Jika dilihat dari pangsa berdasarkan kelompok besar pinjaman dan jangka waktu kreditnya, kredit multiguna didominasi oleh kredit kelompok pinjaman > Rp 100 juta s.d Rp 500 juta dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun yang mencapai 64,02% dari keseluruhan nominal kredit multiguna. Selain itu, dari jumlah rekening pada kelompok pinjaman >10 tahun, kelompok pinjaman >Rp100 juta s.d Rp500 juta juga memiliki pangsa terbesar yaitu sebesar 47,54%.

Dari sisi risiko kredit, kredit rumah tangga untuk fasilitas multiguna berada dalam kondisi dengan risiko yang minimal. Di triwulan IV 2016, NPL kredit

Tabel 4.8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan IV 2016

Besarnya Pinjaman	Berdasarkan Nominal (% pangsa)						Berdasarkan Jumlah Rekening (%)					
	Jangka Waktu						Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-10	>10 tahun	Jumlah	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-10	>10 tahun	Jumlah
<10 JT	10,16	4,26	1,78	3,86	0,35	0,59	58,97	29,40	10,92	23,04	5,16	10,15
>10 JT - 50 JT	33,14	34,74	29,60	36,64	3,62	7,12	34,07	55,75	61,70	67,14	17,64	32,62
>50 JT - 100 JT	13,94	18,98	34,05	19,37	15,40	15,64	4,54	10,64	20,24	6,11	27,99	21,97
>100JT - 500JT	17,89	18,44	27,96	31,63	64,02	60,32	2,07	3,76	6,94	3,65	47,54	34,03
>500JT - 1 M	3,96	2,64	3,13	0,95	5,43	5,18	0,23	0,12	0,14	0,03	1,03	0,75
>1 M	20,91	20,95	3,49	7,54	11,19	11,15	0,13	0,33	0,07	0,03	0,65	0,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.9 NPL Kredit Multiguna

Besarnya Pinjaman	Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-10	>10 tahun	Jumlah
<10 JT	0,35	5,27	4,02	2,56	14,28	9,23
>10 JT - 50 JT	0,19	0,82	1,49	1,70	1,90	1,22
>50 JT - 100 JT	0,00	0,68	0,32	0,03	0,08	0,11
>100JT - 500JT	0,00	0,74	0,00	0,00	0,19	0,19
>500JT - 1 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,59
>1 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	1,86
Jumlah	0,10	0,77	0,62	0,73	0,57	0,57

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

multiguna tercatat hanya sebesar 0,57% dan NPL pada konsentrasi kelompok terbesar hanya sebesar 0,19%. Adapun kredit multiguna dengan risiko kredit terbesar, berada pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10 juta, NPL tercatat sebesar 9,23%.

Meskipun secara jumlah rekening, pangsa hanya sebesar 10,15% dari keseluruhan rekening multiguna, namun karena jumlah nominalnya hanya sebesar 0,59%, maka risiko kredit tersebut masih berdampak minor pada institusi keuangan di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksposur keuangan rumah tangga masih berdampak minimal pada institusi keuangan secara keseluruhan.

4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi

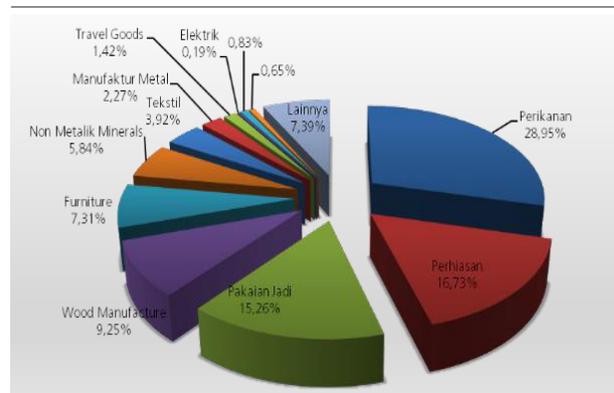
Sejalan dengan perlambatan ekonomi Bali di triwulan IV 2016, beberapa kinerja lapangan usaha utama di Provinsi Bali juga mengalami perlambatan. Berdasarkan rilis data BPS, tercatat kinerja sejumlah lapangan usaha utama seperti akmamin, Pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan tumbuh melambat di triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Bila ditinjau dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Bali ditriwulan laporan, terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor luar negeri, sedangkan komponen lainnya seperti konsumsi rumah tangga tumbuh melambat, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dari sisi ekspor, peningkatan kinerja ekspor terutama didorong oleh komoditas perikanan yang masih mendominasi ekspor Provinsi Bali dengan pangsa sebesar 28,95%. Komoditas perikanan, masih mencatat pertumbuhan nilai ekspor yang meningkat sejak awal tahun 2016, meskipun menghadapi tantangan untuk dapat tumbuh lebih tinggi. Serupa

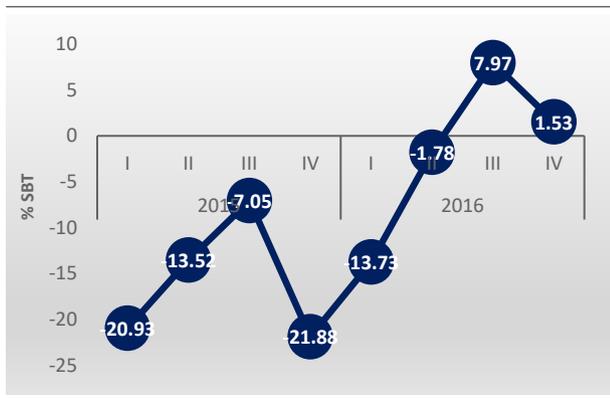
dengan kondisi triwulan sebelumnya, tantangan pada sektor perikanan datang dari penerapan regulasi larangan *transshipment* atau larangan pemindahan muatan di tengah laut serta moratorium penggunaan kapal ikan eks-asing.

Sementara itu, ekspor jasa pada triwulan IV 2016 mengalami perlambatan. Ekspor jasa luar negeri tumbuh sebesar 17,94% (yoy), sedikit lebih rendah



Grafik 4.14 Komposisi Ekspor Bali IV 2016

dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 18,23% (yoy). Perlambatan kinerja ekspor jasa luar negeri, juga tercermin oleh menurunnya TPK baik dari hotel berbintang maupun tidak berbintang berdasarkan hasil FGD dengan pelaku pariwisata. Penurunan TPK ini, terjadi akibat terus bertambahnya jumlah kamar hotel berbintang, sementara dari sisi wisman yang berkunjung mengalami penurunan kualitas, sehingga tingkat TPK cenderung menurun. Tercatat pada triwulan IV 2016, TPK bintang menurun dari sebesar 70,43% pada triwulan III 2016, menjadi sebesar 60,66% di triwulan IV 2016. Sementara itu, TPK non bintang menurun dari sebesar 39,02% di triwulan III 2016, menjadi sebesar 32,71% pada triwulan IV 2016. Kondisi ini membawa risiko terhadap perkembangan perhotelan di Bali, yang kemudian dapat membawa dampak *spillover* terhadap sektor lain yang berhubungan dengan industri pariwisata seperti akmamin, perdagangan besar dan eceran serta transportasi.



Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.15 Kondisi Kegiatan Usaha di Bali

4.2.2. Kinerja Korporasi

Meskipun perekonomian Bali tumbuh melambat pada triwulan IV 2016, namun tidak semua lapangan usaha menunjukkan perlambatan kinerja pada periode tersebut. Berdasarkan hasil *liaison* kepada pelaku usaha korporasi di Bali pada triwulan IV 2016, perlambatan terjadi hanya pada sektor industri pengolahan.

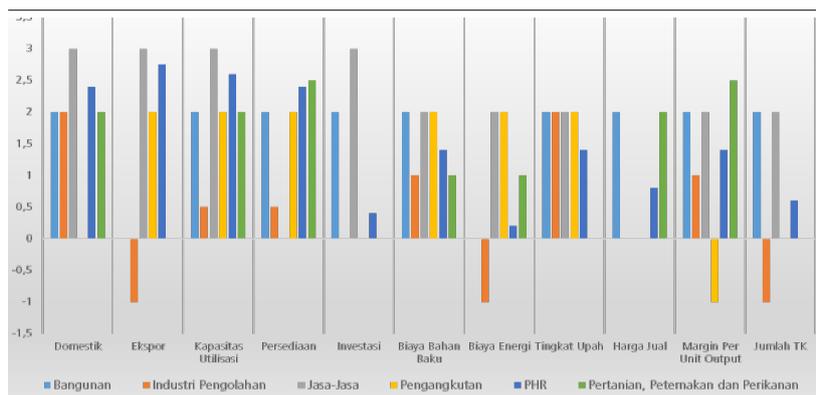
Selain kinerja industri pengolahan, perlambatan juga terlihat pada aktivitas investasi korporasi. Perlambatan investasi tercermin dari nilai *likert* sebesar 0,58 poin di triwulan IV 2016, lebih rendah dibanding triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 1,06 poin. Perlambatan tersebut terjadi, karena sebagian besar korporasi mengkonfirmasi tidak melakukan investasi di tahun berjalan, mengingat kapasitas yang tersedia masih mampu untuk mendukung produksi ataupun

mengakomodir peningkatan permintaan. Selain itu, terdapat korporasi pada subsektor perhotelan yang mengkonfirmasi nilai investasi yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Biaya

Kenaikan biaya perusahaan mampu diminimalkan pada triwulan IV 2016, dibanding triwulan sebelumnya. Biaya energi dan tenaga kerja cenderung menurun, tercermin dari nilai *likert* sebesar 0,42 poin dan 1,42 poin di triwulan berjalan, lebih rendah dibanding triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 1,18 poin dan 1,76 poin. Pada sebagian besar responden, penurunan biaya energi terjadi sebagai dampak dari upaya perusahaan untuk melakukan efisiensi energi dari tahun ke tahun. Selain itu, penurunan biaya energi juga terjadi sebagai dampak penurunan tarif listrik oleh pemerintah.

Sementara itu, penurunan biaya tenaga kerja terjadi seiring dengan upaya perusahaan untuk melakukan efisiensi tenaga kerja. Strategi yang ditempuh perusahaan adalah dengan menawarkan pensiun dini kepada pegawai perusahaan, dan tidak melakukan penggantian bagi pegawai yang keluar karena pensiun ataupun karena *resign*. Dengan demikian, perusahaan dapat menekan kenaikan biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh kenaikan UMK setiap tahun.



Sumber: Liaison KPw BI Bali diolah

Grafik 4.16 Kinerja Korporasi di Bali Berdasarkan Liaison Triwulan IV 2016

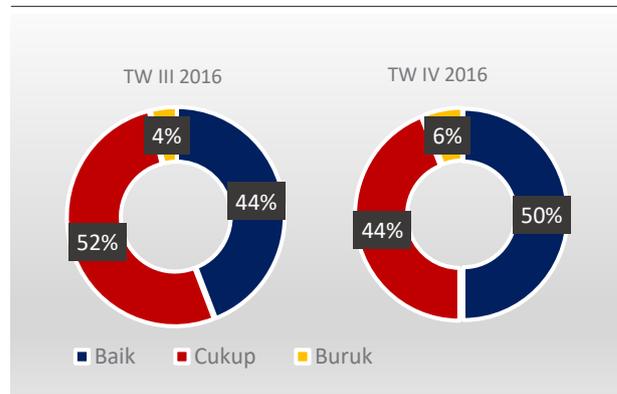
Di sisi lain, hanya biaya bahan baku yang terkonfirmasi mengalami kenaikan pada triwulan IV 2016, dibanding triwulan III 2016. Kenaikan ini tercermin dari nilai *likert* sebesar 1,42 poin di triwulan IV 2016, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,24 poin. Kenaikan biaya bahan baku, dikonfirmasi oleh seluruh sektor ekonomi *liaison* pada triwulan IV 2016. Meskipun mengalami kenaikan, seluruh responden mengkonfirmasi kenaikan tersebut masih dalam level normal atau wajar. Peningkatan biaya bahan baku pada sebagian besar responden secara umum terjadi seiring dengan peningkatan harga dari supplier perusahaan. Pada sektor PHR, industri pengolahan, dan jasa-jasa, peningkatan biaya bahan baku secara umum didorong oleh peningkatan biaya bahan baku F&B dan amenities dan nilai kontrak dari supplier/rekanan perusahaan.

Tendensi peningkatan biaya bahan baku turut terkonfirmasi dari peningkatan growth harga daging Sapi berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw BI Provinsi Bali, yaitu dari 12,10%(yoy) di triwulan III 2016 menjadi 19%(yoy) pada triwulan IV 2016 (grafik 20). Kenaikan biaya bahan baku sulit ditekan oleh perusahaan seiring dengan upaya responden untuk tetap menjaga kualitas produk barang ataupun jasa. Sebagai contoh, daging sapi impor tidak mungkin digantikan oleh daging sapi lokal untuk F&B di hotel. Contoh lainnya adalah lokasi-lokasi pariwisata yang terkenal di Bali tidak mungkin digantikan oleh lokasi lain oleh perusahaan *travel agent* sehingga perusahaan akan tetap melakukan kerjasama meskipun terdapat kenaikan harga dari rekanan.

Kondisi likuiditas keuangan korporasi

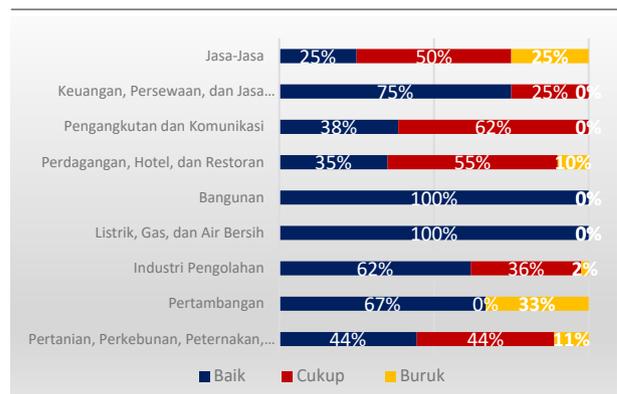
Secara umum, dari hasil SKDU, kondisi keuangan korporasi dari sisi likuiditas menunjukkan posisi yang lebih likuid. Pada triwulan IV 2016, pangsa korporasi yang memiliki kondisi likuiditas baik mencapai 50%, meningkat daripada triwulan sebelumnya yang hanya sebanyak 44% dari total responden korporasi di

Bali. Meskipun demikian, pangsa korporasi dengan kondisi likuiditas yang buruk mengalami kenaikan dari sebesar dari 4% menjadi 6%.



Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.17 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali



Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.18 Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Berdasarkan Sektoral

Jika dilihat secara sektoralnya, korporasi yang memiliki kondisi likuiditas yang baik adalah korporasi yang bergerak di sektor Bangunan, dan Listrik, Gas dan Air Bersih. Jumlah korporasi yang memiliki likuiditas keuangan yang baik di sektor tersebut mencapai 100%.

Beban Angsuran Hutang Korporasi

Dari sisi kemampuan membayar hutang, korporasi di Bali secara umum memiliki risiko yang relatif terjaga. Kondisi ini tercermin dari SKDU pada triwulan IV 2016 yang menunjukkan hanya terdapat 14% korporasi yang menyatakan bahwa beban angsuran perbankan ke depan akan semakin berat. Persepsi tersebut terutama berasal dari korporasi pertanian dikarenakan

Tabel 4.10 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang

Sektor	Memiliki Kredit Bank (% thd total responden)	Perkiraan Beban Angsuran (% Responden thd Responden Kredit)		
		Bertambah berat	Tetap	Bertambah ringan
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	33%	100%	0%	0%
Pertambangan	67%	0%	100%	0%
Industri Pengolahan	57%	8%	75%	17%
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0%	0%	0%	0%
Bangunan	0%	0%	0%	0%
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	63%	37%	53%	11%
Pengangkutan dan Komunikasi	38%	20%	60%	20%
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	42%	40%	60%	0%
Jasa-Jasa	100%	0%	75%	25%
All Sektor	49%	14%	80%	7%

Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

tingginya alih fungsi lahan pertanian serta anomali cuaca yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

Sementara itu terdapat 7% korporasi yang sedang memiliki kredit perbankan menyatakan bahwa beban angsuran kredit ke depan akan semakin ringan terhadap pendapatan perusahaan. Jumlah responden SKDU yang masih memiliki hutang ke perbankan hanya sebesar 49% dari keseluruhan responden.

4.2.3. Eksposur Perbankan Pada Korporasi

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai meskipun eksposur kredit perbankan pada sektor ini hanya sebesar 31,7% dari total kredit di Bali. Hal tersebut mengingat, kondisi keuangan sektor rumah tangga yang menjadi eksposur dominan kredit perbankan di Bali juga dipengaruhi oleh kinerja sektor korporasi, terutama dari sisi penghasilan dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit perbankan pada sektor korporasi di Bali pada triwulan IV 2016 mencapai Rp 28,1 triliun, tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Kondisi tersebut lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,94% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan terutama oleh kontraksi modal kerja.

Kredit investasi korporasi mengalami peningkatan pertumbuhan dari sebesar 8,46% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 9,54% (yoy) pada triwulan IV

2016. Selain itu, kredit konsumsi juga pada triwulan IV 2016 mampu tumbuh positif sebesar 9,44% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi sebesar 1% (yoy). Di sisi lain, kredit modal kerja mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,35% (yoy) pada triwulan IV 2016 dari triwulan sebelumnya tumbuh 9,73% (yoy).

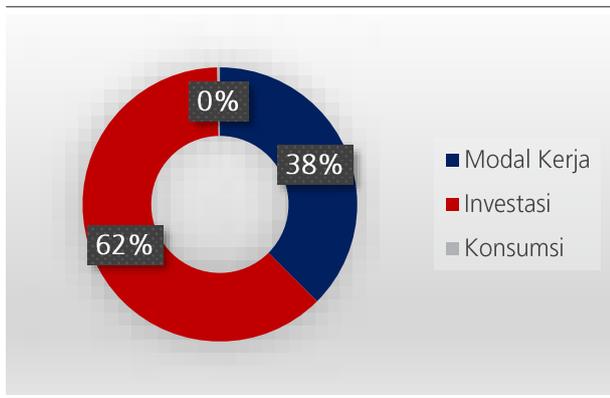
Sementara itu, kualitas kredit terjadi perbaikan seiring dengan NPL yang mengalami penurunan dari sebesar 5,85% pada triwulan III 2016 menjadi 4,93% pada triwulan IV 2016.

Kredit Modal Kerja Korporasi

Posisi kredit modal kerja korporasi pada triwulan IV 2016 mencapai Rp10,5 triliun, menurun dari triwulan sebelumnya yang mencapai Rp11,4 triliun. Seiring dengan penurunan kredit modal kerja, risiko kredit tersebut juga mengalami penurunan pada triwulan IV. Hal ini terlihat dari NPL yang menurun menjadi 7,47% dari sebelumnya 8,18% pada triwulan III 2016.

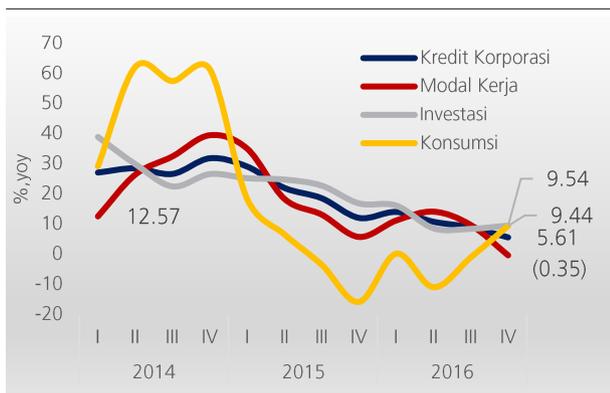
Kredit Investasi Korporasi

Posisi kredit investasi korporasi pada triwulan IV 2016 mencapai Rp 17,5 triliun. Sementara itu, meskipun risiko kredit mengalami peningkatan, NPL kredit investasi korporasi masih memiliki risiko yang terjaga di bawah *threshold* 5%. Pada triwulan IV 2016, NPL kredit ini turun menjadi 3,43% dari 4,26% pada triwulan III 2016.



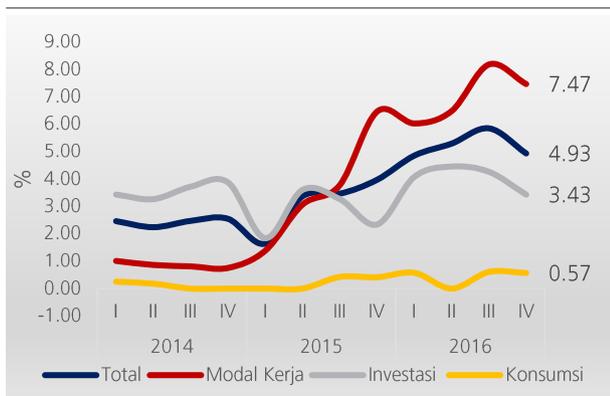
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.19 Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.20 Pertumbuhan Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.21 NPL Kredit Korporasi

4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN)

4.3.1. Jaringan Kantor dan Aset

Pada triwulan IV 2016, jumlah bank umum di Bali mengalami penambahan menjadi sebanyak 53 bank, sementara jumlah BPR masih tetap sama yaitu sebanyak 137 BPR.

Total aset perbankan Bali pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan aset secara nominal, pertumbuhan aset perbankan juga meningkat menjadi 7,85% (yoy) dari 6,31% (yoy) pada triwulan III 2016.

4.3.2. Kondisi Umum Perbankan Bali

Secara umum, perkembangan kinerja bank umum di Bali pada triwulan IV 2016 hampir sama dengan kondisi pada triwulan III 2016 dimana sejumlah indikator seperti posisi kredit dan dana pihak ketiga (DPK) serta aset masih mampu tumbuh positif meskipun ketiga indikator tersebut menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Perkembangan resiko kredit (rasio NPL) masih relatif terjaga. Rasio NPL pada triwulan IV ini menurun menjadi sebesar 2,09% dari 2,67% pada triwulan III 2016.

Intermediasi Perbankan Bali

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank umum pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari 3,72% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 5,33% (yoy) di triwulan IV 2016. Peningkatan kinerja tersebut terjadi terutama di deposito disusul oleh giro dan tabungan.

Pada triwulan IV 2016, pertumbuhan deposito mencapai 5,76% (yoy), tabungan tumbuh sebesar 6,68% (yoy) dan giro tumbuh sebesar 0,75% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, secara nominal jumlah dana yang berhasil dihimpun tersebut mengalami sedikit peningkatan dari Rp 79,4 triliun di triwulan III 2016 menjadi Rp 79,5 triliun di triwulan IV 2016.

Kredit

Meskipun kinerja penghimpunan dana mengalami peningkatan pertumbuhan, fungsi penyaluran kredit perbankan oleh bank umum secara keseluruhan

Tabel 4.11 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali

KATEGORI	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum				42	53
Jumlah Kantor	656	652	657	704	697
BPR	137	137	138	137	137
Jumlah Kantor	170	286	286	286	321
Total Bank Umum & BPR	137	137	138	179	190
Total Jumlah Kantor	826	938	943	990	1018

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.12 Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum di Bali

Indikator Bank Umum	2015			2016			
	Jun	Sep	Dec	Mar	Jun	Sep	Des
Aset (Rp milyar)	88.520	92.288	92.842	91.469	94.376	98.107	100.131
g Aset (% , yoy)	11,34	10,09	8,23	7,12	6,62	6,31	7,85
Kredit Umum (Rp milyar)	59.777	60.972	62.855	63.074	65.603	67.039	68.918
g Kredit Umum (% , yoy)	13,16	10,68	9,87	8,81	9,75	9,95	9,65
Modal Kerja (Rp milyar)	23.765	24.012	24.504	24.416	25.852	26.288	26.861
g Modal Kerja (% , yoy)	11,62	7,89	7,72	6,43	8,78	9,48	9,62
Investasi (Rp milyar)	13.876	14.141	14.588	14.446	15.042	15.539	16.181
g Investasi (% , yoy)	16,62	12,66	8,83	6,01	8,41	9,89	10,92
Konsumsi (Rp milyar)	22.137	22.819	23.764	24.213	24.709	25.212	25.877
g Konsumsi (% , yoy)	12,73	12,53	12,86	13,14	11,62	10,49	8,89
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	73.580	76.545	75.507	75.567	77.610	79.393	79.530
g DPK (% , yoy)	10,65	8,52	7,09	4,93	5,48	3,72	5,33
Deposito (Rp milyar)	27.514	27.445	26.544	27.819	28.044	28.167	28.072
g Deposito (% , yoy)	26,73	16,63	7,36	4,23	1,93	2,63	5,76
Giro (Rp milyar)	13.709	15.002	13.065	13.898	13.999	14.923	13.163
g Giro (% , yoy)	-0,87	6,32	9,19	8,06	2,12	-0,52	0,75
Tabungan (Rp milyar)	32.357	34.098	35.898	33.850	35.567	36.303	38.295
g Tabungan (% , yoy)	4,51	3,66	6,14	4,27	9,92	6,46	6,68
NPL (Gross)	1,91	1,89	2,06	2,38	2,35	2,67	2,09
LDR	81,24	79,66	83,24	83,47	84,53	84,44	86,66

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding kinerja di periode triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2016, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,65% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,95% (yoy). Secara nominal, kredit perbankan yang disalurkan sampai dengan triwulan IV 2016 mencapai Rp 68,9 triliun.

Peningkatan penyaluran kredit tersebut lebih didorong adanya perbaikan pada penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi. Pada periode laporan, kredit modal kerja mengalami pertumbuhan sebesar 9,62% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh

sebesar 9,48% (yoy). Sedangkan untuk kredit investasi pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp 16,1 triliun atau tumbuh sebesar 10,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,89% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp25,9 triliun atau tumbuh 8,89% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,49% (yoy).

LDR dan NPL

Kondisi intermediasi perbankan yang diindikasikan dengan indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan sedikit peningkatan bila dibandingkan

kinerja di periode sebelumnya. Pada triwulan IV 2016 LDR bank umum di Bali mencapai 86,66%, sedikit lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang mencapai 84,44%.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kualitas kredit perbankan menunjukkan perkembangan yang baik, tercermin dari indikator *Non Performing Loans (NPLs) Gross* yang menurun dari 2,67% pada triwulan III 2016 menjadi 2,09% pada triwulan IV 2016.

4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat

Di triwulan IV 2016, kinerja BPR tetap tumbuh tinggi namun mengalami tren yang melambat. Aset BPR tumbuh sebesar 15,56% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 18,11% (yoy) dengan nominal asetnya mencapai Rp 13 triliun. Perlambatan aset BPR di Bali juga diikuti oleh melambatnya kinerja penghimpunan dana maupun penyaluran kredit perbankan ke masyarakat. Penyaluran kredit BPR tumbuh melambat dari 9,72% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 9,09% (yoy) dengan nominal kredit sebesar Rp9,03 triliun. Sejalan dengan penyaluran kredit, penghimpunan DPK juga mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 19,23% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 22,54% (yoy) dengan nominal sebesar Rp 7,5 triliun. Kondisi

tersebut menyebabkan tingkat intermediasi BPR mengalami penurunan meskipun kualitas risiko kredit pada periode laporan masih cukup terjaga.

4.4. AKSES KEUANGAN

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM

Kredit

Meskipun nominal kredit UMKM menunjukkan peningkatan, namun pertumbuhannya melambat. Pada triwulan IV 2016, kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 12,36% (yoy), dari 12,91% (yoy) di triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan tersebut, dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran kredit di kategori perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dengan pangsa kredit terbesar (69,52%). Pada triwulan III 2016, kredit di kategori PHR ini tercatat tumbuh sebesar 18,7% (yoy), sementara di triwulan IV 2016 meningkat menjadi sebesar 18,5% (yoy). Perlambatan realisasi kredit di sektor tersebut, diiringi dengan tingkat kualitas kredit yang sedikit mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari rasio NPL kredit UMKM yang meningkat, yaitu dari 1,92% (Tw III 2016) menjadi sebesar 1,94% (Tw IV 2016).

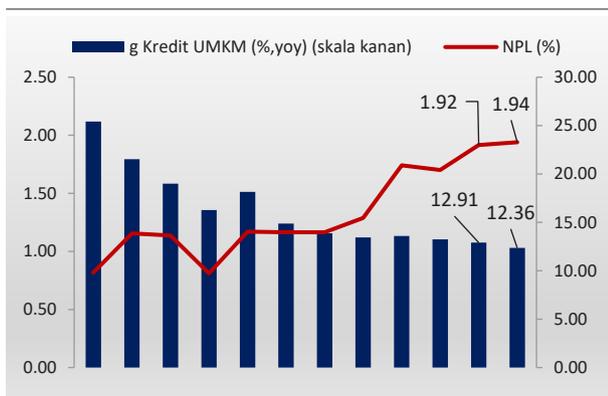
Berdasarkan data yang ada, pangsa kredit UMKM di periode triwulan tercatat mengalami sedikit peningkatan sebesar 35,9% dari total kredit,

Tabel 4.13 Perkembangan Indikator BPR di Bali

Indikator BPR	2015			2016			
	Jun	Sep	Dec	Mar	Jun	Sep	Dec
Aset (Rp milyar)	10.001	10.534	11.313	11.595	11.994	12.442	13.074
g Aset (% , yoy)	21,22	20,82	20,61	20,74	19,93	18,11	15,56
Kredit Umum (Rp milyar)	7.744	7.952	8.279	8.367	8.566	8.725	9.032
g Kredit Umum (% , yoy)	18,77	16,81	16,28	14,18	10,61	9,72	9,09
Modal Kerja (Rp milyar)	3.919	4.058	4.263	4.299	4.330	4.363	4.489
g Modal Kerja (% , yoy)	17,70	17,07	18,17	15,88	10,49	7,53	5,31
Investasi (Rp milyar)	968	985	1.034	1.068	1.088	1.107	1.183
g Investasi (% , yoy)	30,16	20,51	18,97	17,59	12,45	12,38	14,41
Konsumsi (Rp milyar)	2.857	2.909	2.983	3.001	3.147	3.254	3.360
g Konsumsi (% , yoy)	16,75	15,26	12,86	10,72	10,15	11,87	12,65
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	6.248	6.478	7.007	7.256	7.571	7.938	8.354
g DPK (% , yoy)	18,67	17,76	18,66	19,87	21,17	22,54	19,23
Deposito (Rp milyar)	4.444	4.644	5.054	5.354	5.628	5.931	6.192
g Deposito (% , yoy)	26,58	32,11	33,92	32,58	26,66	27,71	22,53
Tabungan (Rp milyar)	1.805	1.834	1.953	1.902	1.943	2.007	2.162
g Tabungan(% , yoy)	2,83	-7,64	-8,37	-5,61	7,67	9,47	10,72
NPL (Gross)	3,10	3,03	2,69	4,27	4,75	5,75	4,92
LDR	81,67	80,54	76,33	76,98	76,24	74,94	72,19

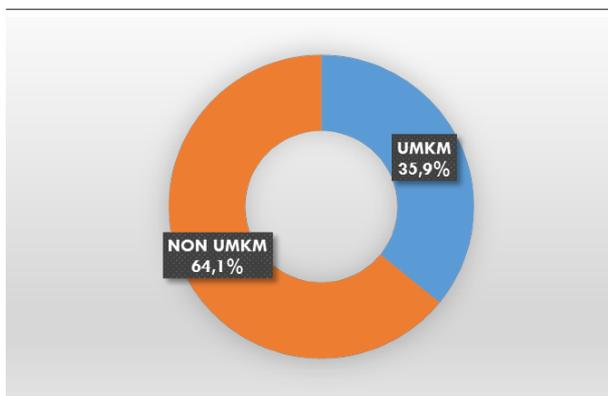
Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

dibandingkan pangsa di triwulan sebelumnya yang sebesar 35,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan memiliki perhatian yang besar dan kontribusi positif dalam rangka pengembangan UMKM di Bali. Sementara itu, berdasarkan nominal kreditnya, maka pangsa realisasi kredit UMKM terbesar berada pada rentang nominal Rp 1- 2 miliar rupiah, yakni sebesar 14,8% dari total kredit UMKM yang ada di Bali.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22 Pertumbuhan Kredit UMKM



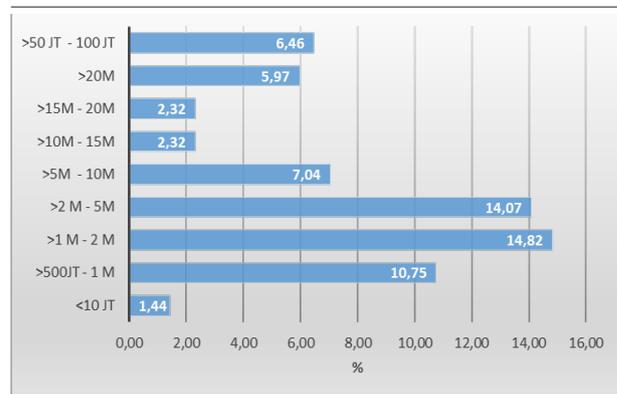
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit

Di sisi lain, berdasarkan sebaran wilayahnya, konsentrasi realisasi kredit UMKM terbesar berada di Kota Denpasar yakni dengan pangsa sebesar 33%, diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 18% dan Kabupaten Gianyar sebesar 12%.

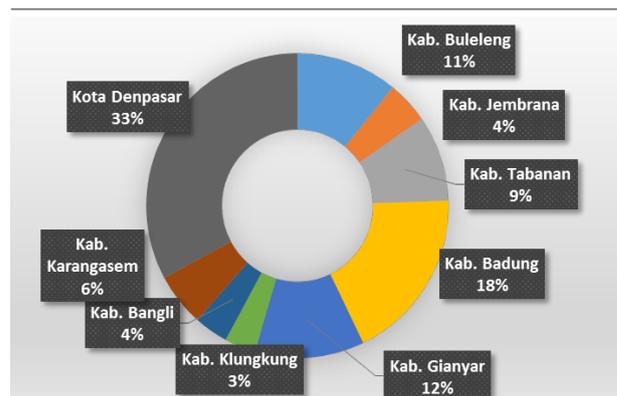
Sementara itu berdasarkan sektor ekonominya, realisasi kredit UMKM masih terkonsentrasi di sektor PHR dengan pangsa sebesar 69,52%, diikuti oleh

sektor pertanian dengan pangsa sebesar 5,63%, dan sektor ekonomi lainnya memiliki pangsa relatif rendah di bawah 5%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Pangsa Nominal Kredit UMKM



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten

4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk

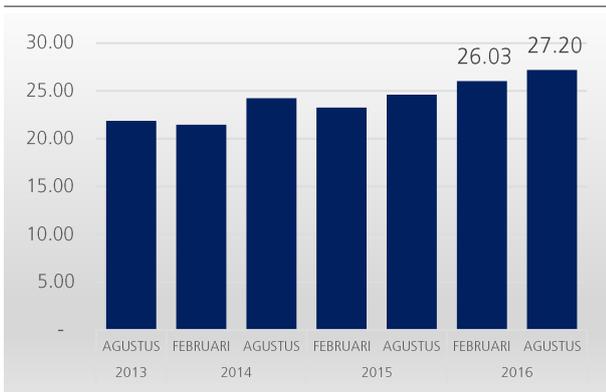
Indikator akses keuangan di Bali terutama dari sisi penghimpunan dana mengalami peningkatan, begitu juga dari sisi kredit. Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Bali tetap menunjukkan tren peningkatan, di mana pada bulan Agustus rasio tersebut tercatat sebesar 146,48%. Rasio yang lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa terdapat penduduk angkatan kerja di Bali yang memiliki rekening simpanan lebih dari satu. Selain itu rasio lebih dari 100% juga mengindikasikan adanya penduduk bukan angkatan kerja yang juga memiliki rekening seperti siswa sekolah maupun mahasiswa. Sementara itu, rasio jumlah rekening kredit terhadap

penduduk angkatan kerja di Bali menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 27,20% di bulan Agustus 2016. Masih rendahnya rasio rekening kredit menunjukkan bahwa fasilitas pembiayaan masih sedikit digunakan oleh masyarakat di provinsi ini dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit di masa yang akan datang.



Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.26 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja



Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.27 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja

BOKS C

MEMBANGUN OPTIMISME PEREKONOMIAN BALI

Mengawali tahun 2017, peluang dan tantangan perekonomian setahun ke depan akan menjadi topik diskusi yang hangat. Dampak ekonomi global masih terasa dan belum memberikan harapan yang menggembirakan. Berbagai peristiwa di tahun 2016, seperti keluarnya Inggris dari Masyarakat Ekonomi Eropa, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, kebijakan The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunganya, berlanjutnya tren penurunan harga komoditas dunia, serta masih berlangsungnya pergolakan di kawasan Timur Tengah, masih terus membayangi perekonomian tahun 2017. Namun berbeda dengan kondisi perekonomian Bali, optimisme masih tetap terjaga, melihat data ekonomi Bali yang cukup menjanjikan.

Mencermati ekonomi Bali



Tahun 2016 menjadi momentum perbaikan ekonomi nasional dan regional. Itu tercermin oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi. Pada 2016, pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,02% (yoy),

lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang tumbuh 4,88% (yoy). Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan (13 paket) dan yang dimulai bulan Juli tahun 2016, telah memberikan harapan akan kuatnya upaya pemerintah untuk memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha.

Perekonomian Bali juga menunjukkan perbaikan kinerja. Pada tahun 2016 ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 sebesar 6,03% (yoy). Perbaikan tersebut, didorong oleh mulai membaiknya kinerja ekspor barang dan jasa, sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi beberapa negara tujuan ekspor Bali yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Australia. Upaya promosi oleh pelaku usaha industri pariwisata dan perluasan pasar alternatif seperti Timur Tengah, ikut mendorong peningkatan kunjungan wisman. Membaiknya kinerja perekonomian Bali di tahun 2016, juga didorong oleh (i) meningkatnya kinerja investasi, seiring dengan tendensi mulai turunnya tingkat suku bunga kredit perbankan; (ii) respon dari pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No.1 tahun 2016 mengenai pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modal; (iii) meningkatnya optimisme dan keyakinan dunia usaha terhadap perbaikan kinerja ekonomi ke depan. Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga (dengan pangsa sebesar 48,30% terhadap PDRB Bali 2016), mengalami sedikit perlambatan meskipun tetap tumbuh sebesar 6,69% (yoy).

Dari sisi penawaran, perbaikan kinerja ekonomi Bali didorong meningkatnya kinerja lapangan usaha akomodasi makan minum, sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisman. Kebijakan bebas visa juga ditengarai secara signifikan mendorong peningkatan pertumbuhan kunjungan wisman dari sebesar 6,25 % (yoy) pada tahun 2015, menjadi 23,14% (yoy) di 2016. Perbaikan kinerja ekonomi Bali, juga didorong oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha transportasi, sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Bertambahnya jumlah frekuensi domestik dan pembukaan ke beberapa negara, ikut mendorong peningkatan kinerja transportasi.

Ekonomi Bali yang memiliki pangsa sebesar 1,57% terhadap ekonomi nasional, masih mampu tumbuh kuat mencapai 6,53% (yoy) pada 5 (lima) tahun terakhir (rata-rata 2012-2016). Dengan masih kuatnya kondisi domestik meskipun ekonomi global belum pulih sesuai harapan, peningkatan kinerja ekonomi Bali diperkirakan masih akan berlanjut di 2017, dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih optimis pada kisaran 6,2% - 6,6% (yoy).

Sementara itu, inflasi Bali tahun 2016 sebesar 3,23%(yoy), lebih tinggi dari inflasi 2015 yakni 2,75% (yoy). Pencapaian tersebut masih sesuai dengan kisaran proyeksi Bank Indonesia untuk Provinsi Bali yaitu 3,14%±1% (yoy) dan sasaran inflasi nasional sebesar 4% ±1% (yoy). Terjaganya inflasi Bali tersebut tidak lepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota. Diantaranya melalui pemantauan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan upaya-upaya untuk memastikan keterjangkauan harga barang serta memberikan edukasi kepada stakeholder terkait. Tingkat harga yang relatif stabil dan upaya-

upaya tersebut diharapkan dapat menjamin tetap terjaganya inflasi di 2017, yang diproyeksikan berada dalam kisaran sebesar 4%±1% (yoy), meskipun pada bulan Januari 2017 inflasi Bali meningkat signifikan sebesar 1,46% (mtm).

Meningkatnya optimisme

Optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2017, terutama didorong oleh membaiknya kinerja industri pariwisata, sebagai motor penggerak ekonomi Bali. Peningkatan tersebut didorong oleh kebijakan bebas visa, tren peningkatan arus wisatawan, perkiraan perbaikan perekonomian Eropa dan Tiongkok serta optimisme perekonomian India ke depan. Kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa Bali. Penurunan Bank Indonesia yang diikuti penurunan suku bunga perbankan, mendorong optimisme pelaku usaha ke depan. Namun demikian, optimisme tersebut masih dibayangi oleh beberapa risiko yang menjadi tantangan ekonomi di 2017. Antara lain potensi anomali cuaca, isu terorisme, rencana proteksi perdagangan Amerika Serikat, konflik geopolitik Timur Tengah, dan peningkatan kompetisi (kualitas dan harga) komoditas ekspor utama Bali seperti olahan kayu, pakaian jadi, perikanan, dan perhiasan.

Optimisme akan stabilitas inflasi sepanjang tahun 2017, didukung oleh perkiraan terjaganya inflasi melalui upaya : (i) perbaikan produktivitas pangan, (ii) upaya Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanam Terpadu, (iii) pembangunan infrastruktur pertanian (waduk) serta perbaikan saluran irigasi, (iv) upaya meningkatkan konektivitas penunjang dalam mendorong kelancaran distribusi, serta (v) program integrasi pertanian dan peternakan. Meskipun demikian, risiko tekanan inflasi masih bersumber dari potensi terjadinya anomali cuaca seperti tingginya

curah hujan di awal tahun. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan pasokan komoditas hortikultura. Tantangan dari penyesuaian harga komoditas dalam rangka reformasi energi oleh pemerintah, akan berdampak pada potensi terjadinya penyesuaian tarif listrik, LPG dan BBM non subsidi. Meskipun demikian, perkiraan harga minyak dunia meskipun dibayangi potensi kenaikan yang relatif lemah, membawa optimisme akan terjaganya tingkat inflasi.

Dari sisi kesejahteraan, angka pengangguran di Bali hanya sebesar 1,89% (Agustus 2016) jauh lebih kecil dari angka nasional 5,61%. Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 4,15% (September 2016) dibandingkan angka nasional 10,70%. Sementara itu yang menggambarkan ketimpangan ekonomi masyarakat menurun menjadi 0,37 dibandingkan angka nasional 0,40. Indikator kesejahteraan yang baik juga memberikan optimisme bahwa ekonomi Bali ke depan akan lebih cerah.

Beberapa Peluang Pengembangan Ekonomi

Menghadapi tantangan perekonomian ke depan, terdapat beberapa hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pariwisata. Pertama, penyediaan fasilitas penunjang pariwisata berupa penyediaan pramuwisata dengan penguasaan bahasa negara asal wisman serta penyediaan informasi wisata Bali dengan basis pemanfaatan teknologi informasi, didukung dengan penerapan *one island management*. Kedua, Provinsi Bali dapat mengambil peluang sebagai hub pintu masuk wisatawan dengan adanya pengembangan 10 destinasi wisata baru. Ketiga, pengembangan Bali sebagai pusat wisata religi, dapat menarik wisman asal India yang potensial.

Masih dalam upaya penyiapan Bali dalam menghadapi peningkatan kunjungan wisman. Peningkatan kapasitas pintu masuk ke Bali, melalui percepatan

realisasi pembangunan bandara Bali Utara dan peningkatan infrastruktur konektivitas antara Bali Utara dan Bali Selatan. Ini dilakukan melalui pembangunan jalan tol, kereta api serta *shortcut* perlu menjadi prioritas untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan.



Dengan semakin meningkatnya kompetisi perdagangan internasional, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan program fasilitasi dan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk ekspor. Terutama untuk produk kerajinan, peningkatan promosi dan perluasan pasar ekspor melalui diversifikasi segmen pasar, dengan didukung oleh kemudahan pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Sementara itu, dari sisi kelembagaan keuangan, aset LPD yang telah mencapai Rp 15,56 triliun per Agustus 2016, memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi antara lain melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.



BAB V



Foto oleh: Rai Gian Danny

Tambak Lobster, Grokgak

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH



5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

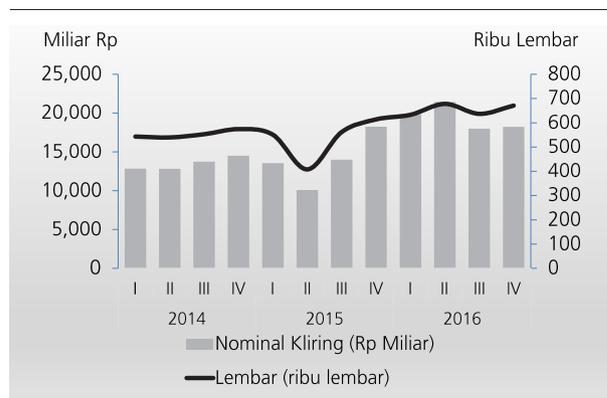
5.1.1. Transaksi Kliring

Tabel 5.1 Perkembangan Perputaran Kliring

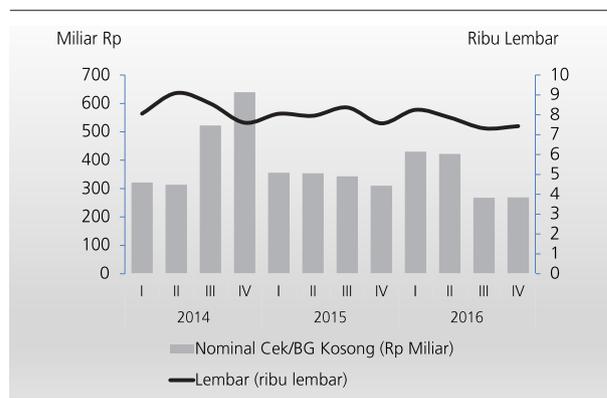
Indikator	2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PERPUTARAN KLIRING												
Lembar (ribu lembar)	543	540	553	574	551	408	562	614	633	678	637	671
- Rata-rata lembar per hari (ribu lembar)	8.91	9.47	9.06	9.11	8.89	6.69	9.37	9.75	10.74	10.78	10.80	10.65
Nominal Kliring (Rp Miliar)	12,853	12,833	13,753	14,507	13,548	10,096	14,002	18,258	19,865	21,429	18,005	18,223
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	211	225	225	230	219	166	233	290	337	335	305	289
TOLAKAN CEK/BG KOSONG												
Lembar (ribu lembar)	8.06	9.09	8.56	7.60	8.05	7.95	8.4	7.6	8.3	7.9	7.3	7.4
- Rata-rata lembar per hari (ribu lembar)	0.13	0.16	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12
Nominal Cek/BG Kosong (Rp Miliar)	321	314	522	640	356	354	343.0	310.0	430.0	422.0	268.0	269.0
- Rata-rata nominal per hari (Rp miliar)	5.26	5.51	8.56	10.15	5.74	5.80	5.72	4.92	7.3	6.7	4.5	4.3

Selama triwulan IV 2016, aktivitas transaksi nontunai menunjukkan perlambatan baik secara nominal maupun jumlah transaksi, seiring dengan perlambatan aktivitas perekonomian. Jumlah nominal perputaran kliring yang mencapai Rp 18,2 triliun, tumbuh melambat dari 28,58% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi terkontraksi sebesar 0,19% (yoy) pada triwulan IV 2016. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi lembar kliring pada triwulan IV 2016 juga melambat dari 13,34% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 9,28% (yoy).

Pada triwulan IV 2016 jumlah tolakan cek/bilyet giro kosong tercatat sebesar 7,4 ribu lembar dengan nominal sebesar Rp 269 miliar. Jumlah lembar tolakan tersebut mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,4% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,3 ribu lembar. Lembar tolakan tersebut mencapai 1,1% dari total lembar kliring yang ditransaksikan pada triwulan IV 2016. Sedangkan secara nominal, tolakan cek/bilyet giro kosong mengalami penurunan sebesar -13,22% (yoy). Dari segi nominal, tolakan tersebut mencapai 1,47% dari keseluruhan nominal transaksi kliring triwulan IV 2016.



Grafik 5.1 Perkembangan Kliring



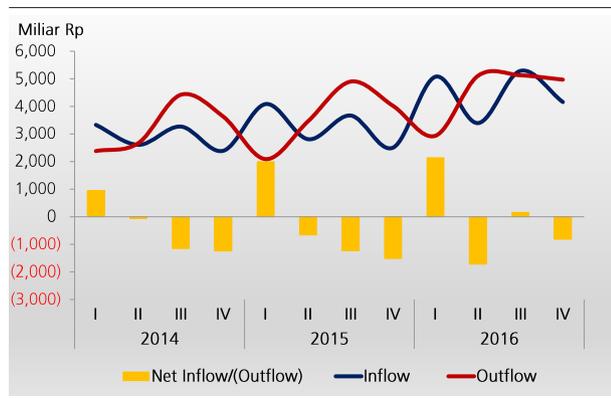
Grafik 5.2 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong

5.1.2. Perkembangan Aliran Uang Kartal (Inflow dan Outflow)

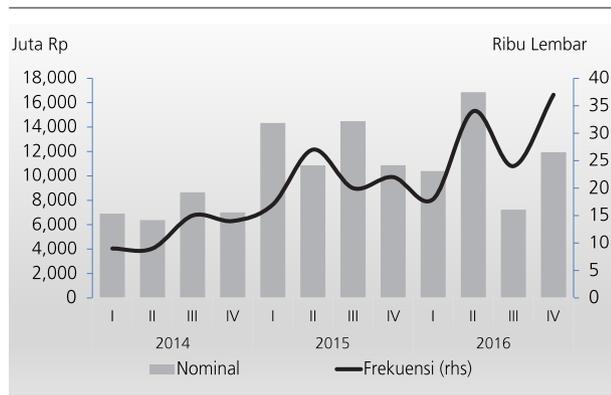
Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali

Indikator	2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inflow (Miliar Rp)	3,331	2,607	3,269	2,392	4,086	2,810	3,669	2,507	5,076	3,395	5,287	4,157
Outflow (Miliar Rp)	2,382	2,669	4,422	3,630	2,089	3,464	4,899	4,018	2,937	5,107	5,127	4,969
Net Inflow/(Outflow)	949	(62)	(1,153)	(1,238)	1,996	(654)	(1,230)	(1,512)	2,138	(1,712)	160	(812)
Penukaran (Miliar Rp)	84	81	93.7	93	64.29	16	17	18	21	21	19	30
Temuan Uang Palsu (lembar)	1,155	1,001	986	1591	1,477	882	1,013	1,372	1,934	1,409	1,029	1,222
Frekuensi Kas Keliling	9	9	15	14	17	27	20	22	18	26	22	34
Nominal Kas keliling (Juta Rp)	6,906	6,375	8,647	7,005	14,342	10,865	14,489	10,877	10,393	16,663	7,234	11,943

Sejalan dengan pola musimannya, aliran uang kartal pada triwulan IV 2016 menunjukkan posisi *net outflow* sebesar Rp 812 miliar. Nominal *outflow* tercatat sebesar Rp 4,9 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 5,1 triliun. Sementara *inflow* tercatat sebesar Rp 4,1 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 5,2 triliun.



Grafik 5.3 Perkembangan Uang Kartal di Bali



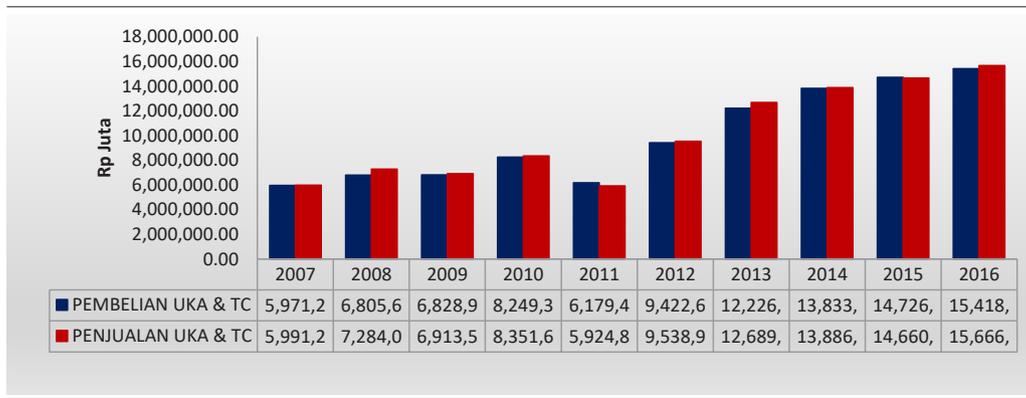
Grafik 5.4 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling

5.1.3. Temuan Uang Palsu dan Penyediaan Uang Layak Edar

Keberadaan uang palsu di masyarakat merupakan hal yang sangat merugikan. Jumlah uang palsu yang teridentifikasi pada triwulan IV 2016 mencapai 1.222 lembar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1.029 lembar. KPw BI Provinsi Bali secara konsisten berupaya menekan peredaran uang palsu melalui kerja sama dengan Kepolisian Daerah Bali. Selain itu, KPw BI Provinsi Bali secara rutin melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah kepada masyarakat umum dan pelaku usaha di Bali untuk meminimalisir dampak negatif peredaran uang palsu. Bank Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas uang layak edar di masyarakat (*clean money policy*), dengan cara menarik uang lusuh/rusak dari aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*). Penyediaan uang layak edar tersebut dilakukan dengan kegiatan penukaran uang dan kegiatan kas keliling. Di Provinsi Bali, kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) yang merupakan salah satu daerah terpencil di Provinsi Bali. Frekuensi layanan kas keliling pada triwulan IV 2016 mencapai 34 kali.

5.1.4. Perkembangan KUPVA BB di Provinsi Bali

Perkembangan transaksi jual – beli valas di Provinsi Bali cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data transaksi Penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali, total transaksi jual – beli valas tahun 2016 mencapai Rp 31,08 triliun,

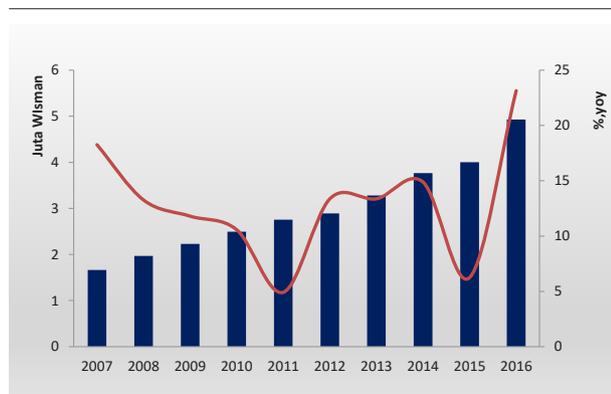


Sumber: LKPBUv2, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali

meningkat 5,78% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2016, total pembelian dan penjualan valas masing-masing sebesar Rp 15,42 triliun dan Rp 15,66 triliun.

Peningkatan perkembangan transaksi jual – beli valas tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisman di sepanjang tahun 2016. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisman tahun 2016 tumbuh sebesar 23,14% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

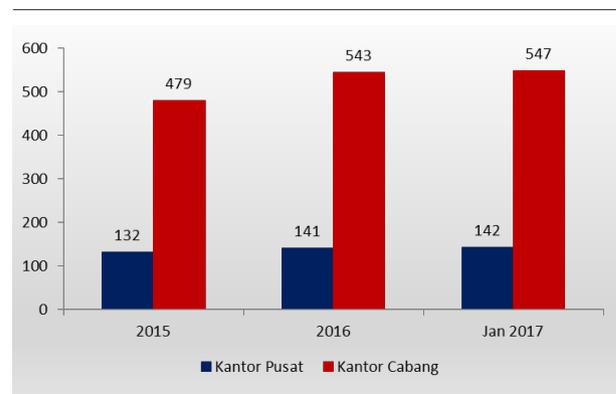


Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 5.6 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali

Peningkatan transaksi jual – beli valas di tahun 2016 juga didorong oleh bertambahnya jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali. Berdasarkan jumlah kantornya, sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat 684 Kantor KUPVA BB Berizin yang terdiri dari 141 Kantor Pusat (KP) dan 543 Kantor Cabang (KC). Dibandingkan

dengan akhir tahun 2015, jumlah tersebut meningkat sebanyak 73 kantor, dengan masing-masing peningkatan sebanyak 9 KP dan 64 KC. Selanjutnya, pada Januari 2017, terdapat penambahan 1 KP dan 4 KC KUPVA BB Berizin sehingga total KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali sampai dengan Januari 2017 mencapai 689 kantor, yang terdiri dari 142 KP dan 547 KC.

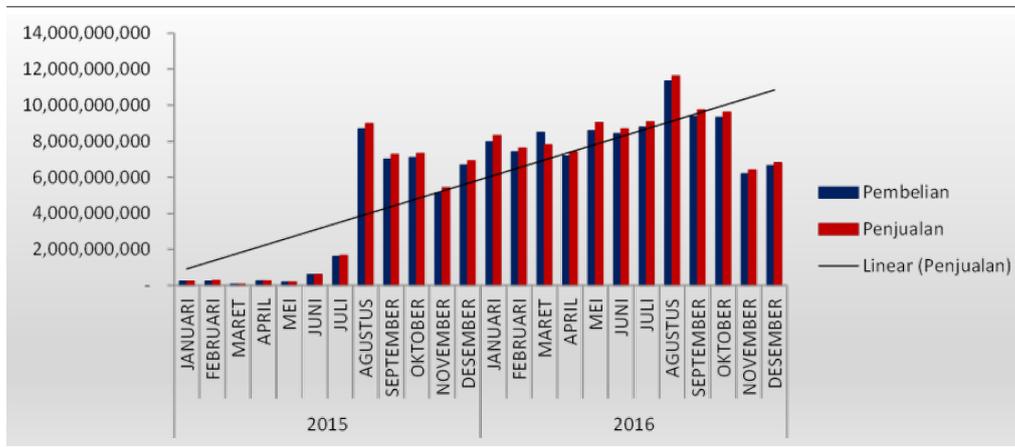


Sumber: BISKOMVA, diolah

Grafik 5.7 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

Bertambahnya jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali juga didorong oleh berbagai upaya yang dilakukan KPwBI Provinsi Bali diantaranya:

- Sosialisasi dan edukasi kepada asosiasi, pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan pihak media terkait kewajiban bagi seluruh KUPVA BB untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia;
- Pemasangan *advetorial* di media cetak lokal di Provinsi Bali terkait proses perizinan KUPVA BB (\pm 15 media cetak); dan



Sumber: LKPBUv2, diolah

Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Penyelenggara KUPVA BB yang Berlokasi di Hotel

- Penyampaian surat teguran kepada KUPVA BB Tidak Berizin agar mengajukan izin kepada Bank Indonesia.

Selain itu, implementasi Kewajiban Penggunaan Rupiah di Provinsi Bali juga ikut mendorong peningkatan jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali, khususnya KUPVA BB yang bekerjasama dengan hotel-hotel yang berlokasi di Provinsi Bali. Hal tersebut terkonfirmasi dari total transaksi salah satu KUPVA BB yang memiliki 64 (enam puluh empat) Kantor Cabang yang berlokasi di hotel di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang disampaikan ke KPwBI Provinsi Bali, jumlah transaksi KUPVA tersebut pada tahun 2016 mencapai Rp 201,88 miliar, meningkat signifikan sebesar 162,29% (yoy) dibandingkan jumlah transaksi pada

tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 76,97 miliar.

Dalam rangka memberantas KUPVA BB Tidak Berizin, KPw BI Provinsi Bali menginformasikan keberadaan KUPVA BB Berizin dan menghimbau untuk melakukan penukaran di KUPVA BB berizin kepada wisatawan dan masyarakat. Selain itu, KPwBI Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya diantaranya seperti ditunjukkan pada Gambar 5.1.

5.1.5. Pengembangan Layanan Keuangan Non Tunai dan Elektronifikasi

Arahan Presiden mengenai transformasi penyaluran bansos secara non tunai telah diterjemahkan oleh Bank Indonesia ke dalam suatu model bisnis, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kebijakan penyaluran bansos non tunai baik dalam bentuk



Ket: biru upaya pemberantasan KUPVA BB Tidak Berizin, merah upaya menginfokan KUPVA BB Berizin

Gambar 5.1 Upaya Pemberantasan KUPVA Tidak Berizin di Provinsi Bali

Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan, pupuk, dan dana desa dinilai lebih efisien dibandingkan dengan bansos tunai. Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat mendukung kebijakan tersebut karena dapat diterima tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi (6T). Melalui kebijakan ini, sedikitnya terdapat percepatan manfaat yang diterima oleh setiap penerima bansos sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui Nawa Cita, yaitu mewujudkan kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusif keuangan mencapai 50% penduduk sampai tahun 2019.

Inisiasi penyaluran bansos secara nontunai ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Elektronifikasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) oleh Bank Indonesia dan lima kementerian pada tanggal 26 Mei 2016. Keseriusan Bank Indonesia mendukung kebijakan Pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial secara non tunai selaras dengan salah satu pilar dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yaitu "Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah". Dalam menyalurkan bansos non tunai tersebut, Bank Indonesia mendukung Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyediakan LKD sebagai agen bank dan menggunakan instrumen kartu kombo atau dikenal sebagai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh Himbara. Kartu kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bansos baik PKH, PIP, bantuan pangan, dan lain-lain.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non tunai/ elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme LKD, agen bank, atau e-warong. LKD merupakan pembayaran dan jasa keuangan yang bekerjasama dengan pihak ketiga (agen) dan menggunakan

teknologi *mobile* dan berbasis *daring* (dalam jaringan *online*). Layanan ini mendukung perkembangan keuangan inklusif dan distribusi yang efektif dari dana bantuan pemerintah ke masyarakat (G2P). Mulai pertengahan 2016, atau tepatnya pada penyaluran PKH tahap III, LKD digunakan sebagai salah satu sistem distribusi bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada KPM. Hal ini juga ditujukan sebagai bagian dari usaha untuk mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan juga untuk mendorong efisiensi distribusi bantuan dan juga meminimalisir kebocoran atau kecurangan. Elektronik warung gotong royong (e-warong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur. Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan layanan keuangan non tunai dan elektronifikasi di Provinsi Bali, KPwBI Provinsi Bali telah melakukan *monitoring* kesiapan agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) secara non tunai dan edukasi kepada agen LKD dan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK) terkait mekanisme penyaluran bansos secara non tunai, bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan BULOG Divre Bali. *Monitoring* kesiapan agen LKD telah dilakukan kepada 20 agen LKD PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai calon agen penyalur bansos non tunai. Sedangkan edukasi telah dilakukan kepada 108 agen LKD dan Sahabat RPK di Provinsi Bali. Selanjutnya dalam rangka mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai di tahun 2017 untuk bantuan PKH dan juga pangan, akan dilakukan *Monitoring* Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai dan Optimalisasi Pemanfaatan LKD di wilayah Bali yang menjadi lokasi penyaluran bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI



Foto oleh: Umrans Usman

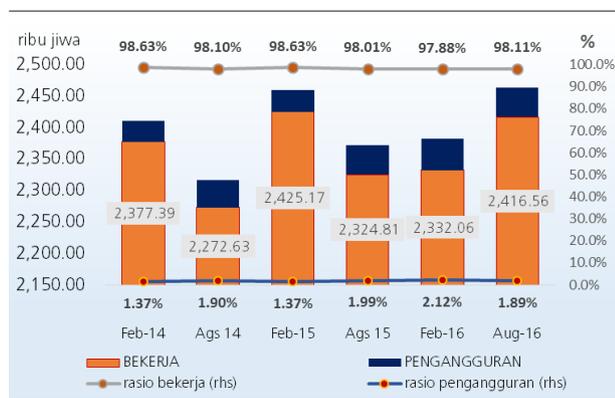
Restoran Biku

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN



6.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN

Secara umum perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Agustus 2016 menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Agustus 2016 tercatat sebesar 2.463.039 atau meningkat 3,4% dibandingkan Februari 2016 dan meningkat sebesar 3,8% (yoy) dibandingkan bulan Agustus 2015. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, juga mengalami peningkatan. TPAK di Agustus 2016 tercatat sebesar 77,24%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode Februari 2016 (75,28%) dan Agustus 2015 (75,51%). Peningkatan angkatan kerja dan TPAK pada Agustus 2016, juga diiringi oleh peningkatan kesempatan bekerja. Hal ini tercermin dari struktur angkatan kerja, dengan total angkatan kerja yang bekerja tercatat sebesar 98,11%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode Februari 2016 (97,88%) dan Agustus 2015 (98,01%).



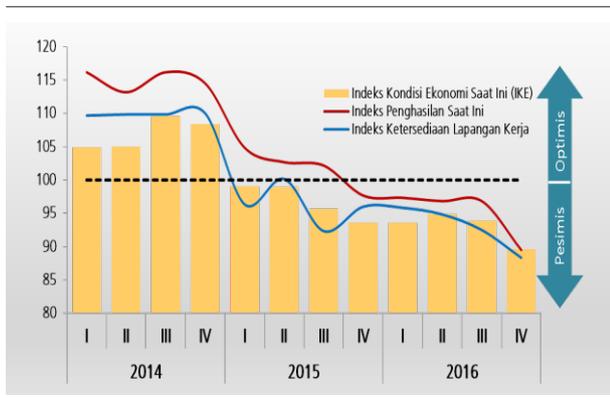
Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.1 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Meskipun kondisi tenaga kerja di bulan Agustus 2016 menunjukkan perbaikan, namun perkembangan ketenagakerjaan di triwulan IV 2016 menunjukkan tendensi penurunan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator penuntun ketenagakerjaan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil Survei Konsumen (SK) yang dilaksanakan di triwulan

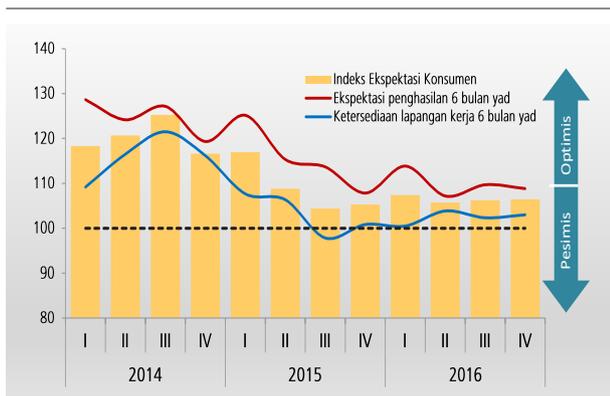
laporan. Berdasarkan hasil SKDU, penggunaan tenaga kerja di triwulan IV 2016 tercatat sebesar -17,02%, menurun dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar -0,33%. Pengurangan penggunaan tenaga kerja paling besar, terjadi di sektor jasa-jasa. Pada periode triwulan IV 2016, penggunaan tenaga kerja untuk sektor jasa tercatat sebesar -6,65%, menurun cukup besar dibandingkan dengan periode triwulan III 2016 yang sebesar 6,35%. Penurunan penggunaan tenaga kerja di sektor jasa ini, juga sejalan dengan perlambatan kinerja beberapa lapangan usaha jasa di triwulan IV 2016 (berdasarkan dari PDRB Bali). Perlambatan pertumbuhan terjadi di sejumlah lapangan usaha jasa-jasa yang meliputi jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan yang signifikan, terjadi pada jasa perusahaan yang melambat dari 6,3% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 4,9% yoy pada triwulan IV 2016.

Sejalan dengan hasil SKDU, SK di triwulan IV 2016 juga menunjukkan tendensi penurunan terkait dengan kondisi ketenagakerjaan. Hal ini tercermin dari tingkat kepercayaan konsumen pada indikator ketersediaan lapangan pekerjaan, dengan nilai indeks rata-rata pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 92,5, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 99,33. Indikator yang lain dari hasil SK yaitu indeks kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan indeks penghasilan saat ini, juga mengalami penurunan disepanjang triwulan IV 2016, yaitu masing-masing turun dari 93,89 dan 96,83 pada triwulan III 2016 menjadi 89,61 dan 89,50. Penurunan angka indikator pada ketiga indeks tersebut, juga sejalan dengan penurunan kinerja konsumsi rumah tangga di periode triwulan laporan, bila dibandingkan dengan triwulan III 2016. Konsumsi rumah tangga triwulan IV 2016 tercatat turun menjadi 7,6% yoy dari 6,6% yoy pada triwulan sebelumnya.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 6.2 Perkembangan Indikator Survei Konsumen



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 6.3 Indikator Ekspektasi Survei Konsumen

Sementara itu, terkait dengan ekspektasi konsumen ke depan, level optimisme konsumen menunjukkan tendensi penurunan disepanjang triwulan IV 2016. Meskipun demikian, indikator tingkat ekspektasi konsumen atas kondisi ketenagakerjaan ke depan di periode triwulan laporan masih menunjukkan peningkatan. Hal tersebut tercermin oleh tingkat level optimisme konsumen terhadap ketersediaan

lapangan kerja pada 6 bulan yang akan datang, yang meningkat menjadi 103 di periode laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 102,3. Peningkatan indikator ini, juga sejalan dengan peningkatan ekspektasi konsumen terhadap perekonomian ke depan yang diperkirakan tumbuh lebih baik.

6.2. Kesejahteraan

6.2.1. Perkembangan Kesejahteraan Tahun 2016 Bali

Jumlah penduduk miskin di Wilayah Bali menurun pada September 2016 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di periode Maret 2016, maupun pada periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 174,94 ribu orang atau 4,15% dari jumlah penduduk Bali di September 2016. Sementara itu, pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 178,18 ribu orang atau 4,25% dari jumlah penduduk Bali di periode tersebut. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah penduduk miskin turun cukup besar yaitu sebesar 218,79 ribu orang atau sekitar 5,25% dari jumlah penduduk Bali di September 2015. Menurunnya jumlah penduduk miskin, didorong oleh penurunan penduduk miskin pada wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin pada wilayah perkotaan pada September 2016 tercatat sebesar 93,74 ribu orang, menurun dari Maret 2016 yang tercatat sebesar 96,98 ribu orang.

Tabel 6.1 Perkembangan Kemiskinan Bali

	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Mar	Sep										
Jumlah Penduduk Miskin	166.23	183.1	160.95	161	182.77	186.53	185.2	195.95	196.71	218.79	178.18	174.94
Persentase Penduduk Miskin (rhs)	4.2	4.59	4.18	3.95	3.95	4.49	4.53	4.76	4.74	5.25	4.25	4.15
- Kota	3.91	4.2	3.81	3.81	3.9	4.17	4.01	4.35	4.31	4.52	3.68	3.53
- Desa	4.65	5.17	4.17	4.17	4.04	5	5.34	5.39	5.44	6.42	5.23	5.21
Garis Kemiskinan (Rp)	233172	240543	254221	254221	284009	284009	295210	301747	321834	331028	338967	346398
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,66	0,62	0,39	0,39	0,70	0,71	0,42	0,87	0,66	1,13	0,51	0,53
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,13	0,17	0,07	0,16	0,17	0,06	0,26	0,14	0,35	0,09	0,11

Sumber: BPS Provinsi Bali

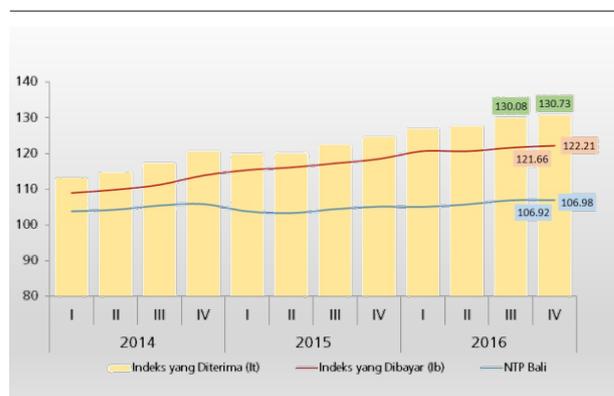
Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk yang termasuk miskin atau tidak miskin sepanjang periode Maret 2016 hingga September 2016 meningkat sebesar 2,19%. GK pada September 2016, berada pada level Rp.346.398 per kapita per bulan meningkat dibandingkan Maret 2016 yang tercatat sebesar Rp.338.967. Jika dilihat dari komposisinya, GK makanan pada September 2016 berada pada level Rp.238.822, meningkat dibandingkan Rp.234.393 di Maret 2016 atau meningkat sebanyak 1,89%. Sementara itu, GK bukan makanan pada September 2016 mencapai Rp.107.576, meningkat dibandingkan dengan Rp.104.574 (Maret 2016) atau naik sekitar 2,87%. Meskipun GK makanan mengalami peningkatan yang lebih rendah dibandingkan GK bukan makanan, namun kontribusi GK makanan terhadap GK total jauh lebih besar dibandingkan GK bukan makanan. Hal ini menunjukkan, besarnya peranan komoditas makanan terhadap pembentukan GK. Selanjutnya, jika dilihat dari komoditasnya, Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan di antaranya beras, daging babi, rokok, daging ayam ras, bawang merah, kopi bubuk, pisang, kue basah dan susu bubuk. Sementara itu, di daerah pedesaan adalah beras, daging babi, rokok, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, kopi bubuk, gula pasir, cabai rawit dan kue basah.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P¹) pada September 2016 meningkat menjadi 0,53 dari 0,51 pada Maret 2016. Sejalan dengan P¹, P² di September 2016, juga mengalami peningkatan menjadi 0,106 dari 0,093 pada Maret 2016. Peningkatan kedua indeks ini, mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauh dari GK dan ketimpangan diantara penduduk miskin semakin melebar. Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, kondisi kemiskinan di wilayah perkotaan Bali cenderung lebih baik

dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Hal ini tercermin dari nilai P¹ dan P² di perkotaan (0,395 dan 0,064), lebih rendah dibandingkan di daerah pedesaan (0,759 dan 0,178).

6.2.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali di triwulan IV 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan III 2016. Peningkatan NTP menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan daya beli petani khususnya di daerah pedesaan. Jika dilihat secara subsektor, peningkatan NTP di triwulan laporan, terjadi pada subsektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Peningkatan NTP tertinggi, terjadi di subsektor perikanan yang meningkat sebesar 1,08% (qtq) atau menjadi 103,98 di triwulan IV 2016 dari sebelumnya sebesar 102,87. Selanjutnya, peningkatan NTP juga terjadi di subsektor tanaman pangan, yang meningkat menjadi 96,59 pada triwulan IV 2016 dari 96,32 di triwulan sebelumnya. Sementara itu, subsektor peternakan hanya mengalami peningkatan sebesar 0,15% (qtq) atau meningkat menjadi 116,32 pada triwulan IV 2016, dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 116,15.



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani

Tabel 6.2 Perkembangan Nilai Tukar Petani

KETERANGAN	2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
TANAMAN PANGAN								
IT Pangan	115.85	113.60	119.15	123.40	122.45	120.51	121.05	122.06
IB Pangan	118.76	119.23	121.09	122.81	124.90	124.61	125.58	126.20
NTP-Tanaman Pangan	97.55	95.27	98.40	100.48	98.04	96.71	96.32	96.59
HORTIKULTURA								
IT Hortikultura	120.25	118.99	120.90	123.93	127.02	128.79	130.56	131.05
IB Hortikultura	116.70	117.08	118.71	120.27	121.90	121.92	122.81	123.28
NTP-Hortikultura	103.04	101.63	101.84	103.05	104.20	105.64	106.61	106.33
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT								
IT Perkebunan Rakyat	112.18	118.23	116.59	120.07	120.81	127.90	129.30	129.67
IB Perkebunan Rakyat	115.85	116.20	117.87	119.32	121.20	121.08	122.00	122.71
NTP-Perkebunan Rakyat	96.83	101.75	98.91	100.63	99.67	105.64	105.95	105.68
PETERNAKAN								
IT Peternakan	127.01	128.67	132.02	131.93	134.34	135.35	136.68	137.32
IB Peternakan	112.80	113.29	114.67	116.21	117.50	117.29	117.74	118.19
NTP-Peternakan	112.60	113.57	115.13	113.53	114.33	115.40	116.15	116.32
PERIKANAN								
IT Perikanan	124.18	124.06	126.60	123.97	124.78	126.98	126.78	129.15
IB Perikanan	117.77	118.58	120.23	121.35	123.38	122.56	123.50	122.86
NTP-Perikanan	105.44	104.62	105.30	102.16	101.13	103.61	102.87	103.98
PROVINSI BALI								
IT	119.70	120.76	123.14	125.48	126.93	128.83	130.08	130.73
IB	115.76	116.19	117.80	119.36	121.04	120.88	121.66	122.21
NTP	103.41	103.93	104.54	105.13	104.86	106.58	106.92	106.98

Sumber: BPS Provinsi Bali

BAB VII



Foto oleh: Putriana Nurman

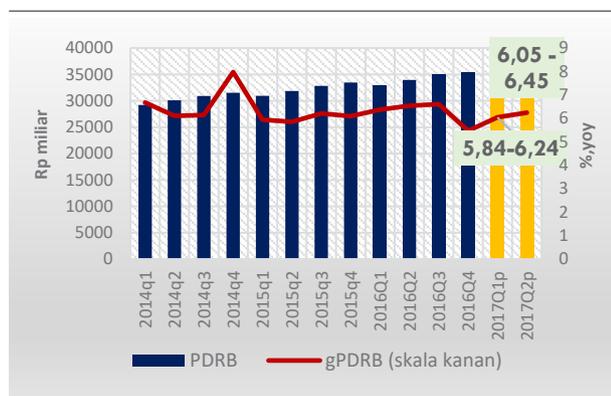
Nusa Penida

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH



7.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2017 diperkirakan meningkat yaitu tumbuh pada kisaran 6,05%-6,45% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan terutama didorong oleh sebagian besar komponen terutama konsumsi, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha utama antara lain lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulanan

Sisi permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2017, didorong oleh perkiraan peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, investasi (PMTB), ekspor, serta konsumsi rumah tangga. Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah tersebut bersamaan dengan telah selesainya penataan organisasi dan perangkat daerah (OPD) yang baru dan telah dimulainya proses pengadaan di triwulan II 2017. Dengan demikian, rencana pembangunan proyek infrastruktur yang akan berlangsung pada tahun 2017 antara lain adalah peningkatan kapasitas jalan (pembangunan *short cut*), jembatan, irigasi (pembangunan waduk) dan penyediaan air minum, mulai terlaksana di triwulan II 2017.

Sejalan dengan realisasi pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah pada triwulan II 2017, kinerja investasi diperkirakan akan mengalami peningkatan yang dikontribusikan oleh pengerjaan proyek Pemerintah dan swasta. Peningkatan tersebut selaras dengan semakin tingginya optimisme pelaku usaha ke depan terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro regional yang berdampak pada peningkatan perkembangan usaha. Selain itu, optimisme pelaku usaha juga didorong oleh tendensi penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali yang menuju suku bunga *single digit* sebagai respon terhadap penurunan suku bunga kebijakan BI serta didukung dengan relaksasi LTV.



Sumber : Survei Konsumen

Grafik 7.2 Ekspektasi Penghasilan

Komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat di triwulan II 2017 sejalan dengan perayaan Galungan, Kuningan, Ramadhan, dan Idul Fitri serta beberapa *long weekend* yang mendorong peningkatan konsumsi. Perkiraan peningkatan pertumbuhan juga didukung dengan ekspektasi peningkatan penghasilan dengan adanya pencairan gaji ke 13 dan 14 sebagaimana terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan trend peningkatan pada triwulan II 2017.

Sementara itu, perkiraan peningkatan kinerja komponen ekspor pada triwulan depan, didorong oleh perkiraan perbaikan perekonomian negara tujuan ekspor dan upaya eksportir untuk terus melakukan diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan kualitas produk agar dapat bersaing di tengah semakin ketatnya persaingan. Selain itu, kinerja ekspor jasa diperkirakan turut mengalami peningkatan seiring dengan adanya even hari raya Galungan dan Kuningan, serta libur lebaran dengan didukung upaya beberapa hotel untuk meningkatkan promosi serta penjualan melalui *online booking*, *sales call*, dan program diskon.

Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2017 didorong oleh perkiraan peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha, antara lain lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan peternakan, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta transportasi dan pergudangan. Sesuai dengan pola musimannya, perkembangan produksi pertanian pada triwulan II 2017 diperkirakan mengalami peningkatan produksi tabaka dan perikanan pasca berakhirnya musim paceklik ikan menyusul kondisi cuaca yang lebih mendukung.

Prakiraan peningkatan pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum didorong oleh berlangsungnya hari raya Galungan, Kuningan, Ramadhan, Idul Fitri, dan libur sekolah serta didukung oleh implementasi kebijakan bebas visa yang telah mencapai 169 negara per Maret 2016. Selain itu penambahan rute penerbangan dari dan ke Bali serta pelaksanaan MICE berpotensi mendorong peningkatan lapangan usaha ini yang juga akan mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Searah dengan kondisi tersebut, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran turut diperkirakan mengalami peningkatan

bersamaan dengan perkiraan peningkatan kunjungan wisatawan dan beberapa perayaan hari besar. Di sisi lain, risiko perlambatan pada triwulan II 2017 dapat bersumber dari isu keamanan dan kenyamanan serta resiko terjadinya bencana alam yang memiliki dampak signifikan terhadap industri pariwisata. Resiko berlanjutnya La Nina juga masih membayangi kinerja pertanian di triwulan II 2017.

Perkiraan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2017

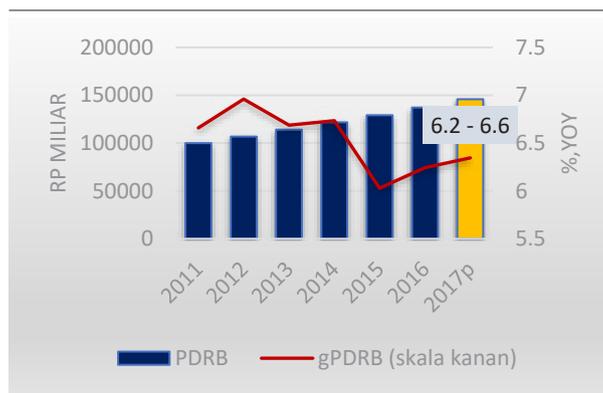
Berdasar perkembangan terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh meningkat pada kisaran 6,20%-6,60% (yoy). Dari sisi permintaan, perkiraan peningkatan pertumbuhan didorong oleh hampir semua komponen. Dari komponen konsumsi Pemerintah, perkiraan peningkatan terjadi selaras dengan adanya perkembangan positif program *tax amnesty* yang mendorong peningkatan pendapatan negara serta pengelolaan anggaran pemerintah yang semakin efisien dengan target yang realistis. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan perekonomian, terutama pembangunan infrastruktur diperkirakan akan juga turut motor penggerak akselerasi peningkatan kinerja konsumsi pemerintah di tahun 2017.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, optimisme akselerasi pada komponen investasi didorong oleh optimisme pelaku usaha mengiringi tendensi penurunan suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali yang menuju suku bunga *single digit* sebagai respon terhadap penurunan suku bunga kebijakan BI. Dukungan kemudahan investasi sebagai dampak lanjutan implementasi Perda no. 1 tahun 2016 terkait dengan pemberian insentif & kemudahan penanaman modal & pembatalan 47 perda yang berpotensi menghambat investasi, ditambah dengan relaksasi ketentuan LTV untuk kredit perumahan turut mendukung optimisme peningkatan kinerja investasi.

Komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami perbaikan di tahun 2017 bersamaan dengan kenaikan UMP dan potensi penurunan harga BBM dan LPG, serta terjaganya TTL sepanjang tahun. Dari sisi penawaran, perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali bersumber dari lapangan usaha pertanian sejalan dengan dukungan program pengembangan peningkatan produktivitas pertanian oleh pemerintah dan dukungan pembangunan infrastruktur penunjang. Industri pariwisata diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemerintah dalam *me-rebranding* dan mempromosikan Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata serta didukung upaya pelaku usaha untuk diversifikasi pasar negara asal wisman. Sementara, perkiraan peningkatan industri pengolahan didorong oleh upaya pelaku usaha dalam meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan alternatif segmen pasar baru (domestik dan ekspor). Meskipun demikian,

optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tersebut masih menghadapi resiko antara lain isu keamanan yang berdampak terhadap industri pariwisata, resiko anomali cuaca dan bencana alam, serta resiko seiring dengan revisi ke bawah perkiraan pertumbuhan ekonomi global.

Dari sisi perdagangan internasional, perkembangan terakhir pasca terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (negara utama tujuan ekspor Bali), berpotensi berdampak pada kinerja ekspor Bali terkait dengan janji kampanyenya untuk melakukan proteksi perdagangan. Selain itu, rencana untuk menaikkan bunga surat utang Amerika juga dapat mempengaruhi perkembangan investasi di Bali. Risiko terhambatnya kinerja ekspor juga terjadi seiring dengan proyeksi perlambatan di tahun 2017 yang dialami oleh Australia dan Singapura sebagai lima besar negara tujuan ekspor Bali.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

Grafik 7.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahunan

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

Negara	Pangsa Ekspor Bali	Pertumbuhan Ekonomi			
		2015	2016**	2017**	2018**
USA	25	2.6	1.6	2.3	2.5
Japan	8	1.2	0.9	0.8	0.5
Australia	11	2.4	2.9	2.7	2.9
Singapore	7	2.0	1.7	2.2	2.6
Hongkong	5	2.4	1.4	1.9	2.8
World Output		3.2	3.1	3.4	3.6

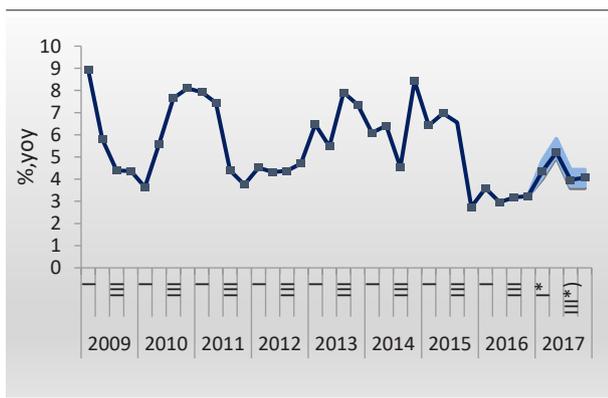
Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) Januari 2017

Keterangan :

**) angka proyeksi IMF

7.2. INFLASI BALI TAHUN 2017

Inflasi Bali triwulan II 2017 diperkirakan berada pada kisaran $5,21\% \pm 1\%$ (yoy), sehingga inflasi Bali tahun 2017 diperkirakan akan berada dalam kisaran $4\% \pm 1\%$ (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Bali tahun 2016 yang sebesar 3,23% (yoy). Perkiraan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar $4 \pm 1\%$ (yoy) sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Berdasarkan disagregasinya, secara tahunan meningkatnya inflasi pada tahun 2017 terutama bersumber dari kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu tekanan kelompok *core inflation* diperkirakan masih stabil.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan : *) Angka Proyeksi BI

Grafik 7.4 Proyeksi Inflasi Bali

Tekanan inflasi kelompok *administered prices* bersumber dari potensi kenaikan harga BBM dan tarif listrik mengikuti pergerakan harga minyak dunia & kebijakan restrukturisasi subsidi energi. Sementara itu, seiring dengan perkiraan peningkatan kinerja industri pariwisata di tahun 2017, maka terdapat potensi tendensi kenaikan inflasi di tahun 2017 bersamaan dengan peningkatan permintaan. Namun demikian, seiring dengan komitmen & koordinasi TPID dlm menjaga ketersediaan pangan antara lain : 1) potensi peningkatan produksi tabama seiring dgn upaya intensifikasi produk pangan; 2) upaya TPID dlm

menjaga ketersediaan komoditi pangan di seluruh wilayah Provinsi Bali melalui operasi pasar (beras) dan pasar murah; 3) penyediaan data harga di tingkat produsen sebagai *early warning system* diperkirakan dapat menahan volatilitas inflasi kelompok *volatile food*. Tekanan inflasi kelompok inti diperkirakan stabil, seiring dengan mulai membaiknya nilai tukar Rupiah serta ekspektasi inflasi yang terjaga. Terkendalnya tekanan inflasi inti didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan.

7.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

Sebagai upaya nyata pengendalian inflasi Bali agar tetap stabil, Wakil Gubernur Bali selaku Ketua TPID Provinsi Bali beserta seluruh jajaran secara rutin forum koordinasi *High Level Meeting* guna menetapkan langkah strategis pengendalian inflasi di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. Upaya-upaya pengendalian inflasi secara intensif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menjaga stabilitas harga di Provinsi Bali. Berbagai langkah kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan tersebut, yaitu:

1. Melakukan pertemuan rutin melalui forum koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun se-Provinsi Bali, baik rapat tim teknis maupun rapat tim kebijakan dalam menyusun langkah-langkah responsif menyikapi gejolak harga.
2. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui *talkshow* dan *press release* dan media lainnya mengenai kecukupan dan upaya menjaga ketersediaan barang terutama menjelang Hari Raya Keagamaan dan periode *peak season*.
3. Optimalisasi penyampaian informasi harga dan ketersediaan stok melalui Sistem Harga Pangan Utama Komoditas Strategis (SiGapura) dalam

rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan mendukung integrasi PIHPS nasional.

Adapun langkah pengendalian inflasi ke depan yang akan dilakukan sebagaimana disampaikan dalam *High Level Meeting* TPID Kabupaten Buleleng (sebagai salah satu kota yang menjadi perhitungan inflasi di Bali) periode Januari 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Upaya diferensiasi usaha PD Pasar Buleleng untuk melakukan stabilisasi harga melalui penyediaan 1 (satu) buah mobil box dan 1 (satu) buah gudang untuk menangani komoditas beras, gula, dan minyak curah melalui optimalisasi peran PD Pasar Buleleng dan Disperindag Buleleng sebagai *pilot project* pemotongan jalur distribusi.
- b. Optimalisasi pasar lelang yang mencakup pengembangan sistem operasional dan resi gudang.
- c. Melanjutkan program masing-masing rumah memiliki pohon cabai yang dikhususkan kepada PNS dengan memenuhi peraturan pemberian hibah yang berlaku.
- d. Melakukan penyusunan data neraca bahan makanan di semua Kabupaten/Kota.
- e. Tindak lanjut penentuan harga eceran tertinggi untuk komoditas LPG di tingkat pengecer oleh Pemerintah Provinsi.
- f. Pemerintah Daerah melalui TPID Kabupaten Buleleng perlu meningkatkan *concern* dan *awareness* pemotongan jalur distribusi (dari Jawa bisa langsung ke Singaraja) dengan melakukan kerjasama lebih lanjut antara Dinas Perhubungan dan kepolisian.

Daftar Singkatan

<i>Administered price</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan <i>moneter</i> , yakni interaksi permintaan-penawaran atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas <i>moneter</i> , yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Feronikel	Hasil olahan nikel mentah (<i>ore nickel</i>) dengan kadar antara 20-30% Ni dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja dan <i>stainless steel</i>
<i>Imported inflation</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap

	kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental
<i>Liaison</i>	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
NPI	<i>Nickel Pig Iron</i> . Hasil olahan ore nickel dengan kandungan 5-10% Ni.
<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Besarnya jumlah kredit bermasalah pada suatu Bank dibanding dengan total keseluruhan kreditnya
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<i>Perceived risk</i>	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”.
SBT	Saldo Bersih Tertimbang. Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Volatile food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

West Texas Intermediate

Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan minyak dunia.

Yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Causa Iman Karana

Koordinator Penyusun

Azka Subha A.

Editor

Teguh Setiadi

Tim Penulis

Umran Usman

Putriana Nurman

Dea Woro Rinujit

Ganis Arimurti

Rai Gian Danny

Ikhsan Utama

Foto Cover

Kelompok Pulagan

Kontributor

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan

Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi

Ni Made Wiwik Sulasih

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988



KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI

Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 80234

Telp : 62-361-248982, Fax : 62-361-248993 - 222988,

Website : <http://www.bi.go.id>